

WAJIDI

MOZAIK SEJARAH DAN KEBUDAYAAN KALIMANTAN SELATAN

Sebuah Catatan Ringan



Debut
press

Sambutan oleh
Gubernur Kalimantan Selatan

**MOZAIK SEJARAH DAN KEBUDAYAAN
KALIMANTAN SELATAN**

Sebuah Catatan Ringan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta:

Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau menyebarkan suatu ciptaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

WAJIDI

**MOZAIK SEJARAH DAN KEBUDAYAAN
KALIMANTAN SELATAN**

Sebuah Catatan Ringan

Debut Press

**MOZAIK SEJARAH DAN KEBUDAYAAN
KALIMANTAN SELATAN
Sebuah Catatan Ringan**

Penulis : Wajidi

Penerbit : Debut Press

Jl. Sisingamangaraja 23 Yogyakarta 55153

e-mail: debutpress@yahoo.com

Cetakan Pertama , November 2008

Cetakan Kedua, September 2011

Penyunting : Suriani, S.Pd

Hak Cipta © pada Penulis

Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penulis,
kecuali dalam hal pengutipan untuk keperluan
penulisan artikel atau karangan ilmiah

ISBN 987-979-96468-X

KATA PENGANTAR

Kalimantan Selatan, seperti halnya provinsi lainnya di Indonesia mempunyai bentangan sejarah dan tinggalan budaya; dari zaman prasejarah sampai periode kontemporer. Meski demikian, hanya sedikit peninggalan sejarah yang berkategori benda cagar budaya terutama yang berbentuk bangunan yang dapat bertahan hingga sekarang ini.

Pada dasarnya peninggalan sejarah hanya mampu memberikan sedikit keterangan tentang peristiwa yang sebenarnya, sehingga jika benda peninggalan sejarah tidak didokumentasikan dengan baik, semakin rusak atau akhirnya musnah, maka sejarahnya akan semakin kabur atau dilupakan oleh generasi mendatang.

Buku ini merupakan salah satu upaya dokumentasi dan mengkomunikasikan berbagai aspek kesejarahan dan kebudayaan di Kalimantan Selatan.

Pemilihan judul buku *“Mozaik Sejarah dan Kebudayaan Kalimantan Selatan: Kumpulan Catatan Ringan”* diilhami dari isi buku yang merupakan kumpulan catatan yang bersifat fragmentaris tentang sejarah dan kebudayaan Kalimantan Selatan yang sebelumnya pernah dipublikasikan di beberapa media cetak.

Sebagai seorang penulis lepas, sebenarnya tulisan yang pernah dipublikasikan di media cetak menyangkut berbagai aspek, seperti aspek sosial, lingkungan, pendidikan, dan tentu saja aspek sejarah dan kebudayaan Kalimantan Selatan.

Sejarah dan kebudayaan memang dua istilah yang tidak dapat dipisahkan. Manusia menghasilkan kebudayaan dalam berbagai bentuk, dan kebudayaan yang dihasilkan manusia di masa lampau akan menghasilkan sejarah. Oleh sebab itu, sejarah sebagai suatu ilmu, peristiwa, maupun kisah melingkupi berbagai aspek kehidupan manusia.

Sebagian besar tulisan yang terdapat dalam buku ini bertema sejarah, permuseuman, dan kepurbakalaan yang karena

semula ditulis untuk dipublikasikan di media cetak, maka isinya berbahasa populer ilmiah, atau dalam istilah lain “catatan ringan”.

Tema tulisan itu erat kaitannya dengan tuntutan pekerjaan yang pada saat pertama kali dipublikasikan di media cetak, saya berdinasi sebagai staf Bidang Muskala Kanwil Depdikbud Provinsi Kalimantan Selatan, dan kini bekerja di Balitbangda Provinsi Kalsel sebagai fungsional peneliti bidang ilmu sejarah dan arkeologi lainnya yang tentu saja bersentuhan dengan kebudayaan.

Berbagai kegiatan kedinasan yang saya lakukan seperti inventarisasi, dokumentasi, pemeliharaan, pengawasan, dan pemugaran benda/bangunan cagar budaya yang tersebar di beberapa lokasi di Kalimantan Selatan, telah mendorong munculnya tulisan-tulisan yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.

Mengingat tulisan ini dibuat beberapa tahun silam, maka data pada tulisan tertentu harus diperbaharui atau disesuaikan dengan perkembangan sekarang di sektor kebudayaan, dan sebagian pula dibiarkan apa adanya karena merupakan bagian dari informasi kebudayaan di masa lalu, di samping esensi tulisan yang memang masih relevan hingga saat ini.

Sebagai gambaran, artikel tentang arsitektur masjid tradisional Banjar masih layak baca dan bahkan di masa mendatang akan semakin bermakna seiring dengan terjadinya renovasi terhadap masjid-masjid tua yang mengubah sama sekali konstruksi dan bahan bangunannya. Dalam kondisi semakin kaburnya identitas arsitektur asli karena adanya renovasi itu, maka adanya artikel yang menyoroti arsitektur masjid dengan judul “Jamang Rumah Bubungan Tinggi di Atap Masjid” akan memberikan penjelasan terkait kesalahan penempatan jamang tersebut, di samping memberikan makna sebagai dokumentasi tentang bentuk arsitektur masjid yang sebenarnya.

Karena keterbatasan tempat, tidak semua tulisan bertema sejarah dan kebudayaan dapat dimasukkan dalam buku ini. Begitupula halnya sebagai sebuah catatan ringan, maka mungkin saja isi buku ini tidak sejalan dengan pendapat dan informasi yang selama diketahui umum. Hal itu tidak mengapa, karena yang dikehendaki dalam menyikapi perbedaan pendapat adalah selain berdiskusi secara lisan, juga yang terpenting adalah melakukan

proses dialogis melalui tulisan; sebagai salah satu upaya bersama untuk turut membangun kembali budaya/kebiasaan menulis di daerah ini, sebagaimana telah dipelopori oleh “Datu Kelampayan” dengan karya-karya tulisnya di abad ke-18.

Akhir kata, saya menyampaikan puji dan syukur ke hadirat Allah Swt yang telah memberikan taufik, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga buku ini dapat diselesaikan.

Semoga Bermanfaat.

Banjarmasin, November 2008

Wajidi



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN



Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan senang hati saya menyambut terbitnya buku *“Mozaik Sejarah dan Kebudayaan Kalimantan Selatan: Kumpulan Catatan Ringan”*.

Memang sudah selayaknya jika informasi dan pemikiran yang dipandang bermanfaat dituangkan ke dalam tulisan dan dikomunikasikan kepada para pembaca.

Penulis buku ini telah melakukan upaya konkrit menuangkan informasi, gagasan, atau pemikirannya tentang sejarah dan kebudayaan Kalimantan Selatan melalui tulisan dan menerbitkannya menjadi buku.

Meski sebuah catatan ringan, isi buku ini seyogyanya dapat diapresiasi dengan baik oleh pembaca, aparat kebudayaan, maupun penulisnya sendiri guna disempurnakan pada masa yang akan datang. Terlebih lagi dengan maksud untuk meningkatkan pembangunan di sektor kebudayaan.

Saya berharap buku ini dapat memberikan manfaat.

Wassalamualaikum Wr.Wb.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	5
Sambutan Gubernur Kalimantan Selatan	8
Daftar Isi	9
1. Jamang Rumah Bubungan Tinggi Di Atap Masjid.....	10
2. Orang Bukit “Lebih Banjar” Dibanding Dayak?.....	19
3. Lebih Seperti Salad Bowl (Lagi, Urang Banjar dalam Sejarah).....	33
4. Peran Situs Sejarah Di Kalimantan Selatan Sebagai Perekat Keindonesiaan	37
5. A.A. Hamidhan Dan Detik-Detik Yang Menegangkan Itu	
6. Hikayat Lambung Mangkurat Dalam Perspektif Sejarah Modern.....	54
7. Mengenal Metode Sejarah.....	58
8. Proklamasi 17 Mei: Sebuah Momentum Menuju Muara..	64
9. Format Kesenian Masyarakat Baru: Industri Kesenian Mutakhir Berwawasan Budaya Bangsa.....	69
10. Dari Kerajaan Tanjung Pura Ke Masjid Pusaka.....	74
11. Implikasi Persetujuan Linggajati Bagi Kalimantan.....	79
12. Migrasi Orang Banjar ke Pamadaman	83
13. Saksi Patriotisme Di Museum Wasaka.....	90
14. Studi Pra Pemugaran Seperti Apa?.....	95
15. Kendala dan Peluang Pelestarian Rumah Adat Banjar....	100
16. Dari Banjarmasin Ke Nusakambangan.....	107
17. Kisah Pilu Budak Seks (Jugun Ianfu) di Banjarmasin.....	112
18. Pembantaian Komplotan Haga di Borneo Selatan.....	116
19. Sejarah Lokal Dan Nasionalisme.....	120
20. Pemda Kalimantan Selatan Perlu Memiliki Album Sejarah Perjuangan	131
21. Peran Media Massa Pada Masa Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di Kalimantan Selatan.....	136
22. Menyoal Baayun Maulid di Kompleks Makam Sultan Suriansyah	150
23. Jas Merah (Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah).....	154
Daftar Pustaka.....	157
Tentang Penulis.....	161

1

JAMANG RUMAH BUBUNGAN TINGGI DI ATAP MASJID

Dalam pengertian sederhana jamang adalah hiasan bertatah *bakurawang* (ukiran tembus) yang terdapat di ujung talang atap sindang langit termasuk palataran (surambi sambutan), atap anjung, dan puncak bubungan pada rumah banjar Bubungan Tinggi. Jamang pada Rumah Bubungan Tinggi disebut juga Rumbai Pilis, karena merupakan hiasan berukir pada ujung pilis. Sebutan jamang juga dikenakan untuk hiasan bertatah *bakurawang* yang terdapat pada jurai atap Rumah Balai Laki.

Selain pada rumah Banjar Bubungan Tinggi, hiasan sejenis jamang juga terdapat pada masjid kuno berarsitektur atap tumpang di Kalimantan Selatan. Hiasan sejenis jamang pada masjid yang lazim disebut simbar, dapat dilihat pada atap Masjid Su, ada di desa Wasah Hilir Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Masjid Assuhada di desa Waringin Kabupaten Hulu Sungai Utara (sebagian jamang sudah rusak atau lepas), dan pada Masjid Sungai Batang, Martapura, Kabupaten Banjar, kini sudah tidak ada lagi, namun fotonya dapat dilihat di Museum Negeri Lambung Mangkurat.

Meski sama-sama bertatah *bakurawang*, bentuk jamang dalam beberapa variasi pada Rumah Bubungan Tinggi bentuknya berbeda dengan simbar yang terdapat pada masjid kuno beratap tumpang. Dalam hal penempatan, jamang pada atap anjung dan sindang langit Rumah Bubungan Tinggi adalah menyatu dan/atau merupakan ujung dari pilis, sedangkan simbar pada masjid beratap tumpang, ditempatkan di atas siku atap masjid, baik atap pertama, kedua, maupun atap ketiga. Sebagai pengecualian adalah pada simbar Masjid Sultan Suriansyah di desa Kuin Kota

Banjarmasin, yang merupakan jamang Rumah Bubungan Tinggi yang dipasang di atap masjid.



Simbar Masjid
Su'ada berada di
atas atap dimana
ujung pilis berada.



Jamang pada atap
sindang langit
Rumah Bubungan
Tinggi menyatu
dengan pilis.



Jenis jamang rumah
Bubungan Tinggi yang
ditempatkan pada
atap Masjid Sultan
Suriansyah

Masyarakat yang tidak mengetahui, akan mengira seperti yang terdapat pada Masjid Sultan Suriansyah itulah bentuk simbar masjid yang sebenarnya. Oleh karena itu, tanpa adanya kejelasan tentang kesalahan penempatan jamang rumah Bubungan Tinggi pada atap Masjid Sultan Suriansyah, dikuatirkan akan berdampak kepada pengaburan arsitektur masjid tradisional Banjar, lebih-lebih lagi jika masjid kuno beratap tumpang dan yang memakai simbar sudah tidak ada lagi akibat renovasi ke bentuk baru.

Apa yang dilakukan pemerintah untuk mengembalikan Masjid Sultan Suriansyah ke arsitektur kuno patut dihargai, meski dengan catatan bahwa apa yang dilakukan itu lebih mengarah kepada renovasi dengan penggunaan ornamentasi atau simbol arsitektur budaya Banjar. Atau bukannya restorasi (pemugaran) yang dilaksanakan secara ketat sesuai dengan prinsip-prinsip pemugaran benda/bangunan cagar budaya.

Jika renovasi Masjid Sultan Suriansyah dimaksudkan untuk mengembalikannya ke arsitektur kuno, maka seharusnya tidak akan terjadi penempatan jamang Rumah Bubungan Tinggi ke atap masjid, atau bentuk denah ruang mikrab persegi empat, karena umumnya ruang mikrab masjid beratap tumpang persegi enam.

Oleh karena itu, seyogyanya pelaksana renovasi benar-benar mengacu kepada arsitektur masjid kuno beratap tumpang, seperti Masjid Pusaka di Banua Lawas Kabupaten Tabalong, Masjid Su'ada di Wasah Hilir Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Masjid Assuhada di Waringin Kabupaten Hulu Sungai Utara, Masjid Sungai Batang Kabupaten Banjar, Masjid Tua Al Mukarromah di Banua Halat Kiri Kabupaten Tapin, dan Masjid Tua di Tamiyang Layang Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru serta masjid tua di Desa Tanjung Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Sebagai referensi lainnya, pelaksana pemugaran seharusnya juga dapat melihat foto-foto lama masjid beratap tumpang yang pernah ada di Kandangan, Barabai, dan Amuntai koleksi KITLV (*Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-en Volkenkunde, Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies*) di Leiden, Negeri Belanda. Untuk melihat foto itu tidak harus pergi ke Belanda, karena foto itu dapat diakses/di-*download* secara gratis melalui website KITLV (www.kitlv.nl), namun jika mempublikasikan foto-foto tersebut perlu izin dari dan membayar kepada KITLV.

Selain itu, di beberapa buku juga terdapat foto lama masjid Al-Mukarramah di Martapura Kabupaten Banjar, serta foto lama masjid Sultan Suriansyah, meski bukan bangunan masjid saat pertama kalinya didirikan. Referensi lainnya adalah foto-foto masjid kuno beratap tumpang koleksi Museum Negeri Lambung Mangkurat di Banjarbaru.

Arsitektur Masjid Tradisional Banjar

Seiring dengan perjalanan waktu, banyak masjid-masjid tua di Kalimantan Selatan mengalami renovasi ke bentuk baru seperti kubah masjid model Timur Tengah, model Demak, atau modern sehingga semakin mengaburkan simbol-simbol arsitektur budaya Banjar yang terdapat pada bangunan masjid.

Seyogyanya selagi masih terdapat masjid-masjid tua yang belum tersentuh renovasi, perlu dilakukan kajian tentang arsitektur masjid tradisional Banjar.

Kajian itu dimaksudkan untuk mengetahui aspek historis dan arkeologis, struktur bangunan, ragam hias, bahan, tata letak,

dan lingkungan pada masjid-masjid tua, dengan maksud untuk mengetahui arsitektur masjid tradisional Banjar seperti apa?

Hasil kajian itu nantinya adalah menghasilkan gambaran masjid berarsitektur tradisional Banjar yang dapat dijadikan rujukan bagi pemerintah daerah atau siapa saja dalam merenovasi/ membangun masjid yang sesuai dengan budaya Banjar.

Meski belum ada kajian khusus tentang masjid berarsitektur tradisional Banjar, mungkin paparan berikut dapat menggambarkan tentang arsitektur masjid beratap tumpang atau setidaknya dapat dimanfaatkan sebagai informasi awal sebelum dilakukan kajian mendalam tentangnya.

Meski sama-sama beratap tumpang (bertingkat), masjid tradisional Banjar Kalimantan Selatan mempunyai perbedaan dengan masjid tradisional Indonesia lainnya. Perbedaan tersebut terutama dalam variasi bentuk atap, ukiran atau ragam hias (ornamen) karena masing-masing dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan setempat.

Pada umumnya masjid tradisional Indonesia mempunyai atap seperti bentuk meru di Bali. Bentuk atap seperti itu, merupakan pengaruh dari arsitektur tradisional pra Islam, begitu pula dengan ornamen-ornamen selain kaligrafi banyak dipengaruhi oleh suasana lingkungan yang kaya dengan pepohonan dan bunga-bunga.

Arsitektur masjid tradisional di Jawa tercermin dari arsitektur Masjid Agung Demak yang dibangun para wali penyebar agama Islam, yang kini diimplementasikan pada arsitektur tradisional bernuansa modern pada masjid yang dibangun oleh Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila.

Di Kalimantan Selatan, masjid berarsitektur tradisional atap tumpang yang kondisinya masih utuh (belum banyak berubah) tinggal sedikit di antaranya adalah Masjid Pusaka di Banua Lawas Kabupaten Tabalong, Masjid Su'ada di Wasah Hilir Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan masjid lainnya yang telah dikemukakan di muka.

Seperti halnya rumah adat Banjar, arsitektur masjid tradisional Kalimantan Selatan juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan Kalimantan Selatan yang terdiri dari banyak rawa, sungai dan dataran tinggi yang penuh dengan pepohonan. Hutan

dengan beraneka ragam tumbuhan baik di dataran tinggi maupun dataran rendah dimanfaatkan untuk keperluan hidup penduduk, di antaranya untuk bahan bangunan dengan corak kebudayaan tersendiri dimana kebudayaan sungai merupakan hal yang dominan di daerah ini, utamanya bagi etnis Banjar, baik subetnis Banjar Pahuluan, Batang Banyu, maupun Banjar Kuala.

Selain itu, dari kayu-kayu itulah mereka tuangkan perasaan seni mereka dalam bentuk ukiran tradisional dengan motif bunga dan daun-daunan sebagai adaptasi kreatif terhadap lingkungan. Kayu ulin atau kayu besi yakni kayu khas Kalimantan yang mempunyai tekstur padat dan keras, merupakan bahan bangunan yang banyak dipergunakan dalam bangunan masjid tradisional, disamping kayu lanan, kayu kapur naga, dan kayu balangiran.

Konstruksi

Sesuai dengan kondisi alamnya, rumah panggung merupakan hal yang umum di daerah ini. Begitu pula dengan konstruksi rumah ibadah, pada mulanya berkonstruksi panggung atau berkolong yakni berdiri di atas tongkat-tongkat kayu ulin. Namun masjid yang berkonstruksi demikian, kini hanya tinggal dua buah yakni Masjid Su'ada di Wasah Hilir Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Masjid Tua di Tamiyang Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru. Sisanya telah mengalami perubahan karena lantainya diuruk dengan tanah atau beton berlantai ubin.

Bangunan induk berdenah segi empat dibangun dengan lantai menyatu dengan mikrab, tetapi mempunyai atap atau kubah tersendiri. Bangunan induk mempunyai atap tumpang tersusun tiga. Atap paling atas bentuknya meruncing lancip seperti piramida. Puncak atap selalu dihias dengan hiasan yang disebut dengan pataka (sungkul, molo) seperti terdapat pada masjid-masjid kuno atau bangunan sakral di Jawa, namun di sini variasinya lebih kaya sehingga sepintas terlihat seperti rangkaian bunga yang digarap dengan artistik.

Pada masjid yang sangat tua, pataka yang dipasang di puncak atap pada mulanya terbuat dari kayu ulin yang ditatah menyerupai putik bunga. Meski telah diganti dengan bahan logam putih mengkilat, bekas pataka dimaksud dapat ditemui di Masjid Pusaka Banua Lawas Kabupaten Tabalong.

Bekas pataka yang terbuat dari kayu ulin juga terdapat pada Masjid Basar (Besar) Pandulangan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Masyarakat setempat menyebutnya “Pataka Tiga Baranak” karena jumlahnya tiga dan dianggap mempunyai tuah. Sebelum bentuk atap diubah menjadi model bawang, pataka tersebut dipasang pada hiasan puncak atap bangunan induk, mikrab dan dipuncak panampil hadapan (pendapa).

Di setiap tingkat atap pertama, kedua dan ketiga terdapat pilis berukir, bermotif daun-daunan atau kembang di antaranya daun jeruju dan sulur-suluran. Begitu pula di setiap sudut atap (ujung bubungan) dihias dengan simbar yang mencuat ke atas dengan ukir-ukiran kombinasi antara motif bunga, daun-daunan dan kepala burung enggang yang disamarkan.

Bangunan induk ditopang oleh tiang utama (soko guru) dan tiang samping yang umumnya berpenampang segi delapan. Adakalanya pada bangunan induk terdapat tangga lingkaran yang sangat jarang ditemui di daerah lainnya.

Di Kalimantan Selatan hanya ada dua masjid yang mempunyai tangga lingkaran yakni Masjid Pusaka Banua Lawas dan Masjid Basar Pandulangan. Di Masjid Pusaka, tangga lingkaran dibuat dengan sederhana terbuat dari bahan kayu dengan trap tangga berjumlah 12 buah dan melingkari tiang bulat hingga ke atas. Di ujung trap teratas terdapat semacam balkon.

Pengaruh Ragam Hias Pra Islam

Kerajaan Banjar berdiri tahun 1526 dengan bantuan kerajaan Demak. Sejak itu pulalah agama Islam berkembang dengan pesat ke daerah pedalaman dan turut mempengaruhi mitologi atau kepercayaan masyarakat setempat. Dalam perkembangannya, Islam turut mempengaruhi budaya setempat sehingga memberikan ciri dan identitas tersendiri dalam budaya Banjar. Anggota masyarakat dan kelompok etnik Maanyan, Ngaju, dan Bukit (Dayak Meratus) yang memeluk agama Islam lebih suka menyatakan dirinya sebagai orang Banjar.

Betapapun kuatnya perkembangan Islam, tidak lantas upacara adat yang berkaitan dengan kepercayaan lama hilang begitu saja. Perpaduan tradisi masih tertanam dalam masyarakat bangsawan dan petani. Upacara Manyanggar Banua yang kini

masih dilaksanakan oleh sebagian penganut agama Islam, misalnya, sangat mengesankan sekali sebagai budaya pra Islam.

Seni ukiran yang dulunya berpijak pada konsep-konsep kepercayaan lama juga tetap diwarisi dan diterapkan dalam wujud seni bangunan rumah adat dan tradisional bahkan bangunan ibadah seperti masjid, tetapi dalam wujud disamarkan.

Selain itu kondisi lingkungan yang terdiri dari rawa-rawa, sungai, dan pegunungan yang kaya dengan pepohonan juga mempengaruhi ragam arsitektur dan ragam hiasnya.

Simbolisasi

Pengaruh ragam hias pra Islam, antara lain tampak pada arsitektur Masjid Pusaka di Desa Banua Lawas Kabupaten Tabalong, yang dulunya dibangun Khatib Dayan beserta tokoh-tokoh Dayak Maanyan yang telah memeluk agama Islam.

Meski tidak lagi diyakini, konon atap tumpang tiga berpuncak merupakan perlambang (simbolisasi) dari wujud gunung, yang pada masa pra Islam merupakan suatu yang disakralkan sebagai tempat bersemayamnya arwah nenek moyang.

Hiasan puncak (pataka, sungkul, molo) pada masjid tradisional atap tumpang seperti pada Masjid Pusaka yakni berupa ragam hias kuncup bunga teratai juga sebagai perlambang dari pohon hayat. Dalam mitos penciptaan langit, bumi dan manusia, penganut Kaharingan (orang-orang Maanyan dan Ngaju) mengakui adanya Pohon Hayat yang melahirkan kesatuan serba dua, sifat jantan dan betina, terang dan gelap dan sebagainya.

Meski demikian, ada pula yang berpendapat, hiasan puncak itu tidak mempunyai makna atau tidak perlu dikaitkan dengan pohon hayat karena hanya sebuah model hiasan yang umum digunakan pada waktu itu.

Ketika agama Islam berkembang di daerah ini, konsep pohon hayat masih dipertahankan dan disimbolkan ke dalam bentuk hiasan puncak berupa pataka yang mempunyai makna bahwa sorga merupakan perjalanan terakhir dan tertinggi yang ditempuh manusia sejak ia dalam rahim, lahir, dan mati serta dibangkitkan kembali oleh Sang Pencipta.

Kepercayaan itulah yang menyebabkan bahwa bekas pataka Masjid Pusaka yang terbuat dari kayu ulin hingga sekarang

masih dikeramatkan dan ada saja anggota masyarakat Maanyan yang menziarahinya.

Tetapi pada Masjid Basar di Pandulangan Kabupaten Hulu Sungai Utara, simbolisasi atap tumpang telah bergeser ke dalam konsep-konsep Islam. Empat tingkat atap pada masjid tersebut mempunyai perlambang, bahwa: (a) Nabi Muhammad SAW mempunyai empat sahabat utama, yaitu Abubakar, Umar, Usman dan Ali; (b) Imam Besar yang mewujudkan empat mazhab besar dalam Islam yaitu Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali; (c).

Empat tingkat menuju kesempurnaan keyakinan dalam Islam yaitu Syariat, Tharikat, Hakikat dan Ma'rifat.

Pengaruh ragam hias pra Islam, juga terlihat pada hiasan ujung talang masjid yakni jamang berupa ukiran burung enggang yang disamarkan. Burung enggang dalam bahasa Ngaju adalah tingang sebagai penggambaran sifat jantan; penguasa alam atas dalam kosmologi Kaharingan.

Begitu pula pada mimbar, pada hampir semua masjid tradisional, muka mimbar dihias dengan kalamakara atau banaspati yang disamarkan. Pada mimbar Masjid Basar di Pandulangan, terdapat *panapih* berukir kepala naga yang disamarkan. Menurut konsep kepercayaan Kaharingan, kepala naga merupakan perlambang penguasa alam bawah.

Nilai Sejarah

Sebagian besar masjid kuno di Kalimantan Selatan berusia lebih dari lima puluh tahun, sehingga selain mempunyai arsitektur yang khas dan menarik juga mempunyai nilai sejarah terutama sejarah perkembangan Islam dan sebagai basis perjuangan dalam mengusir penjajah Belanda di Kalimantan Selatan.

Seperti masjid Sultan Suriansyah di Kuin Utara Kota Banjarmasin, yang bentuknya tidak asli lagi, karena telah mengalami renovasi, merupakan masjid pertama dibangun pada masa awal berdirinya Kerajaan Banjarmasin. Bermula dari masjid itulah, Khatib Dayan yakni seorang ulama yang dikirim Sultan Demak untuk mengislamkan Pangeran Samudera, menyebarkan agama Islam ke daerah-daerah lainnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah sekarang.

Masjid Pusaka di Banua Lawas, menurut tradisi lisan merupakan masjid tertua kedua yang dibangun atas prakarsa

Khatib Dayan bersama tokoh-tokoh masyarakat Maanyan yang telah masuk Islam seperti Datu Ranggana, Datu Sri Panji, Datu Sari Nagara dan Datu Kartamina. Pada masa Perang Banjar yang mulai meletus pada tanggal 28 April 1859, Masjid Pusaka merupakan basis perjuangan melawan Belanda di daerah Banua Lawas dan Kelua. Di daerah ini, perlawanan dipimpin oleh Penghulu Rasyid dan Baji Bador. Mereka mengobarkan semangat patriotisme dengan amalan zikir yang dikenal sebagai gerakan Baratib Baamal (berzikir dan beramal) dan menggunakan Masjid Pusaka sebagai tempat kegiatannya.

Di samping masjid Pusaka terdapat pekuburan muslimin yang juga tempat dimana jasad Penghulu Rasyid dimakamkan tanpa kepala yang gugur di tangan seorang penghianat.



Masjid Su'ada di Wasah Hilir Kab. HSS dibangun tahun 1908, masih asli dengan konstruksi panggung dengan pelataran berkandang rasi



Masjid Su'ada di Wasah Hilir, beratap tumpang dengan hiasan pataka dan simbar, tampak dari arah barat.

2

ORANG BUKIT “LEBIH BANJAR” DIBANDING DAYAK?

“Orang Banjar Meratus” merupakan alternatif nama yang penulis wacanakan untuk menyebut orang Bukit atau yang sekarang populer disebut etnis Dayak Meratus. Pilihan nama Banjar Meratus dilatarbelakangi beberapa alasan. Pertama, selaras dengan perkembangan situasi dan kondisi sosial politik, nama sebuah etnis bisa saja berubah dan diterima dengan baik oleh etnis yang bersangkutan. Sebut saja nama Dayak Meratus yang populer dalam beberapa tahun terakhir sebagai sebutan lain dari etnis Bukit, terutama sejak meletusnya konflik antara etnis Madura dan etnis Dayak di Kalimantan Tengah, dimana etnis Bukit menunjukkan rasa solidaritasnya kepada etnis Dayak dengan memosisikan dirinya sebagai bagian dari Dayak dengan nama Dayak Meratus.

Kedua, bukankah orang Bukit yang tinggal di pegunungan Meratus sebenarnya “lebih Banjar” dibanding Dayak? Hal itu dapat dilihat dari beberapa relasi antara keduanya (Bukit-Banjar), seperti dalam perspektif mitologi yakni folklore yang berkembang di kalangan masyarakat Dayak Meratus dan sebagian subetnis Banjar Hulu yang menyatakan bahwa sesungguhnya etnis Banjar dan etnis Dayak Meratus mempunyai hubungan kekerabatan atau “badangsanak” karena berasal dari rumpun yang sama.

Secara umum tulisan ini bertujuan memaparkan relasi antara etnis Dayak Meratus dan etnis Banjar ditinjau dari perspektif sejarah, bahasa, dan budaya lokal, yang menunjukkan Dayak Meratus layak —meski dengan beberapa catatan— untuk disebut bagian (subetnis) dari etnis Banjar dengan nama subetnis Banjar Meratus.

LINTASAN SEJARAH ASAL USUL ETNIS

Hingga saat ini belum ada telaah dokumen lintasan sejarah yang memadai tentang rekonstruksi kesejarahan asal-usul kelompok etnis yang bermukim di Kalimantan Selatan. Oleh

karena itu, deskripsi latar belakang kesejarahan etnis Banjar dan etnis Dayak Meratus lebih banyak berupa asumsi-asumsi yang didasarkan kepada data-data yang masih terbatas (Ideham, dkk (ed.), 2003).

Asumsi-asumsi yang barangkali menimbulkan kontroversi bagi asumsi lainnya itu, seringkali merujuk kepada Hikayat Banjar, yang isinya sarat dengan unsur-unsur sastra yang imajinatif, mitos, dan pandangan hidup yang bercampur baur dengan unsur faktual dari peristiwa masa lalu. J.J. Ras menggolongkan Hikayat Banjar sebagai “a malay myth of origin”, yang artinya realibilitas data sejarahnya diragukan, tetapi sebagai teks sastra yang diproduksi ketika masalah etnisitas belum menjadi issue hangat seperti sekarang ini, ia adalah sumber valid dan dapat diperhitungkan (Mahin, 2004).

Etnis Banjar

Etnis Banjar adalah orang-orang Banjar yang bertempat tinggal di Kalimantan Selatan. Mereka terdiri atas beberapa subetnis, yakni subetnis Banjar Kuala, subetnis Banjar Hulu (Pahuluan), maupun subetnis Batang Banyu. Namun siapakah orang Banjar itu?

Atas dasar pola genealogis masyarakat Banjar, maka istilah Banjar sebenarnya bukan sekedar konsep etnis semata, namun juga dikaitkan dengan konsep politis, sosiologis, dan agamis. Banjar adalah juga sebuah nama kerajaan Islam yang pada awalnya terletak di Banjarmasin. Dalam proses pembentukan Kerajaan Banjar maka Banjar Masih dengan pelabuhan perdagangannya yang disebut orang Ngaju sebagai Bandar Masih (Bandarnya orang Melayu) dijadikan sebagai ibukota kerajaan Banjar yang kemudian menjadi kota Banjarmasin.

Dalam Hikayat Banjar (Museum Negeri Lambung Mangkurat, 1999/2000) disebutkan bahwa proses “pembanjaran” itu bermula dari datangnya saudagar Ampu Jatmika di pulau Hujung Tanah, mereka dan keturunannya kemudian mendirikan kerajaan Negara Dipa, Negara Daha, dan Kesultanan Banjarmasin. Dalam hikayat itu, ditemui istilah-istilah yang disandingkan dengan kata “Banjar” yang pada umumnya mengacu kepada pengertian wilayah kesultanan, yaitu wilayah

kerajaan dimana penduduknya disebut orang Banjar dan rajanya disebut Raja (Sultan) Banjar (Usman, 1995).

Kerajaan Banjar adalah nama lain dari sebutan Kerajaan Banjarmasin atau Kesultanan Banjar. Pengaruh Kesultanan Banjar melebar meliputi gabungan seluruh wilayah yang saat ini dikenal sebagai Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan sebagian Kalimantan Timur bahkan ada beberapa daerah yang pada saat ini masuk wilayah Provinsi Kalimantan Barat (Ideham, dkk. (ed.), 2003).

Kerajaan Banjar yang berkembang sampai abad ke-19 merupakan sebuah kerajaan Islam merdeka dengan kesatuan wilayah geografis yang dihuni oleh suatu bangsa dengan nama bangsa Banjar. Ketika kesultanan jatuh ke dalam kekuasaan kolonial Belanda, maka status bangsa Banjar turun derajatnya menjadi bangsa jajahan. Mereka tidak lagi disebut sebagai suatu bangsa (*nation*) akan tetapi hanya sebagai Urang Banjar (Usman, 1989).

Ada yang mengatakan bahwa masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan bukan semata etnis melainkan juga grup, karena secara sosiologis merupakan percampuran berbagai etnis kebudayaan, seperti kebudayaan Melayu, Bukit, Ngaju, dan Ma'anyan. Akan tetapi, memang diakui bahwa unsur Melayu terlihat lebih dominan, sebagaimana tercermin antara lain dari faktor kebahasaan.

Etnis Banjar juga sebuah etnis yang dikonstruksikan sebagai sukubangsa yang beragama Islam sebagaimana antara lain dilekatkan oleh Alfani Daud (1997) maupun Noerid Haloei Radam (1996). Namun konstruksi itu mengandung sejumlah persoalan karena asumsi atau pendekatannya yang bersifat primordialisme, kasus seperti “menjadi orang Banjar setelah memeluk agama Islam” yang telah terjadi sejak Islamisasi di awal pembentukan Kesultanan Banjarmasin, kini masih terjadi pada orang Dayak yang memeluk agama Islam.

Etnis Dayak Meratus

Etnis Dayak Meratus adalah nama kolektif sukubangsa yang mendiami perbukitan pegunungan Meratus di daerah pedalaman Provinsi Kalimantan Selatan. Dahulu dan dalam

sebagian besar publikasi ilmiah, orang Dayak Meratus lazim disebut orang (Dayak) Bukit.

Sebelum sebutan “Dayak” diterima secara umum untuk menggambarkan kesatuan etnis dan kesatuan kebudayaan yang dianggap asli Kalimantan, maka dahulunya tidak disebut dengan nama Dayak melainkan disebut berdasarkan nama tempat kediaman komunitas mereka yang umumnya ditepian sungai, seperti orang Barito, orang Kapuas, orang Kahayan, orang Katingan, orang Mentaya dan sebagainya. Atau orang Bukit (atau bubuhan orang Loksado, orang Alai, orang Labuhan, dan sebagainya) sebagai sebutan kelompok masyarakat yang tinggal di bukit-bukit pegunungan Meratus.

Orang Dayak Meratus merupakan kelompok masyarakat yang mendiami wilayah berbukit atau bergunung di Pegunungan Meratus Kalimantan Selatan. Mereka mendiami kawasan hutan di Kabupaten Balangan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tapin, Tanah Laut dan Kotabaru. Tidak diketahui dengan pasti tentang jumlah penduduk etnis ini. Badan Pusat Statistik dalam Sensus Penduduk tahun 2000 tidak secara khusus melakukan pendataan terhadap etnis ini, dan hanya menempatkannya dalam kelompok “suku-suku lainnya” (BPS Kalimantan Selatan, 2000).

Berdasarkan hasil penelitian tahun 1979 yang dilakukan oleh Noerid Haloei Radam (1996) kelompok etnis ini terdiri lebih kurang 12.000–15.000 jiwa. Mereka mengembangkan sistem kekerabatan yang disebut bubuhan yakni suatu keluarga luas utrolokal atau virilokal. Satu bubuhan biasanya tinggal di dalam suatu rumah panjang yang dinamakan balai atau balai adat, yakni bangunan yang berukuran 10 hingga 15 meter lebar dan 50 meter panjangnya.

Mereka memiliki kebudayaan yang dinamakan kebudayaan huma. Dalam kebudayaan ini, mata pencaharian hidup mereka dilakukan dengan cara meramu hasil hutan, berburu binatang, dan bercocok tanam dengan cara berladang berpindah, namun tetap dalam koridor kearifan lokal yang mereka warisi secara turun temurun.

RELASI DAYAK-BANJAR

Relasi 1: Hipotesis Asal Muasal Orang Banjar

Berbagai kajian para pakar yang didasarkan kepada folklore seperti yang dilakukan Noerid Haloei Radam, menunjukkan bahwa orang Dayak Meratus memiliki “hubungan kekerabatan” terutama dengan orang Banjar Hulu. Kesimpulan kajian itu didasarkan kedekatan religi, bahasa, dan simbol-simbol yang menunjukkan sinkretisme di antara keduanya. Kedekatan hubungan itu dapat dilihat dari Hipotesis Kaum Cerdik Tempatan (*Local Genius*) yang memungkinkan peranan hubungan etnis Dayak Meratus dalam pembentukan etnis dan budaya masyarakat Banjar.

Menurut Noerid Haloei Radam (1996) masyarakat dan budaya Banjar melalui kacamata Hipotesis Kaum Cerdik-Tempatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sejumlah puak seperti Bukit, Ngaju atau Ma’anyan telah beberapa lama mendiami kawasan hilir DAS (Daerah Aliran Sungai) Barito dan atau DAS Martapura. Boleh jadi sejak zaman batu besar (Kebudayaan Megalitik) mereka telah mendiami kawasan tersebut.

Di antara puak-puak itu, ada yang masih tetap pada tahap perkembangan peramu-pemburu (*collecting-hunting society: band society*) dan ada pula yang sudah mampu mendomestikkan tumbuhan dan hewan liar (*cultivating society: tribal society*). Corak masyarakat yang terakhir ini dinamakan masyarakat peladang.

Kontak yang lebih intensif dengan dunia luar kemungkinan terjadi lebih luas pada masyarakat peladang dibanding masyarakat peramu-pemburu. Adanya kontak mengakibatkan pranata-pranata lebih berkembang dan karenanya sistem sosialnya menjadi lebih kompleks. Sejumlah inovator yang ada dan berkembang sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Mereka dinamakan Kaum Cerdik-Tempatan atau *Local Genius*.

Merekalah pembawa perubahan dalam arti yang sebenarnya yakni pembawa idea dan teknologi, narasumber dan pemilik informasi di dalam masyarakatnya, dan boleh jadi pada tahap tertentu mereka adalah pengambil kebijakan (penguasa) yang mampu pula mengontrol warga masyarakat lainnya. Kaum Cerdik-Tempatan pada salah satu puak dari ketiga kelompok etnis tersebut (Bukit, Ngaju, dan Ma’anyan) merupakan orang Banjar

Asli yang dinamakan dengan Banjar Arkais dengan segala aktivitas perkembangan berikutnya.

Di antara ketiga puak itu, orang Banjar Arkais dari unsur Bukitlah yang lebih mendekati sebagai nenek moyang orang Banjar Hulu atau nenek moyang Dayak yang bermukim di pegunungan Meratus.

Masyarakat Banjar Arkais tersebut mampu beradaptasi dengan segala perubahan dari dunia luar, mengadopsi, mengolah dan mengembangkan informasi khususnya yang berasal dari pusat-pusat kebudayaan yang pada masa itu menjadi panutan dan kekuatan yang mengontrol kawasan Asia Tenggara yakni Melayu Budha (Sriwijaya) yang dilanjutkan dengan Melayu Islam (Malaka dan Riau).

Akibat dari hubungan yang intensif itu, maka muncullah Bahasa Banjar Arkais yang kosa katanya lebih banyak berasal dari Bahasa Melayu Kuno. Bahasa Banjar Arkais itu berkembang selanjutnya menjadi Bahasa Banjar Modern akibat sentuhan yang intensif oleh Kebudayaan Melayu Islam melalui tulisan-tulisan Arab-Melayu.

Kaum Cerdik-Tempatan pada masanya tidak saja mengadopsi bahasa, tetapi juga arsitektur dan seni yang mereka ekspresikan pada arsitektur bangunan rumah tinggal dan rumah ibadah (masjid).

Dengan demikian, Hipotesis Kaum Cerdik-Tempatan menempatkan kekuatan kelompok tertentu di dalam masyarakatnya sendiri untuk maju dan berkembang, sedangkan kekuatan yang lain yang berasal dari luar (kebudayaan lain) di antaranya masyarakat dan kebudayaan Melayu hanyalah faktor stimulan.

Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Noerid Haloei Radam, menurut Alfani Daud (1997) orang Banjar modern itu terbentuk dari adanya pertemuan dan percampuran antar kelompok Dayak Bukit, Ma'anyan dan Ngaju yang menghasilkan tiga kelompok subetnis, yaitu Banjar Kuala, Banjar Batang Banyu, dan Banjar Pahuluan. Ketiga subetnis inilah yang sekarang disebut Etnis Banjar.

Lebih lanjut Alfani Daud menyatakan bahwa pembentukan masyarakat dan kebudayaan Banjar Modern (modern dalam pengertian historis) tentunya didahului oleh masyarakat dan

kebudayaan Banjar Arkais yang bukan berasal dari puak Ngaju atau puak Ma'anyan atau gabungan keduanya. Lalu siapakah yang disebut Banjar Arkais? Mengenai hal ini, etnis Ngaju dan Ma'anyan mempunyai ceritera suci yang menginformasikan bahwa diri mereka berasal dari langit yang turun ke bumi melalui gunung bukit raya dan gunung bukit baka di sentral pulau Kalimantan. Sebaliknya etnis Bukit sekarang ini, bersandar pada mantera suci yang mereka selalu utarakan pada kesempatan ritual tertentu, menginformasikan bahwa nenek moyang mereka dahulunya berasal dari tepian sungai dan pesisir pantai.

Sumber-sumber tradisi lisan yang disampaikan dari mulut ke mulut mengatakan bahwa orang Dayak Meratus adalah orang-orang pelarian dari daerah-daerah di sepanjang bandar-bandar atau pantai Kalimantan Selatan. Mereka menyingkir ke pegunungan Meratus, guna menghindarkan diri dari berbagai konflik seperti karena tidak mampu berinteraksi, beradaptasi, atau boleh jadi pula mereka tidak mau memasuki agama Islam. Kasus tidak mau ber-Islam dan kemudian menyingkir ke pegunungan Meratus, tercermin pada mitos Intingan dan Dayuhan, sebagaimana paparan berikut.

Relasi 2: Hubungan Genealogis

Dalam folklore berupa mitos yang berkembang di kalangan etnis Dayak Meratus di daerah pegunungan Meratus Kabupaten Tapin disebutkan bahwa antara orang Meratus dan orang Banjar Hulu khususnya berasal dari satu rumpun induk yang sama yakni keturunan dua kakak beradik (bahasa Banjar: dua badangsanak) Intingan (Palui Anum) dan Dayuhan (Palui Tuha). Keduanya berasal dari desa Banua Halat. Versi dari Dayak Meratus di Loksado mereka bernama Bambang Basiwara dan Si Ayuh (Sandayuhan).

Secara administratif, desa Banua Halat Kiri berbatasan dengan desa Keramat di sebelah timur, desa Paul di sebelah barat, desa Jindah Babaris di sebelah utara, dan Kelurahan Rantau Kanan di sebelah selatan. Desa Banua Halat Kiri mempunyai luas wilayah sekitar 250 ha dengan jumlah penduduk sebanyak 721 jiwa (data tahun 1997), sedangkan ketinggian dari permukaan laut adalah 8 meter dengan keadaan suhu rata-rata 32 derajat celcius (Sarwono, dkk., 1996/1997).

Dalam terminologi penduduk Banua Halat Kiri dan sekitarnya, “banua” berarti kampung, sedangkan “halat” berarti perbatasan. Secara harafiah Banua Halat adalah kampung atau desa batas/perbatasan.

Menurut cerita penduduk setempat, dinamakan Banua Halat karena di masa awal perkembangan Islam di Kalimantan Selatan khususnya di daerah merupakan kampung yang membatasi tempat tinggal masyarakat yang memeluk agama Islam dengan masyarakat yang tetap bertahan dengan kepercayaan lamanya.

Di desa Banua Halat Kiri, terdapat sebuah Masjid Tua yang riwayatnya berkaitan dengan kisah Intingan dan Dayuhan, yakni Masjid Tua “Al Mukarramah” di desa Banua Halat Kiri, Kecamatan Tapin Utara, yang berjarak sekitar 2 km ke arah barat dari kota Rantau ibukota Kabupaten Tapin.

Tidak diketahui secara pasti kapan Masjid Tua Banua Halat dibangun dan siapa pula pendirinya, karena sumber tertulis tentang pendirian masjid ini tidak didapatkan atau memang tidak ada.

Dalam mitologi orang Dayak Bukit di pegunungan Meratus daerah Tapin, disebutkan bahwa Masjid Tua “Al Mukarramah” Banua Halat didirikan oleh Intingan. Menurut mitos itu, Intingan dan Dayuhan sebagai dua orang bersaudara kandung harus berpisah tempat tinggal karena berbeda kepercayaan (Bondan, 1953).

Ketika Islam masuk ke Banua Halat, Intingan tertarik dan menyatakan meninggalkan kepercayaan lamanya dengan memeluk agama Islam. Sedangkan saudaranya Dayuhan beserta keluarga dan pengikutnya yang tetap berkeinginan mempertahankan kepercayaan dan adat istiadat nenek moyangnya, berpindah ke daerah terpencil di pegunungan Meratus. Keturunan Dayuhan membangun desa-desa di Mancabung, Harakit, Balayawan, dan Danau Darah di pegunungan sekitar Tapin.

Sedangkan Si Intingan bersama keluarga dan pengikutnya tetap bertahan di Banua Halat, mereka mengembangkan komunitas masyarakat muslim di Banua Halat dan sekitarnya. Karena dianggap memiliki keluasan pengetahuan keagamaan, maka Intingan ditokohkan para pengikutnya dengan panggilan

Datu Ujung. Atas prakarsa Datu Ujung maka dibangunlah masjid di Banua Halat, Parigi, Gadung Keramat dan Lokpaikat.

Desa Banua Halat menjadi daerah perbatasan antara kedua bersaudara tersebut, namun demikian Dayuhan tetap menganggap Intingan sebagai saudara kandungnya dengan panggilan “Dangsanak” yang artinya “Saudara Kandung”. Sekarang pun orang-orang Dayak Meratus yang berasal dari desa-desa di pegunungan Meratus sekitar Tapin yang datang ke kota Rantau, menyempatkan diri berziarah ke Masjid Banua Halat dan mereka menyapa warga masyarakat Tapin yang tinggal di dataran rendah dengan sebutan “dangsanak”.

Relasi 3: Kesamaan Bahasa

Sebagaimana telah dikemukakan di muka, bahwa bersandar pada mitos, mantera suci, dan berbagai bentuk peralatan upacara menunjukkan bahwa orang Dayak Meratus yang sekarang bermukim di pegunungan Meratus, nenek moyang mereka dahulunya berasal dari tepian sungai dan pesisir pantai.

Kesimpulan itu juga didukung oleh alat pelacak utama perkembangan suatu kaum yakni fakta-fakta kebahasaan. Bahasa Banjar mempunyai dua dialek bahasa yaitu Bahasa Banjar Kuala dan Bahasa Banjar Hulu.

Menurut Noerid Haloei Radam (1987) bahasa orang Dayak Meratus dan bahasa Banjar (Hulu) merupakan dua bahasa yang berasal dari satu rumpun yang sama yakni Bahasa Banjar Arkais. Atau dalam istilah lain bahasa yang digunakan orang Dayak Meratus dan orang Banjar Hulu hanyalah dua intonasi (aksen) dari satu bahasa yakni Bahasa Banjar Hulu.

Pernyataan Radam itu selaras dengan pendapat para ahli lainnya seperti Hammer (dalam Cense dan Uhlenback, 1958), Aspandi Adul (1975), dan Abdurrahman Ismail dkk., (1979), dan Alfani Daud (1997) yang pada intinya menyatakan hal sama (Sulistyowati, 2005).

Hasil penelitian kebahasaan dewasa ini juga menjelaskan bahwa Bahasa Banjar Arkais adalah bahasa yang tertua di samping Bahasa Melayu Sambas, Melayu Brunei dan Bahasa Iban (Radam, 1996). Meski disadari pula bahwa Bahasa Banjar juga serumpun dengan Bahasa Melayu dan kedua-duanya termasuk ke dalam rumpun kebahasaan yang besar yakni Bahasa Austronesia.

Di segi kebahasaan terdapat fakta-fakta berupa istilah-istilah/nama peralatan upacara etnis Dayak Meratus yang merujuk pada kehidupan di muara sungai atau di daerah pesisir pantai, seperti: perahu malayang (perahu terapung-apung), tihang layar (tiang layar), dan balai bajalan (balai berpindah-pindah). Orang Dayak Meratus juga mempergunakan istilah yang berkonotasi dengan sungai dan laut untuk menyebut huma sebagai pulau (laut tempat berlayar, dan laut tempat memohon). Mereka menyebut kegiatan menanam padi sebagai kegiatan mengantarkan padi tulak balayar (pergi berlayar), dan kegiatan balian batandik (balian menari) dalam upacara ma'anyanggar Banua (upacara melindungi kampung dari marabahaya) disebut balian bakalaut (balian pergi ke laut).

Relasi 4: Sistem Keyakinan

Alasan kultural yang menunjukkan bahwa orang Dayak Meratus bukanlah “orang gunung” sebagaimana yang banyak disangkakan orang selama ini adalah sistem keyakinan.

Dalam hal sistem keyakinan, Noerid Haloei Radam mencatat bahwa di kalangan orang Dayak Meratus Bukit dikenal adanya tiga kelompok roh pemelihara kawasan pemukiman dan tempat tinggal, yaitu Siasia Banua, Bubuhan Aing, dan Kariau yang umumnya berkaitan dengan daerah perairan pantai yang sekarang dihuni oleh orang Banjar Hulu dan Banjar Kuala.

Hasil penelitian Noerid Haloei Radam menunjukkan bahwa hingga sekarang belum ditemukan folklore orang Dayak Meratus berupa mite, legenda, dan dongeng yang di dalamnya berisi petunjuk bahwa nenek moyang orang Dayak Meratus berasal dari daerah pegunungan tertentu. Justru sebaliknya, banyak sekali ditemukan folklore orang Meratus yang menurut hasil kajian/analisis Radam justru berisi petunjuk bahwa nenek moyang mereka berasal dari suatu dataran rendah di suatu muara sungai yang terletak di tepi laut.

Para tetuha orang Dayak Meratus memang mengatakan bahwa nenek moyang mereka dahulunya tinggal di kampung-kampung yang sekarang ini telah dihuni oleh orang Banjar. Kepindahan nenek moyang mereka ke gunung-gunung dilakukan dengan memudiki sungai-sungai guna menghindarkan diri dari

konflik sosial, politik, ekonomi, dan agama dengan orang Banjar yang lebih unggul posisi tawarnya.

Kolektif bahwa orang Dayak Meratus pada mulanya tinggal di dataran rendah juga didukung oleh Alfani Daud (1997) yang menyatakan bahwa orang Dayak Meratus yang ada sekarang kemungkinan adalah sisa-sisa dari imigran Melayu gelombang pertama (*proto melayu*). Mungkin sekali mereka semula tinggal di wilayah yang jauh lebih ke hilir, tetapi mereka kemudian terdesak oleh kelompok imigran yang datang belakangan (*deutro melayu*), dan seterusnya kelompok Banjar mendesak pula sehingga mereka akhir berada lebih jauh di pegunungan Meratus.

MERAJUT KEBERSAMAAN

Memasuki abad ke-21, intensitas konflik antaretnis, gejala disintegrasi bangsa dan separatisme bertambah meningkat di Indonesia. Makna persatuan dan kesatuan yang selama ini terjalin dengan mantap sepertinya semakin luntur. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang memburuk seiring dengan krisis multidimensi, semakin memperparah keadaan, sehingga masyarakat menjadi sensitif atau mudah dipropokasi.

Bercermin kepada konflik vertikal dan horisontal yang pernah terjadi di daerah lain, seperti di Sampit Kalimantan Tengah tahun 2001, maka benturan budaya lokal baik dengan institusional, personal atau mungkin juga antar klen harus diantisipasi.

Oleh karena itu, belajar kepada peristiwa konflik antar etnis di daerah lain, maka yang perlu dilakukan adalah membangun dan memantapkan kembali kerukunan dan rasa kebersamaan yang didasarkan kepada nilai-nilai budaya luhur yang dimiliki oleh masing-masing etnis.

Peran pemerintah yang menghargai potensi-potensi masyarakat lokal dan menghindari sikap yang hegemonik sangat diperlukan, karena timbulnya konflik sebenarnya tidak hanya begitu saja dihubungkan dengan kenyataan aspek pluralistik, melainkan juga sangat erat pula kaitannya dengan manajemen pengelolaan negara dan bangsa oleh penguasa (Patji, 2000).

Sehubungan dengan itu, dikaitkan dengan era otonomi daerah sekarang ini, dimana adanya kesempatan yang lebih luas untuk menggali dan mengangkat potensi budaya sendiri, maka

tema besar yang perlu digarap adalah mengangkat nilai-nilai luhur dari budaya masing-masing etnis ke permukaan.

Pemerintah Daerah perlu membangun kultur keragaman sebagai perekat kerukunan dan kebersamaan. Perbedaan harus dikaji, dipelajari dan diimplimentasikan dalam pendekatan psikososial, sehingga tidak ada kelompok etnis yang merasa tidak hidup berdampingan.

Pemerintah sebagai payung politik, harus bisa menangkap benang merahnya, dan mengelola kekuatan nilai budaya yang pluralistik tersebut sehingga dapat menjadi perekat kerukunan yang kokoh. Apa yang dapat ditangkap pemerintah mengenai pluralistik kebudayaan harus dikemas dengan menarik yang kemudian dilemparkan kembali ke masyarakat dalam bentuk paket fasilitator yang dapat memberikan kemungkinan masyarakat berinteraksi yang mengarah kepada terciptanya integrasi budaya.

Kaitannya dengan paket fasilitator, maka diperlukan adanya revitalisasi nilai-nilai budaya etnis Dayak Meratus dan etnis Banjar seperti adanya hubungan jiwa “kekerabatan” di antara keduanya yang dapat dijadikan “buhul pengikat” kerukunan dan kebersamaan antara kedua etnis.

Paket fasilitator dimaksud adalah perasaan *badangsanak* (bersaudara) yang bersumber kepada religisiotas kedua etnis yakni di kalangan orang Dayak Meratus dan orang Banjar Hulu khususnya dilegendakan bahwa kedua entiti etnis ini adalah keturunan dua kakak beradik; Intingan dan Dayuhan. Perbedaan keyakinan di antara keduanya dan salah satunya ingin tetap mempertahankan adat istiadat nenek moyang, tidak menghalangi persaudaraan (*badangsanak*) antar keduanya.

Rasa “*badangsanakan*” itu wajar untuk dikedepankan, mengingat adanya “benang merah” yang menunjukkan keterkaitan etnis Dayak Meratus dalam asal pembentukan masyarakat dan kebudayaan Banjar, sebagaimana ditunjukkan melalui Hipotesis Kaum Cerdik-Tempatan, disamping fakta-fakta kebahasaan seperti bahasa yang digunakan orang Dayak Meratus dan orang Banjar Hulu hanyalah dua intonasi (aksen) dari satu bahasa yakni Bahasa Banjar Hulu.

Selain itu, dalam hal sistem penguburan, apa yang dilakukan orang Dayak Meratus tidak berbeda dengan orang

Banjar umumnya yang beragama Islam, yakni dikubur langsung ke dalam tanah. Yang membedakan keduanya, hanyalah doa-doa yang digunakan sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Sistem penguburan yang dilakukan Dayak Meratus justru sangat berbeda dengan sistem penguburan sekunder yang ada pada etnis Dayak pada umumnya. Etnis Dayak Meratus, tidak mengenal “penguburan kedua” yakni upacara penghantaran roh dan wadah kubur seperti yang terdapat upacara *Tiwah* dengan wadah kubur bernama *sandong* (Dayak Ngaju), *Ijambe* dengan *tambak* (Dayak Maanyan), Marabia dengan *raung* (Dayak Maanyan Paju Sepuluh), dan Wara dengan *lungun* (Dayak Lawangan).

Adanya benang merah hubungan kekerabatan dan persamaan bahasa antar kedua etnis telah menunjukkan bahwa orang Bukit atau kini disebut Dayak Meratus dalam berbagai alasan kultural lebih dekat dengan etnis Banjar dibanding dengan Dayak. Hubungan itu dapat menjadi mekanisme yang handal sebagai perajut/perekat kerukunan dan kebersamaan dan bahkan dapat menjadi solusi sosial-religius bila terjadi saling sengketa antara kedua etnis.

Jika sekarang ini, orang Dayak Meratus lebih memposisikan diri mereka sebagai bagian dari “Dayak”, maka dengan mengacu kepada “hubungan kekerabatan” yang dimiliki keduanya, posisi itu dapat digeser dengan menjadikan mereka sebagai bagian dari “Banjar” yang mempunyai kekhasan tersendiri, seperti religi, adat istiadat, dan bertempat tinggal dipegunungan Meratus. Posisi “Banjar Meratus” di sini merupakan sebuah subetnis dari etnis Banjar, di samping subetnis Banjar Kuala, subetnis Banjar Hulu (Pahuluan), dan subetnis Banjar Batang Banyu. Sebagai subetnis dari etnis Banjar, maka mereka dapat dipanggil dengan sebutan “orang Banjar Meratus” atau “bubuhan Banjar Meratus”, seperti halnya panggilan “orang atau bubuhan “ untuk subetnis Banjar Hulu, Banjar Kuala, dan Banjar Batang Banyu.

Perubahan sebutan menjadi “Orang Banjar Meratus” atau untuk lebih netralnya “Orang Meratus” bukan tidak memungkinkan. Bukankah sebutan “Dayak” untuk menyebut kesatuan etnis yang dianggap asli Kalimantan dan dikotomikan dengan Melayu atau Banjar atas dasar prasangka keagamaan yang jelas sangat tidak tepat, kini sudah umum “diterima”?

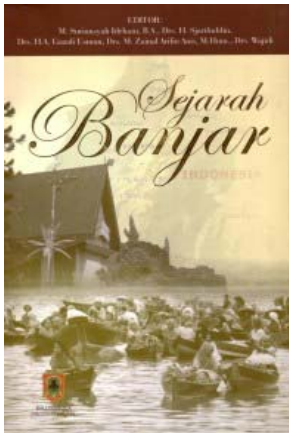
Oleh karena itu, dengan mengacu pada beberapa alasan yang telah dikemukakan di atas, dan dengan tidak menafikan pendapat yang menyatakan bahwa mitos hubungan genealogis itu sebenarnya lahir sebagai usaha atau strategi mereka untuk meraih kesejajaran/kesetaraan kultural maupun struktural dalam interaksi sosial yang lebih luas khususnya dengan etnis Banjar, maka jelaslah bahwa orang Bukit “lebih Banjar” dibanding Dayak.

Sebagai bagian dari Banjar, maka seyogyanya “hubungan genealogis” dengan subetnis lainnya dapat direvitalisasi sebagai pengikat buhul kebersamaan, pencegah konflik dan yang lebih penting lagi adalah untuk mengentaskan Orang Banjar Meratus dari keterbelakangan.

3

LEBIH SEPERTI SALAD BOWL (Lagi, Urang Banjar dalam Sejarah)

Banjarmasin Post edisi Sabtu 30 April 2011 memuat opini berjudul: Urang Banjar dalam Sejarah. Menurutnya definisi orang Banjar dalam buku Sejarah Banjar tidak memuaskan dan perlu diperbaiki. Sebenarnya, banyak pihak yang menyatakan hal yang sama. Sama halnya dengan ketidakpuasan dengan judul yang dipakai, karena lebih didasarkan kepada hal yang bersifat praksis dibanding tataran akademis. Meski demikian, keberadaan buku tersebut layak kita hargai sebagai pembuka jalan atau bahkan tantangan bagi yang mempersoalkannya untuk menghasilkan tulisan atau buku pembanding yang lebih baik.



Dalam pengantarnya, tim editor buku ini memang menyadari hal itu. Bahkan para pakar sejarah hingga saat ini masih belum menemukan kata sepakat tentang asal-usul dan identitas orang Banjar itu. Kendalanya antara lain karena sangat tidak memadainya catatan atau berita yang bernilai sejarah. Deskripsi latar belakang kesejarahan etnis Banjar lebih banyak berupa asumsi-asumsi yang didasarkan kepada data-data yang masih terbatas yang seringkali

merujuk kepada Hikayat Banjar. Meski demikian, di tengah keterbatasan data, maka teks sastra sejarah itu merupakan sumber yang dapat diperhitungkan.

Ada tiga model atau pendekatan yang biasa digunakan untuk memahami etnisitas, yaitu primordialisme,

instrumentalisme, dan konstruktivisme. Dalam kajian etnisitas, masing-masing pendekatan yang digunakan berimplikasi pada konstruksi identitasnya.

Menurut Max Weber, pendekatan primordialisme melihat etnisitas sebagai identitas primordial suatu kelompok dan menjadi kategori apriori yang menentukan batasan kelompok guna menjamin stabilitas dan tatanannya. Primordialisme melihat fenomena etnisitas dari kategori-kategori sosio-biologis seperti agama, budaya, dan sebagainya. Pendekatan instrumental lebih menaruh perhatian pada proses manipulasi dan mobilitas politik. Jika kondisi dan kepentingan berubah, maka berubah pula identitas etnis. Sedangkan pendekatan konstruktivisme muncul dengan cara mengombinasikan kedua model sebelumnya.

Primordialisme merupakan pendekatan yang banyak dipakai oleh banyak penulis termasuk yang terdapat dalam buku “Sejarah Banjar” dan buku “Urang Banjar dalam Sejarah”. Pendekatan primordialisme umumnya didasarkan pada argumen yang dibangun dalam Hikayat Banjar sebagaimana ditulis oleh J.J. Ras menjadi sebuah disertasi (1968) yang kemudian diikuti oleh para sejarawan dan budayawan lokal seperti M. Idwar Saleh, H.A. Gazali Usman, dan Alfani Daud.

Menurut pendekatan primordialisme, istilah Banjar berasal dari sebuah nama kerajaan Islam yang pada awalnya terletak di Banjarmasin. Dalam proses pembentukan Kerajaan Banjar maka Banjar Masih dengan pelabuhan perdagangannya yang disebut orang Ngaju sebagai Bandar Masih (Bandarnya orang Melayu) dijadikan sebagai ibukota Kerajaan Banjar yang kemudian menjadi kota Banjarmasin. Kata “Banjar” pada umumnya mengacu kepada pengertian wilayah kesultanan, yaitu wilayah kerajaan dimana penduduknya disebut orang Banjar, bangsa Banjar, dan rajanya disebut Raja (Sultan) Banjar. Ketika kesultanan jatuh ke dalam kekuasaan kolonial Belanda, mereka tidak lagi disebut sebagai suatu bangsa (nation) akan tetapi hanya sebagai Urang Banjar. Definisi H. A. Gazali Usman (1989) tentang urang Banjar tidaklah salah jika dikaitkan dengan buku beliau yang hanya membatasi kajian pada orang Banjar yang tinggal di Kalimantan Selatan.

Ada yang mengatakan orang Banjar bukan semata etnis melainkan terdiri dari berbagai unsur etnis (grup). Marko Mahin

(2004) mengatakan orang Banjar itu adalah bagaikan mangkok berisi sayur (salad bowl). Menurutnya, pada proses pembentukan orang Banjar tidak terjadi melting pot atau kualiti pedodolan yang menyeragamkan semua pengalaman agama dan budaya seseorang, melainkan lebih tepat menjadi salad bowl atau piring gado-gado. Dikatakan salad bowl, karena secara sosiologis orang Banjar itu merupakan percampuran berbagai etnik dan kebudayaan, seperti kebudayaan Melayu, Bukit, Ngaju, dan Maanyan. Akan tetapi, memang diakui bahwa unsur Melayu terlihat lebih dominan, sebagaimana tercermin antara lain dari faktor kebahasaan.

Atas dasar pola genealogis masyarakat Banjar, maka istilah Banjar bukan sekedar konsep etnis semata, namun juga konsep politis, sosiologis, dan agamis. Artinya, masyarakat Banjar adalah masyarakat Islam karena memang mayoritas mereka memeluk agama Islam. Identitas sebagai penganut agama Islam antara lain dilekatkan oleh Alfani Daud (1997) yang menyatakan bahwa Islam sejak lama sudah menjadi ciri masyarakat Banjar, sehingga kasus-kasus orang-orang Dayak yang memeluk agama Islam akan dikatakan sebagai “menjadi Banjar”. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Noerid Haloei Radam (1996) bahwa tampak luar, Islam menjadi identitas sosial orang Banjar.

Meski Islam menjadi identitas sosial orang Banjar, dalam penampakkannya corak keislaman orang Banjar mencakup pula konsepsi-konsepsi yang berasal dari imigran dan tradisi Melayu, dari sisa-sisa kepercayaan Hindu, dan sisa kepercayaan Dayak yang ikut membentuk suku dan kebudayaan Banjar. Sehubungan dengan itu, Marko Mahin (2004) pun berpendapat adanya adagium atau jargon “Banjar itu Islam, Islam itu Banjar” sulit dimengerti secara historis, melainkan sukar dipahami secara sosiologis. Padahal, bagaimanapun hingga kini Banjar itu tidak satu warna, melainkan bianglala. Dan tiap-tiap warna ke-Banjaran tentu memiliki hak hidupnya sendiri.

Lebih lanjut Marko Mahin (2004) menyatakan pendekatan primordialisme pada kasus “menjadi Banjar setelah memeluk agama Islam” mengandung sejumlah persoalan. Menurut pendekatan itu, seseorang menjadi Banjar adalah sudah dari sana (given) karena disetting oleh satu, beberapa, atau akumulasi faktor-faktor: (1) kewilayahan, (2) agama, (3) kebudayaan, (4)

bahasa, dan (5) organisasi sosial. Dalam setting keagamaan, maka yang muncul kemudian adalah jargon: “Karena Islam maka menjadi Banjar, dan karena Banjar maka Islam”. Barangkali seseorang menjadi Banjar, karena perkawinan atau memeluk agama Islam hanya bersifat cultur group semata, bukan menjadi etnik Banjar. Atau jika meminjam pendapat Irfan Noor Laily Mansyur (2004) Islam merupakan “universum simbolik” dari orang Banjar.

Terlepas dari berbagai pendapat dan pendekatan yang digunakan dalam merekonstruksi asal-usul etnis Banjar, maka betapa seseorang Dayak dapat “menjadi Banjar” karena kawin dengan orang Banjar, atau memeluk agama Islam, ataupun etnis lain yang datang dan tinggal lama di Kalimantan Selatan dan fasih berbahasa Banjar sehingga menyatakan diri sebagai orang Banjar, maka hal itu menunjukkan bahwa kebudayaan dalam hal ini agama, pranata sosial, dan bahasa tidak hanya dapat digunakan sebagai alat untuk memahami dan merekonstruksi asal-usul etnis, melainkan juga dapat dimanfaatkan untuk beradaptasi bahkan memanipulasi lingkungan sosial dan budaya masyarakat.

4

PERAN SITUS SEJARAH DI KALIMANTAN SELATAN SEBAGAI PEREKAT KEINDONESIAAN

Dalam pembukaan Lawatan Sejarah Nasional V Agustus 2007 di Gedung Sapta Pesona Jakarta, Mendiknas Prof. Dr. Bambang Sudibyo mengatakan: "...Lawatan Sejarah Nasional merupakan metode baru bagi pembelajaran sejarah yang efektif". Dikatakan efektif, karena jika dalam PBM di kelas, guru dan para siswa lebih banyak menggunakan buku-buku sejarah, dan bahkan disuruh menghafal peristiwa, nama tokoh dan tahun sehingga pelajaran sejarah kadang terasa kering dan membosankan, maka dalam Lawatan Sejarah Nasional (Lasenas) maupun Lawatan Sejarah Daerah (Laseda) para siswa dapat langsung mengunjungi tempat peristiwa berlangsung, berdialog dengan tokoh atau pelaku sejarah, atau sejarawan.

Dengan adanya kunjungan ke situs sejarah menjadikan proses pembelajaran sejarah mengasyikkan sekaligus pemberian informasi dan pemindahan nilai-nilai kesejarahan (*transfer of value*) kepada para siswa dapat berlangsung efektif. Metode pembelajaran seperti itulah yang akan dilakukan pada kegiatan kegiatan Lasenas VIII di Kalsel 2010. Atau Laseda Kalsel 2011. Sesuai tema Laseda Kalsel 2011, maka para siswa diajak mengunjungi beberapa situs sejarah yang ada di Kalimantan Selatan, khususnya di kota Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar. Melalui kunjungan itu diharapkan dapat dirajut simpul-simpul keindonesiaan di Tanah Banjar.

Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa kegiatan mengunjungi situs-situs sejarah ini disebut lawatan? Seolah kita melawat ke suatu tempat yang jauh atau asing. Mengapa tidak disebut saja, misalnya, kunjungan. Pilihan kata "Lawatan" bukan tanpa dasar. Bukankah sebagian besar situs sejarah yang ada di Kalimantan Selatan (apalagi situs sejarah yang ada di daerah

lainnya di Indonesia) merupakan hal asing bagi sebagian orang termasuk para siswa. Meski sebagian lokasi situs sejarah itu tidak begitu jauh dari tempat tinggal mereka.

Oleh karena situs sejarah adalah hal yang asing, maka kegiatan mengunjungi situs dalam kegiatan ini disebut “lawatan” karena memang dalam kegiatan ini para siswa melawat situs sejarah yang selama ini mungkin hanya pernah dengar namanya, namun tak pernah atau sangat jarang mengunjunginya.

Apakah kita hanya sekedar berkunjung? Tentu saja tidak. Kita tidak hanya memperoleh gambaran fisik dan informasi tentang peristiwa sejarah, namun yang terpenting adalah mendapatkan nilai-nilai yang terkandung dalam situs sejarah. Utamanya adalah peran situs sebagai perekat keindonesiaan kita.

Apa yang dimaksud situs sejarah? Situs sejarah adalah lokasi atau daerah dimana didapati benda-benda sejarah dan purbakala. Atau suatu kawasan yang diduga mengandung benda bersejarah juga dapat disebut situs sejarah. Benda bersejarah itu misalnya: istana, makam para raja, makam para penyebar Islam, makam pejuang kemerdekaan, benteng, masjid, rumah bersejarah, dan lain sebagainya.

Situs sejarah dengan benda-benda bersejarah yang ada di dalamnya merupakan “jejak sejarah” atau jejak peristiwa masa lampau. Sebagai jejak sejarah, dalam situs sejarah dapat digali peristiwa yang terjadi di masa lampau. Oleh karena itu, jejak sejarah merupakan “sumber sejarah” yang dapat digunakan untuk merekonstruksi peristiwa sejarah. Dan, lebih dari itu, dari situs sejarah juga dapat digali simpul-simpul sebagai perekat keindonesiaan kita.

Lawatan Sejarah: Mengapa Diperlukan?

Sebagai pelaku sejarah manusia bergerak di antara ruang dan waktu. Ruang menunjukkan tempat sejarah terjadi (lokal, nasional, global). Sementara dimensi waktu adalah sejarah sebagai peristiwa yang sudah berlalu. Belajar sejarah pada hakikatnya adalah belajar tempat sejarah terjadi dengan dimensi waktu; masa lampau, sekarang, dan masa depan. Kita dapat mengambil pelajaran dari suatu peristiwa sejarah untuk menatap masa depan yang lebih baik.

Sejarah mempunyai peran dalam pembentukan watak dan karakter bangsa, kualitas manusia dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Melalui pendidikan di sekolah, sejarah dapat diajarkan kepada para siswa sehingga mereka dapat memahami proses terbentuknya bangsa dan negara Indonesia. Melalui pengajaran sejarah, diharapkan dapat ditanamkan nilai-nilai atau sikap nasionalisme dan patriotisme, rela berkorban, jujur, bekerja keras, toleran kepada sesama, dan lain sebagainya.

Akan tetapi, terkadang kita belajar sejarah dengan dimensi ruang yang luas dan dimensi waktu yang panjang dengan sumber yang minim, sehingga pembelajaran sejarah menjadi kegiatan yang terkadang membosankan. Hal itu terjadi, karena para siswa dijejali dengan hapalan tahun, pelaku dan tempat peristiwa tanpa diberi pemahaman tentang mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi, sehingga sejarah yang diajarkan terasa kering tanpa makna.

Seharusnya, sejarah yang diajarkan selain untuk memberikan kemampuan kognitif (pengetahuan) juga memberikan kemampuan afektif yakni berupa efek pengiring terhadap para siswa. Maksudnya dengan belajar sejarah, siswa diharapkan dapat memetik hikmah dari peristiwa yang terjadi di masa lampau, dan mengaktualisasikannya untuk kepentingan masa kini dan masa yang akan datang.

Beberapa pakar pendidikan menyatakan bahwa pengajaran sejarah sekarang ini masih jauh dari harapan untuk memungkinkan anak didik melihat relevansinya dengan kehidupan masa kini dan masa depan. Sejarah pembentukan NKRI ini mungkin hanya dimaknai oleh yang tua renta, pejuang perintis dan veteran perang kemerdekaan yang kini sedikit tersisa. Sementara bagi kalangan muda, sejarah tak ubahnya urutan tanggal dan peristiwa, menghormat bendera, atau untuk sekadar diperingati sebagai momen seremonial. Sedangkan makna hakiki dari peristiwanya itu sendiri jarang diungkap atau bahkan sama sekali tak disentuh.

Hal yang seperti itu barangkali terjadi di berbagai lapisan masyarakat Kalsel, dan juga di daerah lainnya di Indonesia. Banyak diantaranya yang lebih mengetahui sejarah nasional dibanding sejarah lokal. Di Kalsel, bahkan ada yang menghubungkan peristiwa Proklamasi Gubernur Tentara ALRI

Divisi IV Pertahanan Kalimantan 17 Mei 1949 dengan Stadion Olahraga 17 Mei di Banjarmasin. Lebih ironi lagi, ketika masyarakat lebih mengetahui siapa Jenderal Ahmad Yani atau Pangeran Diponegoro dibanding Brigjend H. Hassan Basry atau Pangeran Antasari (Pahlawan Nasional dari Kalsel).

Apriori terhadap sejarah lokal (termasuk situs sejarah yang ada di daerah) sudah saatnya dihilangkan, karena sudah banyak kajian yang menunjukkan bahwa sejarah lokal bahkan yang sangat lokal sekalipun, sesungguhnya mempunyai kontribusi terhadap penanaman nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme. Misalnya, Amuk Hantarukung yang terjadi di tahun 1899 di Desa Hantarukung, Kandangan Kalsel. Peristiwa ini merupakan peristiwa lokal, namun mempunyai esensi yang tak jauh berbeda dengan peristiwa sejenis yang fenomenal di Nusantara di penghujung abad ke-19. Peristiwa tersebut mempunyai nilai-nilai perjuangan sebagai embrio dari munculnya sikap nasionalisme dan patriotisme masyarakat lokal.

Harapan baru muncul ketika pemerintah memberlakukan Kurikulum KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), yang mana dengan KTSP diharapkan porsi jam mata pelajaran sejarah (termasuk sejarah lokal) lebih besar dan strategi pembelajarannya lebih menarik karena bisa dihubungkan dengan sejarah yang terjadi di daerahnya sendiri.

Oleh karena itu, dengan adanya KTSP, seyogyanyalah pengajaran sejarah akan lebih menarik dan membumi karena peserta didik dapat diajarkan sejarah lokal atau dapat secara langsung “melawat” atau menapaktilasi situs-situs peninggalan sejarah dan purbakala di sekitar tempat ia berada. Seyogyanya lawatan ke situs sejarah di Kalsel tidak berhenti setelah Laseda berakhir, melainkan nantinya dapat diteruskan sebagai bagian dari PBM di luar kelas. Dengan demikian, diharapkan tidak terjadi lagi kesenjangan antara pengetahuan para siswa terhadap sejarah nasional dengan sejarah lokal. Pelajaran sejarah akan lebih menarik karena siswa tidak hanya diajarkan sejarah nasional, namun juga dapat diajarkan sejarah yang terjadi di daerahnya sendiri dengan berkunjung ke situs-situs sejarah, berdialog dengan pelaku sejarah, atau dengan mempelajari buku-buku sejarah lokal.

Peran Situs Sejarah Sebagai Perekat Keindonesiaan

Seperti halnya provinsi lainnya di Indonesia, Kalimantan Selatan mempunyai bentangan sejarah yang penuh dengan berbagai peristiwa berskala besar maupun kecil. Dari periode prasejarah, klasik, Islam, Kolonial, sampai periode Kontemporer. Berbagai peristiwa antara lain terekam pada berbagai situs sejarah, seperti Komplek Makam Sultan Suriansyah, Masjid Sultan Suriansyah, Makam Syekh Jamaludin (Kubah Surgi Mufti), Makam Syekh Abdussamad al-Banjari, Komplek Makam Pahlawan Nasional Pangeran Antasari, Makam Panglima Wangkang, Rumah Bulat (Joglo) di Marabahan, Makam Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, Makam Syekh Muhammad Nafis al-Banjari, Rumah Banjar di Teluk Selong, Makam Syekh Abdul Hamid Abulung, Benteng Tabanio, Benteng Tundakan, Benteng Gunung Madang, Makam Sultan Adam al-Wasik Billah, Candi Agung Amuntai, Candi Laras dan situs Pematang Bata, Makam Datu Sanggul, Masjid Al Mukarromah Banua Halat, Makam Haji Saaduddin Taniran, Makam Amuk Hantarukung, Rumah Perjuangan Durian Rabung, Rumah Perjuangan Karang Jawa, Masjid Pusaka Banua Lawas, Makam Pahlawan Nasional Brigjen H. Hassan Basry, Monumen ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan di Paku Alam Sungai Tabuk, Monumen 17 Mei 1949 di Niih, dan banyak lagi.

Meski berbagai situs sejarah tersebut mempunyai kaitan dengan sejarah lokal, sesungguhnya ia juga mengandung nilai-nilai sejarah nasional. Dari berbagai situs sejarah itu dapat ditarik nilai-nilai yang dapat menjadi perekat keindonesiaan kita.

Sejarawan Australia, Robert Cribb, pernah mengatakan: “memandang peta rasanya cukup untuk memberi kesan bahwa tidak mungkin adanya negara Indonesia”. Kesan itu muncul karena Indonesia terdiri dari 13.000–17.000 lebih pulau besar dan kecil, yang dipisahkan oleh laut dan selat yang terbentang dari barat ke timur sepanjang lebih dari 5.000 km (setara jarak Moskow ke London) dengan wilayah yurisdiksi $\pm$ 5,9 juta km², garis pantai sepanjang 81.000 km, dan didiami oleh 360 suku bangsa dan memiliki lebih dari 300 dialek bahasa.

Akan tetapi, ternyata Indonesia ada dan tetap bersatu hingga detik ini. Sejak 28 Oktober 1928 berbagai perkumpulan kaum muda dari berbagai suku di Hindia Belanda mengikrarkan “Satu Nusa, Satu Bangsa, dan satu Bahasa: Indonesia”. Dan

perekat keindonesiaan itu yang juga dinyatakan oleh para pengikrar “Sumpah Pemuda 1928” adalah faktor sejarah.

Dalam perspektif politik, Indonesia bisa bersatu sebagai suatu bangsa dan negara karena memiliki kesamaan “nasib” dan “sejarah”, yakni sama-sama dijajah dan menderita oleh penjajah yang sama, terutama oleh penjajahan Belanda. Negara dan bangsa Indonesia lahir karena adanya faktor sejarah. Oleh karena itu, sejarah mempunyai peran dalam pembentukan keindonesiaan kita.

Wadah persatuan, wilayah tempat bangsa Indonesia kini berada, dahulunya adalah wilayah Hindia Belanda sebagai hasil politik kolonial yang dipaksakan kepada daerah/pulau-pulau yang dikuasainya. Pemaksaan itu, di satu sisi telah menimbulkan penderitaan, tetapi akibat dari itu telah menimbulkan kesadaran senasib dan sepenanggungan sebagai sebuah bangsa.

Indonesia adalah sebuah persatuan politik, bukan persatuan yang didasarkan faktor keturunan atau kesamaan etnis atau primordialisme sebagaimana dilansir oleh Karl Hausofer dalam Teori Persatuan Darah-dan-Tanah (*Blut-und-Boden Theorie*). Karena alasan itulah mengapa etnis Papua yang berasal dari rumpun Melanesoid dapat bersatu dengan etnis lainnya di Indonesia. Sebaliknya yang terjadi di Timor Timur, meski secara etnisitas mempunyai persamaan dengan penduduk Timor Barat (Provinsi Nusa Tenggara Timur), dorongan untuk melepaskan diri dari NKRI lebih mengakar karena mempunyai nasib dan sejarah di bawah penjajahan Portugis.

Sebelum munculnya ikatan politis, maka perekat keindonesiaan kita dapat dilihat dalam perspektif sosial budaya. Jauh sebelum kedatangan bangsa-bangsa Barat atau penjajahan Belanda di kepulauan Nusantara, antar etnis di Nusantara telah melakukan interaksi di antara mereka, baik melalui jalur pelayaran dan perdagangan, penyebaran agama, serta penyebaran (diaspora) suku-suku bangsa di Nusantara. Pelabuhan atau Bandar merupakan tempat berinteraksinya para pedagang, penyebar agama dari berbagai etnis di Nusantara. Dalam berkomunikasi, mereka menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa *lingua franca*.

Sebelum Kesultanan Banjarmasin berdiri tahun 1526 dengan bantuan Kesultanan Demak, antara orang-orang Banjar

dengan etnis lainnya di Nusantara juga telah melakukan kontak budaya, perdagangan, dan bahkan juga diwarnai dengan hubungan politik dan militer. Jejak itu dapat ditelusuri antara lain pada situs Candi Agung, Candi Laras, Makam dan Masjid Sultan Suriansyah. Dalam hikayat Banjar disebutkan bahwa saudagar Mpu Jatmika dari Keling (suatu daerah di Kediri utara, Jawa Timur) tiba di Pulau Hujung Tanah (Kalimantan) dan kemudian mendirikan candi dan Kerajaan Negara Dipa.

Raja Negara Dipa, Pangeran Surianata (suami Puteri Junjung Buih), menurut Hikayat Banjar berasal dari Majapahit. Menurut silsilah, mereka kemudian menurunkan raja-raja di kemudian hari (Kerajaan Negara Daha dan Kerajaan Banjar). Bahkan, hubungan dengan kerajaan-kerajaan di Jawa, mengakibatkan nama-nama jabatan, struktur pemerintahan, bahasa, dan sebagian adat istiadat yang berlaku di Kerajaan Negara Dipa, Negara Daha, dan Banjar mempunyai beberapa kesamaan/mendapat pengaruh dari kerajaan di Jawa. Hubungan sejarah itu merupakan simpul-simpul yang dapat dijadikan sebagai perekat keindonesiaan.

Dakwah islamiyah berperan sebagai perekat keindonesiaan. Simpul-simpulnya dapat ditelusuri pada situs makam tokoh ulama Banjar seperti makam Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan makam Syekh Muhammad Nafis. Kedua ulama Banjar itu dikenal dengan karya-karyanya menjadi rujukan di Nusantara, seperti Kitab *Sabilal Muhtadin* dan 12 karya lainnya (karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari), dan *Ad-Durrun Nafis* (karya Syekh Muhammad Nafis al-Banjari).

Ketika Perang Banjar meletus tahun 1859 yang pada hakikatnya merupakan perlawanan rakyat Banjar terhadap usaha-usaha Belanda yang ingin menguasai Kesultanan Banjar, maka perang ini pula dapat menyatukan bangsa dari kalangan etnis Banjar dan Dayak untuk bersama-sama melawan Belanda. Oleh karena itu, selain pejuang dari kalangan etnis Banjar seperti antara lain Pangeran Antasari, Pangeran Hidayatullah (dibuang Belanda ke Cianjur), Demang Lehman, Tumenggung Jalil, Gusti Muhammad Seman, dan Gusti Zaleha, dikenal pula pejuang perang Banjar dari kalangan etnis Dayak antara lain Tumenggung Surapati, Demang Kendet, Panglima Wangkang, Panglima Batur, dan Bulan Jihat. Hubungan antar etnis Banjar-Dayak untuk

bersama-sama melawan penjajah Belanda merupakan bagian dari simpul keindonesiaan, dan simpul-simpul itu dapat dibutiri dari berbagai situs sejarah Perang Banjar seperti Makam-makam Pangeran Antasari, Panglima Batur, dan Gusti Ratu Zaleha (di Banjarmasin), Gusti Muhammad Seman (di Muara Teweh), Pangeran Hidayatullah (di Cianjur-Jawa Barat), benteng-benteng Gunung Madang (HSS), Tundakan (Awayan-Balangan), Tabanio (Tabanio-Tanah Laut), dan sebagainya.

Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, terjadi eksodus besar-besaran orang Banjar ke luar Kalimantan Selatan. Kalau sebelumnya mereka madam untuk berdagang antar pulau maupun dakwah Islamiyah seperti yang dilakoni anak cucu Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, kini mereka *madam* dan *tajun* karena alasan ekonomi dan politik seperti untuk mencari penghidupan yang lebih baik, dan juga untuk menghindari (terutama dari kalangan pejuang Perang Banjar) dari serangan Belanda. Mereka berlayar dan kemudian menetap di berbagai tempat di Nusantara, seperti di Tembilahan, Sapat, Kuala Tungkal, Deli Serdang, Lombok, Johor, Selangor, dan tempat-tempat lainnya, sehingga sekarang di daerah-daerah tersebut terdapat kampung komunitas Banjar. Interaksi mereka dengan etnis lain di tempat baru itu merupakan bagian dari simpul-simpul keindonesiaan.

Pada saat Indonesia masih bernama Hindia Belanda, telah terjadi kontak antar suku bangsa di Nusantara. Banyak tokoh-tokoh pergerakan dari daerah lain di Nusantara (Jawa, Sumatera, Maluku, Flores) yang berkunjung, beraktivitas untuk menumbuhkan benih-benih keindonesiaan di Kalimantan Selatan (*Zuider Afdeling van Borneo*), misalnya, H.O.S Cokroaminoto (Sarekat Islam), Ki Hajar Dewantara (Perguruan Taman Siswa), Muhammad Husni Thamrin, R. Sukarjo Wiryopranoto, R. Sunyoto (Parindra/anggota Volksraad), dr. A.K. Gani (Gerindo) pernah berkunjung ke Kalsel. Yang lainnya seperti A.M. Sangaji, Maraja Sayuthi Lubis, dr. Sumarno, dr. Susilo (adik dr. Sutomo), dr. Suranto, Mr. Rusbandi, Marjono, Sunaryo, Raden Imam Subekti, Johannes Baker, Adi Martono, Maisyir Thaib, Bey Arifin, dan Khatib Syarbaini, dr. D.S. Diapari, Aidan Sinaga, pernah menjadi tokoh pergerakan partai atau menjadi guru-guru sekolah kebangsaan dan perguruan Islam di Kalimantan Selatan.

Sebaliknya, banyak orang-orang Banjar di Kalsel yang karena pendidikan dan profesinya sebagai pedagang sering melakukan aktivitas pulang pergi Jawa-Sumatera-Sulawesi sehingga ketika kembali ke Kalimantan Selatan mereka turut menyebarkan benih-benih kebangsaan seperti H. Matarip (H. Muhammad Arip Bakumpai), Babu (Housman Babu), Bondan (Amir Hasan Bondan), Horman (Mohammad Horman alias Ajun Horman), juga Anang Acil (Jaksa Anang Acil Kesuma Wira Negara), dan Merah Johansyah.

Selain itu, ada beberapa tokoh pejuang kemerdekaan yang dibuang atau dipenjarakan di luar Kalsel seperti Pangeran Hidayatullah (tokoh Perang Banjar) beserta pengikutnya yang dibuang ke Cianjur (Jawa Barat), tokoh pergerakan seperti H. Ahmad Barmawi Thaib (tokoh Parindra cabang Kandungan), H. Amir dan Edwar Sandan (tokoh Parindra cabang Amuntai) yang dikirim ke penjara Sukamiskin, Jawa Barat, dan banyak pejuang masa revolusi fisik (1945-1949) yang dipenjarakan ke Nusakambangan.

Adanya tokoh-tokoh pergerakan nasional berkiprah di Kalsel dan adanya tindakan pemerintah kolonial mengasingkan tokoh-tokoh pejuang Kalsel merupakan bagian dari simpul-simpul keindonesiaan. Karena mereka dapat saling berinteraksi dengan masyarakat setempat sehingga menimbulkan perasaan senasib dan tujuan yang sama untuk meraih kemerdekaan.

Pada masa perjuangan menegakkan kemerdekaan Indonesia di Kalimantan Selatan 1945-1949, baik yang berlangsung di jalur politik maupun militer, banyak peristiwa dan tokoh yang dapat dijadikan perekat atau simpul-simpul keindonesiaan. Di jalur perjuangan politik, Gubernur Kalimantan Ir. Pangeran Mohammad Noor berkantor di Yogyakarta, dari sini beliau membentuk pasukan MN1001 dan mengkoordinir ekspedisi lintas laut dari Jawa ke Kalimantan. Tokoh-tokoh Serikat Kerakyatan Indonesia (SKI) seperti Aidan Sinaga, dr. D.S. Diapari (keduanya putera Batak) turut pula memperjuangkan agar Kalimantan Selatan tetap dalam Republik Indonesia. Di jalur perjuangan gerilya, dikenal nama-nama seperti P. Arya (gelar Munir Sutan Tumenggung, Maxim le Miaty) asal Minangkabau, Made Kawis (asal Bali), dan lainnya turut berjuang bahu membahu mengangkat senjata dengan pejuang lainnya.

Hubungan antara pulau Jawa dan Kalimantan Selatan pada masa perjuangan gerilya sangatlah intens, karena besarnya peran orang-orang Kalimantan yang tergabung dalam berbagai organisasi kelaskaran di Jawa yang kembali ke daerah asalnya melalui ekspedisi lintas laut setelah Agustus 1945.

Salah satu pelaku ekspedisi adalah Hassan Basry, seorang guru agama Islam di Ponorogo asal Kandangan yang kemudian hari membentuk Laskar Saifullah, Banteng Indonesia, dan menjadi komandan tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan. Diakhir 1948 dan awal 1949, Hassan Basry berhasil memimpin perjuangan bersenjata melawan Belanda, sehingga kemudian pada tanggal 17 Mei 1949, Hassan Basry atas nama rakyat Indonesia di Kalimantan Selatan dan Gubernur Tentara memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Gubernur Tentara ALRI yang melingkungi seluruh daerah Kalimantan Selatan menjadi bagian dari Republik Indonesia. Proklamasi 17 Mei merupakan perekat keindonesiaan kita karena ia merupakan penegasan akan kesetiaan rakyat Kalimantan Selatan terhadap Republik Indonesia. Dan jejak-jejak Proklamasi 17 Mei 1949 itu dapat ditelusuri pada beberapa situs sejarah seperti berbagai makam pahlawan, Rumah Perjuangan di desa Durian Rabung, Tugu Proklamasi 17 Mei di Niih, dan Monumen Proklamasi 17 Mei di Mandapai, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Penutup

Dari paparan di atas dapat ditegaskan kembali bahwa situs sejarah di Kalimantan Selatan dapat berperan sebagai perekat keindonesiaan. Peran itu dapat dilihat dari adanya simpul-simpul berupa hubungan atau interaksi antar etnis atau penduduk di wilayah di Nusantara baik di bidang ekonomi-perdagangan, sosial, budaya, dan politik sebagaimana yang tergambar dari sejarah yang melatarbelakangi keberadaan situs-situs tersebut.

Hubungan antar etnis berlangsung jauh sebelum adanya penjajahan Barat di Nusantara, dan semakin mengkristal ketika penjajah Belanda memaksakan kesatuan berbagai etnis di Nusantara ke dalam negara Hindia Belanda. Pemaksaan itu, di satu sisi telah menimbulkan penderitaan, tetapi akibat dari itu telah menimbulkan kesadaran senasib dan sepenanggungan sebagai sebuah bangsa.

Perasaan senasib sepenanggungan yang dilandasi oleh persamaan sejarah sebagai sesama rakyat terjajah, lambat laun memunculkan benih-benih nasionalisme dan patriotisme. Ikrar Sumpah Pemuda 1928 dilandasi oleh persamaan sejarah. Berbagai organisasi pergerakan di Kalimantan Selatan turut muncul. Mulanya bersifat bersifat lokal dan primordial, namun kemudian tumbuh menjadi organisasi yang berlingkup regional maupun nasional yang bergerak di bidang politik untuk mencapai kemerdekaan.

Penyebaran dan interaksi para tokoh pergerakan nasional dan daerah yang terjadi pada waktu itu, semakin menumbuhkan rasa kebersamaan atau solidaritas antar etnis di Hindia Belanda untuk bersama-sama berjuang meraih kemerdekaan yang kemudian menjadi modal dalam merebut dan mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Berbagai peristiwa sejarah yang menunjukkan proses kepada terbentuknya bangsa dan Negara Indonesia merupakan simpul-simpul perekat keindonesiaan yang dapat digali di berbagai situs-situs sejarah di Kalimantan Selatan. Meski situs-situs sejarah tersebut merupakan jejak dari sejarah lokal, akan tetapi sesungguhnya ia juga mempunyai nilai-nilai yang dapat dibutiri sebagai simpul perekat keindonesiaan kita.

A.A. HAMIDHAN DAN DETIK-DETIK YANG MENEGANGKAN ITU....

Tanggal 17 Agustus merupakan hari yang “keramat” bagi bangsa Indonesia, karena tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 tahun Masehi, atau 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang, atau 17 Ramadan 1365 tahun Hijriah dibacakan teks proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Ir. Soekarno didampingi Drs. Mohammad Hatta atas nama bangsa Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur 56, Cikini, Jakarta Pusat.

Banyak cerita dengan berbagai versi yang termuat dalam buku-buku sejarah dan memoar pelaku sejarah, sehingga nama-nama seperti Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. Ahmad Soebardjo, B.M. Diah, Sajuti Melik, Adam Malik, Soediro, Sjahrir, Sukarni, Soewirjo, Wilopo, Abdul Gaffar Pringgogidgo, SK Trimurti, dan banyak lagi yang lainnya dikenal sebagai tokoh yang berjasa dalam peristiwa yang bersejarah itu.

Akan tetapi, barangkali tidak banyak yang mengetahui bahwa seorang putera Kalimantan Selatan kelahiran Rantau, 25 Februari 1909, bernama Anang Abdul (A.A) Hamidhan turut menghadiri malam “penggodokan” naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di rumah Laksamana Maeda tanggal 16 Agustus 1945 yang sangat menegangkan itu, dan hadir pula pada Sidang Pleno PPKI tanggal 18 dan 19 Agustus 1945 yang mengesahkan UUD 1945 dan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI, Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta. Keterlibatannya itu dikarenakan ia merupakan satu-satunya utusan Kalimantan dalam keanggotaan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia)

Enam puluh dua tahun yang lalu, tepatnya tanggal 14 Agustus 1945, A.A. Hamidhan yang kala itu menjabat Pemimpin Redaksi Harian Borneo Simboen di Banjarmasin merangkap sebagai anggota *Syu Kai Gi-in* (semacam DPRD Provinsi Kalimantan) diberangkatkan oleh pemerintah Angkatan Laut

Jepang (*Kaigun Minseifu*) dari Banjarmasin menuju Jakarta dengan pesawat terbang untuk memenuhi undangan PPKI.

PPKI yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan yang dijanjikan Pemerintah Tentara Pendudukan Jepang beranggotakan 21 orang termasuk A.A. Hamidhan yang mewakili Kalimantan. A.A. Hamidhan beserta anggota PPKI lainnya dari daerah Pemerintahan Angkatan Laut Jepang (*Kaigun Minseifu*) dan anggota dari luar Jakarta ditampung di Hotel Yamato (Hotel Des Indes).

Setelah menghadiri rapat pertama PPKI tanggal 15 Agustus 1945 di gedung Pejambon, maka sorenya, A.A. Hamidhan beserta anggota PPKI lainnya “dipaksa” dan dibawa para pemuda militan ke asrama mahasiswa di Prapatan untuk mendengarkan ceramah Sutan Syahrir tentang kemerdekaan Indonesia. Dalam ceramahnya Syahrir menerangkan bahwa berdasarkan siaran radio BBC, Amerika, dan Australia, tentara Jepang sudah kalah perang dan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Oleh karena itu kita tidak perlu menerima hadiah kemerdekaan dari pemerintah Jepang. Kemerdekaan Indonesia harus kita bentuk sendiri dan kita umumkan ke seluruh dunia.

Setelah jauh malam, rombongan anggota PPKI diantarkan kembali oleh para pemuda ke Hotel Yamato namun namun di antara mereka banyak yang tak dapat memicingkan mata sehingga tak terasa malam pun berganti siang, dan tanggal 16 Agustus pun berlalu di tengah suasana tegang di antara anggota PPKI itu.

Menjelang tengah malam, para anggota PPKI kembali dijemput oleh para pemuda ke tempat kediaman Laksamana Maeda di Jalan Oranye Boulevard untuk keperluan kemerdekaan Indonesia. Salah seorang pemuda yang menjemput itu adalah Adam Malik yang bersama-sama pemuda Sukarni juga termasuk anggota kelompok pemuda yang “menculik” Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengasdengklok dan memaksa kedua tokoh itu agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Kesaksian A.A. Hamidhan

Dalam memoarnya “Mengenang Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Indonesia” A.A. Hamidhan menceritakan —tentunya menurut sudut pandang sebagaimana yang ia rasakan dan ia lihat

saat itu. Menurut A.A. Hamidhan bahwa keberadaan mereka di rumah Laksamana Maeda bukanlah merupakan sidang PPKI, akan tetapi lebih tepat kalau dikatakan berkumpul untuk mengetahui apakah yang menjadi kelanjutan dari hasil penculikan yang dilakukan para pemuda terhadap Bung Karno dan Bung Hatta. Memang keadaan waktu itu agak tegang, di sana sini hanya kedengaran bisik-bisik dalam ruangan dengan lampu-lampu ditutup kain hitam, maktum masih dalam keadaan perang. Di ruangan itu hanya ada kumpulan hadirin yang mengelilingi dua buah meja yang letaknya berjauhan, sehingga sukar untuk saling mengenali siapa yang hadir, di samping ada yang mengantuk maktum baru dibangunkan dari tidur.

Di dekat meja yang kami kelilingi, ada empat atau lima orang pemuda duduk di lantai yang sukar untuk dikenali, karena keadaan ruangan gelap. Beberapa kali kami silakan mereka untuk mengambil tempat di kursi yang masih kosong, akan tetapi mereka menolak.

Sementara waktu terus berjalan dan diiringi dengan pertanyaan dalam hati, apakah yang akan terjadi. Menjelang jam dua dinihari, terdengarlah deru sebuah mobil memasuki pekarangan gedung tempat kami berkumpul. Dari dalamnya tampak turun Bung Karno, Bung Hatta, dan Mr. Subardjo, diiringi oleh seorang pejabat Jepang. Mereka langsung menuju lantai atas untuk berunding dengan Laksamana Maeda tanpa memberikan keterangan sedikit juapun kepada kami.

Sudah barang tentu suasana bertambah tegang dan menimbulkan berbagai pertanyaan. Bisik berbisik pun bertambah ramai.

Sekitar setengah jam kemudian, mereka yang kami harapkan itu turun dari lantai atas ke ruang kami berkumpul, dan mengambil tempat di keliling meja kami. Hanya pejabat Jepang yang tidak turut turun ke bawah.

Tampak Bung Karno memegang sebuah buku nota bertuliskan susunan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Semua hadirin berkumpul di meja dimana Bung Karno dan Bung Hatta duduk. Dengan suara seret tetapi cukup jelas Bung Karno mulai berbicara sebagai pembuka sidang, dengan keterangan bahwa di ruangan atas tadi bersama-sama Bung Hatta telah disusun

naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang kemudian dibacakan dengan berdiri.

Kepada hadirin ditanyakan apakah kalian semua menyetujui? Dengan serempak hadirin mengatakan setuju. Sekali lagi Bung Karno bertanya: “Benar-benarkah saudara semuanya setuju?” Dengan suara gemuruh hadirin semuanya menyahunt “setuju!”.

“Kalau saudara semuanya setuju, apakah saudara-saudara bersedia untuk turut menandatangani naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ini?”. Disambut dengan serempak “sedia!”.

Tiba-tiba di antara pemuda yang tadi duduk-duduk di lantai berdiri dan berkata: “Apakah boleh kami meminjam sebentar naskah Proklamasi?”. Sepertinya Bung Karno sudah mengenali si pemohon itu, karena tanpa berkata sedikit juapun, naskah tersebut diserahkan. Semua pemuda tadi terus pergi dengan menumpang sebuah mobil, entah kemana perginya. Sementara itu Bung Karno berkata kepada hadirin bahwa naskah Proklamasi Indonesia Merdeka yang sudah kita setuju itu merupakan dokumen yang bersejarah dan mereka yang turut serta menandatangani akan dikenang untuk selama-lamanya.

Beberapa waktu kemudian, kedengaran deru mobil datang kembali. Pemuda yang tadinya meminjam naskah proklamasi, dengan diiringi para pemuda lainnya langsung menyerahkan kembali naskah tersebut dengan permintaan supaya naskah kemerdekaan Indonesia itu, hanya ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama rakyat Indonesia. Usulan tersebut disambut dengan suara bulat oleh hadirin.

Demikian sekelumit kesaksian A.A. Hamidhan yang terlibat langsung dalam malam penggodokan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Hamidhan menyatakan bahwa detik-detik lahirnya kemerdekaan Indonesia pada waktu itu memang terasa dikejar-kejar dan tegang. Coba bayangkan, kata Hamidhan. Mulai tengah malam sampai hampir waktu subuh tanggal 17 Agustus 1945 bersama-sama “menggodok” susunan Proklamasi bertempat di kediaman Laksamana Maeda, dan kembali ke hotel, untung masih sempat makan sahur.

Sebagai utusan Kalimantan dalam peristiwa di rumah Laksamana Maeda itu, A.A. Hamidhan sebenarnya tidak sendirian

karena ia didampingi adik kandungnya bernama A.A. Rivai. Tetapi karena namanya tidak tercatat sebagai utusan, maka A.A. Rivai tidak pernah disebut-sebut sebagai orang yang pernah menghadiri persidangan PPKI.

Gubernur Kalimantan

Ada satu peristiwa yang menarik lainnya yang perlu dikemukakan yakni penolakan A.A. Hamidhan untuk menjabat Gubernur Republik Indonesia yang pertama untuk Kalimantan. Padahal anggota PPKI dari luar Jawa semuanya diangkat menjadi Gubernur seperti Mr. Teuku Mohammad Hassan untuk Sumatera, Mr. I. Gusti Ketut Pudja untuk Sunda Kecil, Mr. J. Latuharhari untuk Maluku, dan Dr. G.S.S.J. Ratulangi untuk Sulawesi, bersama-sama gubernur lainnya yakni Sutardjo Kartohadikusomo untuk Jawa Barat, R.P. Suroso untuk Jawa Tengah, dan R.A. Surjo untuk Jawa Timur.

Penolakan Hamidhan untuk menjadi Gubernur Kalimantan sudah barang tentu mengherankan mereka yang hadir, sampai-sampai Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta bertanya: "Dan bagaimana dengan Saudara?". Dengan tegas Hamidhan menjawab bahwa ia tetap di bidangnya sebagai wartawan.

Otto Iskandar Dinata yang kala itu khusus ditugaskan untuk mengadakan *feeling* pengangkatan para Gubernur Daerah di luar Jawa berkata: "Saya heran, hanya saudara yang tidak menerima untuk dijadikan Gubernur, sedangkan lain-lain utusan tidak ada yang menolak. Kalau begitu, siapakah yang saudara usulkan?". A.A. Hamidhan mengusulkan Ir. Pangeran Mohammad Noor yang kala itu tinggal di Bandung sebagai pegawai tinggi Departemen Pekerjaan Umum untuk menduduki jabatan tersebut dengan pertimbangan akan dapat diterima oleh seluruh rakyat Kalimantan. Usulan Hamidhan itu diterima baik oleh Presiden Soekarno, karena terbukti dengan diangkatnya 8 Gubernur untuk 8 provinsi termasuk Ir. Pangeran Mohammad Noor sebagai Gubernur Kalimantan pada tanggal 5 September 1945.

Sebelum pulang ke Banjarmasin, Presiden Soekarno menyerahkan kepada A.A. Hamidhan Surat Keputusan pengangkatan Mr. Rusbandi sebagai Ketua KNI Daerah dan dr. Sosodoro Djatikusomo sebagai PNI Daerah Kalimantan. Kedua tokoh itu pun diangkat atas saran Hamidhan juga. Sedangkan A.A.

Hamidhan sendiri diangkat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia (KNIP) Pusat.

Begitulah sekelumit peranan A.A. Hamidhan dalam perjuangan kemerdekaan. Sebagai seorang yang berjuang terus menerus selama 18 tahun sebagai wartawan nasional (1927-1945) dan pernah 3 kali dihukum penjara kolonial, dan percetakan surat kabar miliknya Soeara Kalimantan dihancurleburkan oleh Algemene Vernielings Corps (AVC) Belanda menjelang kedatangan tentara Jepang di Banjarmasin, dan kemudian menjadi anggota PPKI dan KNIP, ia tidak merasa paling berhak untuk memangku jabatan yang ditawarkan. Bahkan sampai akhir hayatnya tanggal 20 Agustus 1997 ia tidak pernah sekalipun mendapatkan tunjangan pensiun dari pemerintah.

Dalam memoarnya, A.A. Hamidhan menyatakan bahwa apa yang ia lakukan itu merupakan suatu kewajiban sebagai bangsa Indonesia yakni turut memberikan sedikit sumbangan untuk kemerdekaan bangsa dan tanah air. Dan mengenai penilaian terhadap dirinya, terserah kepada masing-masing pihak. Karena itu pula ia tidak mengharapkan supaya diakui sebagai “Perintis Kemerdekaan”, apalagi sampai diharuskan memajukan permohonan untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah.

A.A. Hamidhan memang telah tiada, namun ia telah meninggalkan nama dan sumbangan untuk kemerdekaan negeri ini. Di saat kita memperingati HUT Proklamasi setiap tanggal 17 Agustus, barangkali hanya segelintir orang yang mengenang perjuangannya. Kita memang bersukaria merayakan hari kemerdekaan itu; dengan panjat pinang, lomba lari karung, tarik tambang, pameran pembangunan, dan lain sebagainya. Tidak salah memang, namun tahukah anda, di tengah kegembiraan itu masih banyak pejuang dan janda pahlawan kemerdekaan yang terhimpit di tengah kemiskinan ekonomi. Pahlawan sejati memang tidak mengharap balas jasa, akan tetapi generasi penerus wajib memperhatikan mereka. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!.

6

HIKAYAT LAMBUNG MANGKURAT DALAM PERSPEKTIF SEJARAH MODERN

Hikayat Lambung (Lembu) Mangkurat adalah salah satu bentuk historiografi tradisional di samping babad, riwayat, tambo dan silsilah. Di daerah Banjar, yang meliputi daerah Kalimantan Selatan dan sebagian Kalimantan Tengah sekarang, selain Hikayat Lambung Mangkurat dikenal pula nama lain seperti Tutar Candi, Hikayat Raja-raja Banjar dan Kotawaringin. Sejak zaman Kerajaan Banjar, manuskrip-manuskrip tua itu dikenal sebagai Hikayat Banjar. Di daerah lain bentuk yang sejenis antara lain adalah Hikayat Raja-raja Pasai, Negarakertagama, dan Pararaton.

Dalam A. Gazali Usman (1989) disebutkan, bahwa isi Hikayat Banjar terdiri dari dua tipe atau versi, yakni (a) Hikayat Banjar Versi I atau Resensi I; (b) Hikayat Banjar Versi II atau Resensi II.

Resensi I berisikan cerita tentang Keraton I (Negara Dipa) dan Keraton II (Negara Daha) yang legendaris, sedangkan Resensi II lebih banyak berisi cerita tentang peristiwa yang menjurus ke arah puncak peristiwa, yakni Pemberontakan Keraton III atau munculnya Kerajaan Bandarmasih/Banjarmasin, dan dari awal perkembangan agama Islam di daerah ini, hingga munculnya Keraton IV (Kerajaan Banjar di Kayu Tangi/Martapura).

Hikayat Banjar versi I maupun versi II, antara lain dapat dilihat dari buku Hikayat Lembu Mangkurat susunan G. Mayur (1979) yang disusun dengan meringkas sebuah gubahan pujangga tua dan mengikuti sebagian disertasi A.A. Canse, serta buku Tutar Candi yang telah dialihaksarakan oleh M. Idwar Saleh (1986).

Perspektif Sejarah Modern

Penulisan sejarah yang tradisional (historiografi tradisional), apakah yang namanya babad, silsilah, tambo, dan hikayat termasuk di dalamnya Hikayat Lambung Mangkurat, tidaklah

bersifat kritis ilmiah dan tidak lulus sebagai karya sejarah dalam pengertian modern, karena isinya banyak menceritakan hal-hal yang tidak logis.

Menurut Taufik Abdullah (1985), hikayat, riwayat, tambo, silsilah dan sejenisnya yang dihasilkan oleh berbagai etnis kultural, isinya seringkali mempunyai ciri atau berkecenderungan: (1) Mencari keterangan kepada sesuatu yang berada di luar sejarah; (2) Sebab akibat hakiki tidak terletak pada rangkaian peristiwa; (3) Suasana religiomagis seperti nasib, kutukan, rahmat, lebih menonjol daripada keberhasilan atau gagal dalam berusaha; (4) Kredibilitas atau kadar kepercayaan terhadap isinya lebih banyak ditentukan oleh penghayatan kultural pembacanya; dan (5) Isi dari historiografi tradisional seringkali mengaburkan dua macam realitas sejarah, yakni antara realitas yang objektif terjadi dengan realitas riil dalam diri, sehingga terkubur di dalamnya antara fakta yang merupakan pengalaman yang aktual dengan fakta yang berupa hasil penghayatan kultural kolektif.

Kecenderungan-kecenderungan tersebut, juga terdapat dalam Hikayat Lambung Mangkurat sebagaimana tergambar dalam kutipan berikut ini: Lembu Mangkurat keheran-heranan setelah mengetahui bahwa mayat-mayat Bambang Patmaraga hilang lenyap seketika itu juga.

Ekspresi Kultural

Penulisan sejarah (historiografi), pada mulanya lebih merupakan ekspresi kultural dari usaha untuk merekam masa lampau yang berkenaan dengan masyarakat yang menghasilkannya. Dalam konteks ini, makna dan fungsi sejarah lebih berarti daripada peristiwa-peristiwa yang diungkapkan dari kelampauan tersebut. Dengan demikian, yang menjadi tujuan utamanya bukanlah kebenaran historis, tetapi pedoman dan penegakan nilai yang perlu didapatkan. Oleh karena itu, dalam Hikayat Lambung Mangkurat sebagai ekspresi kultural, isinya erat dengan unsur-unsur sastra sebagai karya imajinatif, mitologi, dan pandangan hidup yang dihasilkan dengan unsur-unsur faktual dari peristiwa masa lalu.

Hikayat dan sejenisnya pada mulanya juga dihasilkan oleh pujangga istana yang mendapat tugas khusus untuk menyusun

kronik dan daftar silsilah. Para pujangga menentukan rajanya dalam pusat sejarahnya, dipujanya sebagai dewa sehingga dapat menambah kesaktian raja di mata rakyatnya.

Para pujangga bisa dimanfaatkan untuk meneguhkan dinasti atau tahta yang tidak sah, dengan jalan memperkuat legitimasi atau mempertahankan dasar nilai yang menjadi sandaran ideologi dan kekuasaan. Hal seperti itu juga terdapat dalam Hikayat Lambung Mangkurat, menyebabkan raja-raja Negara Dipa dan Negara Daha dipandang berasal dari penguasa alam atas dan alam bawah.

Berbeda dengan Hikayat dengan Raja-raja Banjar dan Kota Waringin yang pada mulanya memang disusun oleh pujangga istana, Hikayat Lambung Mangkurat yang juga terdapat dalam Tutar Candi, pada mulanya adalah tradisi lisan (oral tradition) yang berkembang atau sengaja dikembangkan dalam masyarakat.

Sebagai tradisi lisan, suatu gambaran realitas tidaklah identik dengan realitas atau peristiwa itu sendiri, tetapi ia memperlihatkan bagaimana peristiwa itu dimengerti oleh masyarakatnya, sehingga yang dimengerti itulah yang dianggap sebagai realitas baru atau yang sebenarnya.

Alam pikiran religio magis, pergeseran masa dan pertukaran waktu, dapat menimbulkan metamorfosa (perubahan bentuk) peristiwa, sehingga, misalnya, seorang tokoh historis yang pernah ada, secara perlahan-lahan dapat mengalami perubahan bentuk, sehingga ia dianggap sebagai legenda dan dikelilingi oleh mitos. Begitu pula sebuah norma dapat mengalami personifikasi, norma atau ide bisa menjadi tokoh historis yang sebenarnya tidak ada.

Historical Mindedness

Hikayat Lambung Mangkurat sebagai suatu ekspresi kultural, kepastian historisnya memang dirasakan namun sulit dibuktikan, termasuk sulitnya membuktikan keberadaan atau ketidakberadaan tokoh Lambung Mangkurat itu sendiri. Ia terasa ada namun terbuktikan tidak.

Walaupun sulit dibuktikan atau tidak lulus sebagai karya sejarah dalam pengertian modern, Hikayat Lambung Mangkurat dan sejenisnya tetap dipandang sebagai sumber yang sangat berharga bagi sejarah, di samping sumber-sumber lainnya. Tanpa

Hikayat, misalnya, sangat sulit memahami seputar Candi Agung (Amuntai) atau Candi Laras (Margasari), dan sebaliknya.

Hikayat termasuk mitos yang berhubungan dengan peristiwa sejarah dikenal sebagai sastra sejarah. Sastra sejarah adalah bayangan sejarah, karena realibilitas data sejarahnya diragukan, maka penggunaannya harus melalui kritik sejarah.

Oleh karena itu, untuk memahami dan menggunakan Hikayat Lambung Mangkurat sebagai sumber-sumber dalam merekonstruksi sejarah, maka ia harus terlebih dahulu dibersihkan dari unsur-unsur yang tidak logis dan membandingkannya dengan sumber-sumber lain.

Yang tak kalah pentingnya adalah memahaminya dengan konsep berpikir sejarah yang dikenal sebagai *Historical Mindedness*, yakni bagaimana pikiran, jiwa dan hati kita masuk ke dalam kelampauannya, dan hal itu dapat diperoleh dengan jalan memiliki kesadaran dan pengetahuan yang mendalam tentang latar belakang kultural dari masyarakat yang menghasilkannya. Dari penghayatan kultural itulah, asal-usul, keberadaan atau ketidakberadaan hikayat dan tokoh Lambung Mangkurat diharapkan dapat ditelusuri.

Demikian pula pemahaman terhadap cerita rakyat atau legenda, atau bahan sastra lain yang non formal, sangat diperlukan untuk mendapat gambaran yang lebih menyeluruh tentang dasar-dasar interpretasi situasi dari tokoh historis, terutama berkenaan dengan masyarakat yang belum mengenal tulisan.

MENGENAL METODE SEJARAH

Sejarah adalah salah satu cabang dari ilmu sosial yang sangat terbuka kepada hal yang bersifat amatiran. Hal tersebut tergambar dari suatu pendapat yang menyatakan bahwa semua orang mampu menulis sejarah. Konsekuensi dari pendapat tersebut adalah banyaknya tulisan tentang sejarah yang kurang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kadangkala sulit dibedakan antara yang dongeng, mitos, legenda, dan sejenisnya dengan fakta sejarah. Sekarang tulisan-tulisan seperti itu tidak dapat dipertahankan lagi.

Sejarah seharusnya ditulis oleh orang yang mempunyai kompetensi di bidang kesejarahan (baca : sejarawan) yang diharapkan mampu meneliti dan menulis dengan semangat kritis yang tinggi, dalam arti sejak pengumpulan data atau sumber sejarah (yang biasa disebut heuristik) sampai kepada tahap penulisannya (historiografi), harus dilakukan serangkaian kritik sehingga dapat dihasilkan suatu tulisan sejarah yang didasarkan atas fakta-fakta yang benar-benar teruji dan dapat diandalkan. Untuk mencapainya sejarah harus ditulis melalui prosedur yang disebut Metode Sejarah. Metode ini mempunyai empat tahapan yang integral, yakni Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi.

Tulisan ini tidaklah dimaksudkan untuk membahas empat tahapan tersebut secara menyeluruh dan mendalam dan tidak pula dimaksudkan untuk memberikan suatu jaminan bahwa suatu peristiwa sejarah dapat dituangkan ke dalam suatu tulisan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang penting di sini adalah memberikan pengertian tentang dasar-dasar metode tersebut yang mungkin bermanfaat terutama bagi kandidat ahli ilmu sejarah atau peminat sejarah. Dan, penggunaan metode sejarah itu sendiri sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi dimana penelitian dan penulisan sejarah itu sendiri berlangsung.

Heuristik

Heuristik adalah kegiatan berupa penghimpunan jejak-jejak masa lampau, yakni peninggalan sejarah atau sumber apa saja yang dapat dijadikan informasi dalam pengeritian studi sejarah.

Louis Gottchalk (1975) telah memilah heuristik, sebagai berikut, pertama: memilih memilih subjek. Dalam memilih subjek, heuristik harus merujuk kepada empat pertanyaan pokok, yakni : dimana, siapa, bilamana, dan apa. Pertanyaan tersebut berkenaan dengan aspek geografis, biografis, kronologis, fungsional atau okupasional. Dari pertanyaan pokok itulah berbagai keharusan konseptual dilakukan dan berbagai proses pengerjaan penelitian dan penulisan dijalani. Pertanyaan tersebut berfungsi untuk menentukan penting atau tidaknya suatu peristiwa diteliti. Juga sebagai alat untuk menentukan hal-hal mana yang bisa dijadikan "fakta sejarah". Pendek kata fokus yang bersitat interrogatif tersebut akan menuntun sejarawan kepada subjek, sehingga terhindar dari fokus yang ngawur atau tidak perlu.

Kedua, informasi tentang subjek, yang dapat dapat diperoleh dari berbagai macam sumber, yakni: (1) Rekaman sezaman yang terdiri dari instruksi atau perintah, rekaman stenografis dan fonografis, surat niaga dan hukum, serta buku catatan pribadi dan memorandum prive; (2) Laporan konfidensial yang terdiri berita resmi militer dan diplomatik, jurnal atau buku harian, dan surat-surat pribadi; (3) Laporan-laporan umum yang terdiri dari laporan dan berita surat kabar, memoar dan otobiografi, sejarah "resmi" suatu instansi, perusahaan dan sejenisnya. (4) Quesionaris tertulis; (5) Dokumen pemerintah dan kompilasi, terdiri dari risalah instansi pemerintah, undang-undang dan peraturan; (6) Pernyataan opini, terdiri tajuk rencana, esei, pidato, brosur, surat kepada redaksi, dan sejenisnya; (7) Fiksi, nyanyian, dan puisi; (8) Folklore, nama tempat, dan pepatah.

Delapan sumber informasi tersebut bukanlah sumber sejarah dalam arti sebenarnya. Artinya ia hanya sebagai sarana untuk mencari keterangan tentang subjek. Sedangkan sumber sejarah itu sendiri adalah hasil yang diperoleh dari pencarian informasi tersebut yang nantinya digunakan dalam penulisan sejarah setelah melalui tahapan pengujian.

Tentang sumber sejarah, Nugroho Notosusanto (1978:36) telah mengklasifikasikannya ke dalam tiga bentuk yang sederhana yakni: (1) Sumber benda; menyangkut benda-benda arkeologis, efigrafi, numistik, dan benda sejenis lainnya; (2) Sumber tertulis, terdiri dari buku-buku dan dokumen; (3) Sumber lisan, terdiri dari hasil wawancara dan tradisi lisan (*oral tradition*).

Hasil pengerjaan studi sejarah yang akademis atau kritis memerlukan fakta-fakta yang telah teruji. Oleh karena itu data-data yang diperoleh melalui tahapan heuristik terlebih dahulu harus dikritik atau disaring sehingga diperoleh fakta-fakta yang seobjektif mungkin. Kritik tersebut berupa kritik tentang otentitasnya (kritik ekstern) maupun kredibilitas isinya (kritik intern), dilakukan ketika dan sesudah pengumpulan data berlangsung

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang dapat dipergunakan dalam metode sejarah, seperti: studi kepustakaan, pengamatan lapangan, wawancara (interview). Dapat pula digunakan teknik lain seperti questionnaires, pendekatan tematis (topical approach) beserta berbagai perangkat ilmu bantu lainnya, terutama digunakan terhadap topik yang mengarah kepada studi kasus (case study).

Kritik

Hasil pengerjaan studi sejarah yang akademis atau kritis memerlukan fakta-fakta yang telah teruji. Oleh karena itu, data-data yang diperoleh melalui tahapan heuristik terlebih dahulu harus dikritik atau disaring sehingga diperoleh fakta-fakta yang subjektif mungkin. Kritik tersebut berupa kritik tentang otentitasnya (kritik ekstern) maupun kredibilitas isinya (kritik intern), dilakukan ketika dan sesudah pengumpulan data berlangsung.

Kritik ekstern terhadap sumber lisan kalau memang menggunakan teknik wawancara dilakukan terhadap para informan yang akan diwawancarai. Informan harus memiliki kemampuan untuk memberikan keterangan yang sebenarnya. Hal itu dapat dilihat dari keterlibatannya atas suatu peristiwa, serta tingkat keintelektualannya. Caranya antara lain dengan jalan meminta keterangan kepada para informan tentang keterlibatan informan lainnya atas peristiwa tersebut.

Faktor usia juga menentukan dan sedapat mungkin diperlukan informan yang sezaman dan pernah berkiprah pada peristiwa yang diteliti. Sedangkan kritik intern terhadap sumber lisan dapat dilakukan dengan jalan membandingkan beberapa hasil wawancara antara informan yang satu dengan yang lainnya, yang juga dibandingkan dengan sumber sejarah lainnya. Perbandingan itu perlu dilakukan terutama terhadap versi cerita yang berbeda-beda tentang sesuatu peristiwa. Semakin banyak versi cerita semakin mudah untuk memperoleh fakta yang sebenarnya. Tentang hal ini ada baiknya dibaca pengalaman Anton Lucas dalam Koentjaraningrat dan Donald K. Emerson, editor (1982) yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh para kandidat ahli atau peminat sejarah.

Kritik ekstern terhadap sumber tertulis perlu dilakukan agar tidak terperangkap kepada dokumen palsu. Oleh karena itu perlu dipertanyakan tentang otentik atau tidak sejatinya suatu sumber. Juga perlu diketahui tentang asli dan utuhnya sumber-sumber. Kalau sebuah dokumen tidak lagi utuh atau cacat, seorang sejarawan harus mengadakan restorasi teks agar dokumen tersebut kembali utuh dalam arti isi yang terkandung dapat diterima secara ilmiah. Untuk itu diperlukan berbagai ilmu bantu sejarah yang dapat memberikan penjelasan yang logis atas dokumen tersebut, seperti arkeologi, filologi, dan sebagainya.

Masalah anakronistis suatu sumber perlu juga diketahui. Masalah ini berkenaan dengan apakah materi sumber; tulisan, tanda tangan, materai, cap atau stempel, serta langgam dan peristiwa yang terekam di dalam dokumen tersebut cocok dengan zamannya. Kalau tidak cocok, berarti dokumen tersebut anakronistis dan tidak bisa digunakan sebagai fakta sejarah.

Kritik intern terhadap sumber tertulis terutama dilakukan dengan jalan melihat kompetensi, atau kehadiran pengarang terhadap waktu atau peristiwa. Kepentingan pengarang, sikap berat sebelah serta motif pengarang, juga sangat perlu untuk diketahui guna menentukan kredibilitas isi tulisan. Sedangkan terhadap sumber tertulis berupa dokumen, dilakukan dengan melihat *segì semantik*, *hermeneutik*, dan pemahaman terhadap *historical mindedness*.

Masalah semantik (arti kata) berkenaan dengan kemampuan memahami secara tepat tentang arti sebuah kata,

istilah, maupun konsep yang ada dalam sebuah dokumen. Dan, masalah hermeneutik berkenaan dengan penghalusan suatu kata atau istilah sehingga mengaburkan arti yang sebenarnya. Sedangkan masalah *historical mindedness* berkenaan dengan kemampuan memahami hal-hal kesejarahan dengan jalan "meluluhkan" jiwa dan pikiran sesuai dengan kondisi kesejarahan, dan tidak menggunakan ukuran sekarang untuk "mengukur" masa lampau tersebut. Oleh karena itu, kadangkala diperlukan pengetahuan dan penghayatan kultural tentang situasi dan kondisi dimana dokumen tersebut dibuat.

Interpretasi

Data atau sumber sejarah yang dikritik akan menghasilkan fakta yang akan digunakan dalam penulisan sejarah. Namun demikian, sejarah itu sendiri bukanlah kumpulan dari fakta, parade tokoh, kronologis peristiwa, atau deskripsi belaka yang apabila dibaca akan terasa kering karena kurang mempunyai makna.

Fakta-fakta sejarah harus diinterpretasikan atau ditafsirkan agar sesuatu peristiwa dapat direkonstruksikan dengan baik, yakni dengan jalan menyeleksi, menyusun, mengurangi tekanan, dan menempatkan fakta dalam urutan kausal. Dengan demikian, tidak hanya pertanyaan dimana, siapa, bilamana, dan apa yang perlu dijawab, tetapi juga yang berkenaan dengan kata mengapa dan apa jadinya.

Dalam interpretasi, seorang sejarawan tidak perlu terkungkung oleh batas-batas kerja bidang sejarah semata, sebab sebenarnya kerja sejarah melingkupi segala aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, untuk memahami kompleksitas sesuatu peristiwa, maka mau tidak mau sejarah memerlukan pendekatan multidimensi. Dengan demikian, berbagai ilmu bantu perlu dipergunakan dengan tujuan mempertajam "pisau analisis" sehingga diharapkan dapat diperoleh generalisasi ke tingkat yang lebih sempurna.

Perlu pula dikemukakan di sini, bahwa dalam tahapan interpretasi inilah subjektifitas sejarawan bermula dan turut mewarnai tulisannya dan hal itu tak dapat dihindarkan. Walau demikian, seorang sejarawan harus berusaha sedapat mungkin

menekan subjektifitasnya dan tahu posisi dirinya sehingga nantinya tidak membias ke dalam isi tulisannya.

Historiografi

Historiografi adalah penyajian hasil interpretasi fakta dalam bentuk tulisan. Dapat dikatakan historiografi sebagai puncak dari rangkaian kerja seorang sejarawan, dan dari tahapan inilah dapat diketahui "baik buruknya" hasil kerja secara keseluruhan. Oleh karena itu dalam penulisan diperlukan kemampuan menyusun fakta-fakta yang bersifat fragmentaris ke dalam tulisan yang sistematis, utuh, dan komunikatif.

Dalam historiografi modern (sejarah kritis), seorang sejarawan yang piawai tidak lagi terpaku kepada bentuk penulisan yang naratif atau deskriptif, tetapi dengan multidimensionalnya lebih mengarah kepada bentuk yang analitis karena dirasakan lebih *scientific* dan mempunyai kemampuan memberi keterangan yang lebih unggul dibandingkan dengan apa yang ditampilkan oleh sejarawan konvensional dengan sejarah naratifnya.

PROKLAMASI 17 MEI : SEBUAH MOMENTUM MENUJU MUARA

Menjelang dan sesudah dikumandangkan Proklamasi 17 Mei, situasi dan kondisi Kalimantan Selatan (*Residentie Zuid van Borneo*) pada bulan-bulan pertama 1949, mencerminkan adanya kemajuan besar yang diperoleh para gerilyawan dalam menyerang dan mendesak kedudukan KNIL (*Koninklijk Nederlands Indisch Leger*), KL (*Koninklijk Leger*) dan Polisi NICA (*Nederlands Indisch Civil Administration*), sehingga secara de facto mempunyai kekuasaan teritorial yang besar dan semakin cepat meluas. Kemajuan tersebut tidaklah lahir dengan tiba-tiba, tetapi dicapai setelah melalui proses yang panjang dan penuh liku-liku. Proses tersebut bagaikan riak gelombang sebuah sungai yang secara progresif terus mengalir menuju muara, yakni muara kemerdekaan.

Ada beberapa patokan yang bisa diangkat kepermukaan yang mencerminkan situasi dan kondisi perjuangan pada bulan-bulan pertama 1949.

Patokan Pertama adalah keberhasilan ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan dalam mengkonsolidasikan para gerilyawan.

Jauh sebelumnya, setelah Agustus 1945, para gerilyawan telah membentuk organisasi kelaskaran yang terpisah-pisah dan ilegal. Namun, usaha tersebut tidak dapat berbuat banyak dalam membendung dan mengusir Belanda (NICA) yang kembali ke Kalimantan Selatan. Sebabnya antara lain lantaran kurangnya koordinasi antar organisasi kelaskaran itu sendiri.

Bertitik tolak dari pengalaman itulah, maka bagi ALRI Divisi IV sebagai organisasi kelaskaran terbesar kala itu, memandang perlu untuk menyatukan semua gerak langkah perjuangan guna menghadapi Belanda dan kolaboratornya secara lebih efektif dan efisien, yakni dengan jalan mengkonsolidasikan semangat rakyat, organisasi perjuangan terutama kelaskaran, dan memperbaharui susunan formasi yang ada. Dengan demikian, ALRI Divisi IV tidak

dapat membenarkan lahirnya organisasi perjuangan yang baru di luar ALRI.

Untuk kepentingan tersebut, sampai akhir 1948, ALRI dengan jalan musyawarah telah berhasil merangkul sebagian besar anggota kelaskaran untuk bersama-sama melawan Belanda. Jalan kekerasan dengan ditunjang oleh operasi teritorial, kadangkala juga dilaksanakan terutama dalam menghadapi organisasi kelaskaran yang kontra republik.

Usaha konsolidasi semakin mendesak setelah dikumandangkannya Proklamasi Pembentukan Pemerintahan Gubernur Tentara ALRI Divisi IV pada tanggal 17 Mei 1949. Letkol Hassan Basry dalam kedudukannya sebagai gubernur tentara maupun pimpinan komando divisi, telah mengirim utusan-utusnya untuk menindak atau membicarakan masalah penggabungan organisasi kelaskaran ke dalam tubuh ALRI, sehingga sampai Agustus 1949, beberapa organisasi kelaskaran seperti Pasukan Kucing Hitam, Pasukan Lawung, dan Mandau Telabang Kalimantan Indonesia (MTKI) Hulu Sungai, serta Gerakan Revolusi Rakyat Indonesia (GRR) telah menyerah dan/atau mau menggabungkan diri ke dalam tubuh ALRI Divisi IV.

Patokan kedua, adalah keberhasilan para gerilyawan dalam menyerang kedudukan Belanda, sehingga memiliki kekuasaan teritorial yang luas. Keberhasilan tersebut seiring dengan keberhasilan usaha-usaha konsolidasi yang telah dilaksanakan oleh ALRI. Maka dengan terpusatnya semua kekuatan di tubuh ALRI menyebabkan daya serangnya semakin menghebat. Hal itulah yang menyebabkan pihak gerilyawan memperoleh kemenangan di berbagai pertempuran.

Akibat adanya tekanan dari pihak gerilyawan, maka Belanda mulai menarik pos-pos militernya yang terpencil dan memusatkan kekuatan di kota-kota dengan tujuan mempermudah komunikasi dan memperpendek jarak pengangkutan kebutuhan peralatan.

Bagi gerilyawan, tindakan Belanda tersebut justru menguntungkan perjuangan bersenjata. Sebab, selain memperoleh kekuasaan teritorial, maka ditinjau dari sudut psikologis, maka optimisme dan kebanggaan para gerilyawan semakin meningkat. Sejak itulah, secara de facto gerilyawan telah

menguasai seluruh daerah Kalimantan Selatan minus kota-kota yang diduduki oleh Belanda.

Adanya keberhasilan pada gerilyawan dalam menekan Belanda, telah menjadi pendorong munculnya Proklamasi Pembentukan Pemerintahan Gubernur Tentara ALRI pada tanggal 17 Mei 1949. Pembentukan itu sendiri, juga disebabkan oleh adanya implikasi Persetujuan Linggarjati, adanya kenyataan vakumnya pemerintahan sipil di daerah-daerah yang ditinggalkan Belanda dan yang lebih penting lagi adalah agar keberadaan, kekuatan, dan kemampuan ALRI Divisi IV diakui, serta Kalimantan Selatan tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari wilayah Republik Indonesia.

PROKLAMASI

Merdeka!

Dengan ini kami rakyat Indonesia di Kalimantan Selatan, mempermaklumkan berdirinya Pemerintah Gubernur Tentara dari "A.L.R.I" melingkungi seluruh daerah Kalimantan Selatan menjadi bagian dari Republik Indonesia, memenuhi Proklamasi 17 Agustus 1945 yang ditandatangani oleh Pres. Soekarno dan Wakil Pres. M. Hatta. Hal-hal yang bersangkutan dengan pemindahan kekuasaan akan dipertahankan dan kalau perlu diperjuangkan sampai tetesan darah yang penghabisan.

Tetap Merdeka

Kandangan, 17 Mei Th. IV Rep.

Atas nama Rakyat Indonesia

Di Kalimantan Selatan

Gubernur Tentara,

Hassan Basry

Terbentuknya Pemerintah Gubernur Tentara ALRI merupakan sebuah momentum yang sangat penting yang pernah dicapai oleh para gerilyawan dalam menghadapi atau menekan

Belanda melalui pengembangan dan penyebarluasan kekuatannya ke bidang politik, sosial, dan ekonomi, sehingga sejak 17 Mei 1949, telah terjadi dualisme pemerintahan dan kekuasaan teritorial yang mana pihak pemerintah Gubernur Tentara ALRI lebih berkuasa dibandingkan dengan pihak Belanda. Kepopulerannya telah menyebabkan segala perintah dilaksanakan oleh rakyat. Hal tersebut antara lain terjadi ketika adanya larangan pergi haji, dan perintah mengadakan pemogokan umum. Bahkan di kota Kandangan, rakyat dengan sukarela meninggalkan rumah, harta dan pekerjaannya untuk hijrah ke daerah pedalaman yang dikuasai gerilyawan, yang batasnya hanya dua kilometer dari kota tersebut.

Patokan Ketiga adalah sikap defensif Belanda terhadap tekanan-tekanan para gerilyawan. Sebagaimana diterangkan sebelumnya, Belanda telah menarik dan memusatkan kekuatannya di kota-kota. Hal tersebut berarti, Belanda sebagian besar telah kehilangan inisiatif untuk menyerang posisi-posisi gerilyawan. Pasukan KNIL, KL, maupun polisi NICA hanya mungkin melakukan perjalanan di pedalaman dalam konvoi dan pengawalan yang ekstra. Di Banjarmasin sendiri, mereka harus waspada terhadap serangan-serangan gerilyawan. Seorang sejarawan bernama Cornelis van Dijk pernah menyatakan, bahwa sesungguhnya dalam paruh kedua tahun 1949 ALRI Divisi IV telah bersimharajalela dan benar-benar dapat melumpuhkan pemerintahan NICA di Kalimantan Selatan, termasuk di dalamnya keberhasilan menggagalkan pembentukan Negara Borneo. Sedemikian gawatnya situasi pada waktu itu, menyebabkan Residen A.G. Deelman dan Teritorial Commandant-nya yakni Letkol H.J.Veenendal harus tidur di kapal perang yang berlabuh di pelabuhan Banjarmasin. Bahkan untuk pelarian darurat orang-orang Belanda, telah dipersiapkan kapal-kapal kecil di pelabuhan tersebut.

Memang pihak Belanda selalu berusaha menutup-nutupi pemberitaan tentang kegiatan gerilya tersebut, agar terdapat kesan bahwa sebenarnya secara *de facto* maupun *de jure* Kalimantan Selatan benar-benar di bawah kekuasaan Belanda. Namun hal tersebut tidak dapat mengatasi keadaan.

Adanya serangan gencar para gerilyawan yang diekspose antara lain oleh Harian Kalimantan Berjuang, telah menyebabkan

Belanda tidak bisa menjalankan pemerintahannya dan dengan terpaksa harus menepiskan rasa malunya untuk "meminta" gencatan senjata (*cease fire*) di Kalimantan Selatan kepada Pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta. Padahal, secara sadar dan resmi, Pemerintah Republik Indonesia melalui Persetujuan Linggarjati dan Renville telah meninggalkan dan melupakan Kalimantan.

Dapat dikatakan, sebelum dilaksanakannya Pertemuan di Munggu Raya (September 1949) untuk membicarakan *cease fire* dimaksud, maka bulan Agustus 1949 adalah puncak kekalahan Belanda dan sebaliknya puncak kemenangan gerilya dan rakyat Kalimantan Selatan menuju muara kemerdekaan.

**FORMAT Kesenian Masyarakat Baru:
Industri Kesenian Mutakhir Berwawasan
Budaya Bangsa**

Memasuki tahun emas Indonesia merdeka, pergulatan para seniman semakin bergeser ke arah budaya kota (*urban culture*). Pergeseran tersebut terutama nampak di kota-kota besar. Walaupun demikian, pergeseran tersebut juga mulai nampak di hampir seluruh pelosok tanah air yang telah mengalami perubahan akibat keberhasilan pembangunan di berbagai bidang dan pengaruh globalisasi yang dipacu oleh cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama informasi.

Derasnya arus informasi yang disajikan oleh media cetak maupun elektronik, menjadikan dunia seolah-olah semakin menyempit atau masyarakat dan kebudayaannya semakin menyatu, serta tidak lagi dibatasi oleh faktor geografis dan politis. Berbagai peristiwa yang terjadi di beberapa belahan dunia dengan mudah ditangkap oleh penghuni belahan dunia lainnya. Seiring dengan proses pengglobalan, maka segala unsur berupa nilai positif maupun negatif dengan sendirinya akan mudah masuk dan turut mendorong serta mewarnai pergeseran-pergeseran tersebut.

Munculnya budaya kota juga tidak terlepas dari perubahan orientasi kehidupan masyarakat dan kebudayaan pertanian tradisional ke arah kebudayaan industri perdagangan yang mementingkan aspek komersial. Pergeseran orientasi pada kesenian terlihat dari adanya upaya mengkomersialkan karya seni dengan jalan memasukkan unsur-unsur baru yang oleh seniman inovatif sengaja dikembangkan sedemikian rupa sehingga selaras dengan selera dan kebutuhan masyarakat atau laku di pasaran. Kesenian seperti ini merupakan kesenian peralihan yang menghubungkan kesenian tradisi dengan kesenian kota.

Di kota-kota besar, kegiatan kesenian komersial sudah tak terbilang lagi seperti pameran lukisan yang menyebabkan perputaran mata uang yang bernilai ribuan hingga jutaan rupiah,

munculnya berbagai galeri atau bengkel seni pementasan teater dan eksperimentasi karya seni, promosi di luar negeri yang selain menampilkan kesenian yang berakar pada budaya bangsa juga menampilkan unsur-unsur seni yang dipandang relatif baru. Peristiwa kesenian tersebut merupakan suatu fenomena yang patut untuk dicermati dan diantisipasi secara positif sebagai suatu fenomena munculnya industri kesenian mutakhir, sebagai format dan kesenian masyarakat baru pasca lima puluh tahun Indonesia merdeka.

Sementara itu, pendukung kesenian tradisi yang konservatif terus mencoba mencari tempat pijakan guna mempertahankan fungsi dan eksistensinya yang dilematis di tengah berbagai macam perubahan. Berbeda halnya dengan kesenian Bali dan kesenian istana yang tetap mampu bertahan karena mutunya yang tinggi atau karena fungsi ritualnya yang masih berlangsung, maka hal tersebut tidak terjadi pada kesenian tradisi. Pada kesenian tradisi, semakin lama fungsi ritualnya semakin berkurang dan bahkan hilang sama sekali. Walaupun ada yang bertahan, itu semata-mata disebabkan oleh kekuatan artistik dan daya hiburannya yang masih ada.

Setelah fungsi ritual kesenian tradisi memudar, dengan sendirinya penikmat seninya semakin berkurang dan ditambah dengan perubahan selera masyarakat yang semakin cenderung ke arah hiburan yang dipandang lebih modern dan murah, seperti film layar lebar, televisi, radio dan sejenisnya, maka eksistensi kesenian tradisi semakin sulit dipertahankan. Di saat kesenian tradisi masih berjaya, kebanggaan pendukungnya memang masih ada namun tatkala ditinggalkan oleh khalayak penggемarnya dan tak mampu lagi mengantisipasinya, maka dengan sendirinya sumber penghidupan senimannya semakin berkurang. Keadaan seperti itu kadangkala memaksa mereka untuk alih profesi ke bidang lainnya yang bukan bagian dari kesenian, yang dianggap mampu memberikan sumber penghidupan yang lebih baik.

Strategi Pengembangan

Sebuah karya seni yang ideal adalah kesenian yang dapat memenuhi kriteria-kriteria mutu seni, sekaligus mampu memenuhi dan mengikuti perkembangan selera masyarakat. Untuk mencapai tahap kesenian ideal tersebut, maka kesenian tradisi harus

dikembangkan sedemikian rupa sehingga “laku di pasaran” dengan tidak mengorbankan nilai-nilai esensial yang terkandung di dalamnya. Pengembangan kesenian tersebut dapat diarahkan kepada industri kesenian mutakhir yang tetap berwawasan budaya bangsa.

Perkembangan kesenian akhir-akhir ini yang terjadi di kota-kota besar, sebagaimana telah dipaparkan di muka, merupakan suatu fenomena munculnya industri kesenian mutakhir. Jadi sebagai kesenian masyarakat baru, maka format kesenian seperti itu bukanlah hal yang tidak mungkin untuk dicapai dalam skala yang lebih besar di masa-masa yang akan datang. Yang penting sekarang adalah bagaimana merealisasi pengembangan dan turut menciptakan iklim yang mendukung tumbuh suburnya industri kesenian tersebut.

Yang dimaksud dengan “mutakhir” dalam industri kesenian tidaklah berarti mengabaikan sama sekali kesenian yang “lama. Mutakhir di sini adalah membangun idiom-idiom yang lama yang dianggap atau diperhitungkan akan dapat berfungsi sebagai sumber ilham dan sarana komunikasi dengan masa lampau.

Pengembangan industri kesenian mutakhir dapat dilakukan dengan mempergunakan unsur-unsur seni yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Unsur dari dalam adalah menggunakan unsur-unsur kesenian daerah yang beraneka ragam yang tentunya masih mampu bertahan. Sedangkan unsur dari luar adalah menggunakan unsur-unsur baru yang positif yang berasal dari Kebudayaan asing.

Penggunaan unsur dari luar tidaklah mengambil unsur seninya semata, tetapi juga ilmu pengetahuan dan teknologinya seperti pemanfaatan manajemen, sarana dan prasarana terbaru, yang tentunya terlebih dahulu harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Pendek kata, dalam pengembangan industri kesenian mutakhir, segala unsur yang digunakan harus tetap berlandaskan atau tidak bertentangan dengan budaya atau falsafah hidup bangsa Indonesia.

Pada dasarnya pengembangan industri kesenian mutakhir dapat diarahkan kepada tiga bentuk, yakni: (1) Tetap mempertahankan kesenian tradisi sebagaimana adanya. Pengembangan hanyalah berupa pemberian fasilitas penunjang, seperti peralatan (sarana) dan prasarana yang sesuai dengan

tuntut zaman; (2) Memperkaya kandungan kesenian tradisi dengan unsur-unsur baru yang positif dan mengolahnya sedemikian rupa dengan tidak mengorbankan nilai-nilai esensial yang dikandungnya. Umpamanya menggunakan beberapa dalang dalam waktu bersamaan di dalam satu pertunjukan wayang kulit; (3) Mengambil unsur-unsur baru dari dalam maupun dari luar yang positif dalam penciptaan karya seni yang sama sekali baru.

Sebenarnya yang paling menentukan dalam pengembangan industri kesenian mutakhir adalah para seniman itu sendiri. Merekalah tentunya yang paling mengerti apa dan harus bagaimana melakukannya. Ini semua karena mereka telah memiliki pengalaman dan penjelajahan yang luas dalam dunia kesenian.

Hal mendasar yang diperlukan oleh para seniman dalam mengembangkan industri kesenian mutakhir adalah terdapatnya iklim yang memungkinkan para seniman dapat dengan bebas berkarya seni atau mengekspresikan seluruh kemampuan seninya, sehingga secara kontinyu dapat melahirkan karya-karya seni mutakhir.

Tak dapat dipungkiri, iklim kebebasan berkarya seni yang diberikan pemerintah selama ini masih terkesan hati-hati. Hal tersebut dapat dilihat dari seringnya karya-karya seni tertentu yang batal untuk digelar karena terhambat masalah perizinan. Atau seringnya terjadi kasus pengekangan yang dilakukan aparat keamanan terhadap seniman-seniman tertentu.

Pengekangan terhadap seniman-seniman yang jika dipandang dari sudut kesenian dapat mengakibatkan atau bahkan mematikan kreativitas seniman dalam berkarya seni, sebenarnya dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi pengaruh yang ditimbulkan oleh karya seni yang dianggap dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara atau mengganggu ketenteraman hidup masyarakat.

Kemungkinan yang menjadi salah satu faktor penyebab adalah masih adanya miskomunikasi antara para seniman dengan pemerintah. Seharusnya aparat pemerintah di bidang keamanan lebih sering berdialog dengan seniman atau perlu mendapatkan pengetahuan tentang kesenian sehingga mereka dapat mengapresiasi karya-karya seni demi mutunya sendiri. Dengan adanya kemampuan mengapresiasi, diharapkan penilaian

terhadap baik-buruknya karya seni terhadap kemaslahatan masyarakat akan lebih dilandasi oleh pengetahuan yang tepat. Begitu pula, hendaknya para seniman perlu juga memiliki pengetahuan tentang perlunya ketahanan nasional atau berupaya untuk mengetahui aturan main serta lebih arif dalam menanggapi masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang memang berdimensi banyak.

Sekarang, setelah lebih dari lima puluh tahun Indonesia merdeka, dan seiring dengan kemajuan serta kedewasaan kehidupan berbangsa dan bernegara, diharapkan kasus pencekalan terhadap para seniman atau karyanya tidak akan terjadi lagi. Apalagi dengan telah adanya kebijaksanaan pemerintah untuk mengubah “lembaga perizinan” menjadi “lembaga pemberitahuan”, maka diharapkan pula nantinya akan lebih memacu kreativitas para seniman khususnya dalam berkarya seni atau mengekspresikan seluruh kemampuan seninya di masa-masa yang akan datang.

DARI KERAJAAN TANJUNG PURA KE MASJID PUSAKA

Tanjung Pura yang pernah dijadikan nama Komando Daerah Militer VI (kini menjadi Kodam XII Tanjung Pura) dianggap dahulunya sebagai kerajaan tertua yang pernah ada di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Ketapang. Tetapi nama Kerajaan Tanjung Pura dengan ibukotanya Tanjung Puri, dalam tradisi lisan kadang disebut berada di Kalimantan Selatan, yakni diperkirakan berada di daerah aliran sungai Tabalong yakni daerah Banua Lawas, Kelua atau Tanjung sekarang. Selain disebut Tanjung Pura, kadang juga disebut Kerajaan Tanjung Puri. Hal ini dimengerti karena riwayat kerajaan tersebut lebih banyak berupa asumsi berdasar data berupa tradisi lisan yang sangat terbatas dan diragukan kebenarannya.

Kerajaan Tanjung Pura dengan ibukotanya Tanjung Puri diperkirakan berada di daerah aliran sungai Tabalong yakni daerah Banua Lawas, Kelua atau Tanjung sekarang.

Pada masa lalu, daerah aliran Sungai Tabalong merupakan daerah konsentrasi koloni Melayu yang pertama. Perpaduannya dengan kebudayaan orang Maanyan, Bukit kemudian Ngaju telah menghasilkan etnis Banjar dengan unsur Melayu yang lebih dominan.

J.J. Rass dalam *Hikayat Banjar: A Study In Malay Historiography* memperkirakan bahwa Tanjung Pura yang berada di sekitar Tanjung adalah koloni orang Melayu dari zaman awal Sriwijaya. Mereka berlayar memasuki teluk besar Barito dan masuk ke daerah Tabalong.

Ketika kerajaan Tanjung Pura diserang oleh imigran-imigran pelarian dari Jawa, maka pusat perdagangan beralih ke Amuntai (Negara Dipa). Perpindahan tersebut selain seiring dengan penguasaan dan pertumbuhan pusat-pusat politik dan ekonomi, juga berkaitan dengan proses geomorfologi yang mana terjadi pendangkalan yang cepat di hulu Sungai Tabalong.

Negeri Nan Sarunai

Dalam Negarakertagama karangan Mpu Prapanca (1365) ada disebutkan tentang daerah-daerah yang terletak di sepanjang Sungai Negara, Batang Tabalong, Sungai Barito dan sekitarnya. Mpu Prapanca menyebut daerah tersebut berada di Nusa Tanjung Negara dan ini identik dengan pulau Hujung Tanah yang tak lain adalah barisan pegunungan Meratus yang menjorok ke laut.

Mengenai serangan imigran pelarian Jawa, orang Maanyan yang mengaku mempunyai sebuah kerajaan bernama Nan Sarunai di Kota Raden Amuntai sebagaimana dinyanyikan wadian suku itu, menyebutkan bahwa kerajaan Nan Sarunai hancur karena "usak Jawa" atau serangan Jawa. Mereka menyebut penyerang tersebut dengan nama "Maramjapahit".

Hingga kini belum terungkap dengan jelas tentang hubungan antara kerajaan Nan Sarunai dengan Kerajaan Tanjung Pura atau kaitannya dengan pindahnya pusat kekuasaan politik dan ekonomi dari Tanjung Pura ke Negara Dipa.

Ada pendapat yang menyatakan bahwa peristiwa yang tergambar dalam nyanyian wadian tersebut berkaitan erat dengan perampas kekuasaan (*usurpator*) Raden Sekar Sungsang yang memindahkan pusat kekuasaan dari Negara Dipa ke Negara Daha.

Versi lain terdapat dalam tradisi lisan yang berkembang di daerah Banua Lawas dan sekitarnya yang menyebutkan bahwa tepat di lokasi Masjid Pusaka Banua Lawas yakni masjid tua berarsitektur tradisional beratap tumpang tiga, jauh sebelum agama Hindu dan Islam berkembang, sudah berdiri semacam pesanggrahan atau tempat pemujaan kepercayaan Kaharingan suku Maanyan dalam bentuk yang sederhana.

Tempat pemujaan itu dianggap sakral, dan manfaatnya terasa sangat penting bagi orang-orang Maanyan yang pada masa itu banyak bermukim di Banua Lawas.

Mereka kemudian menyebut daerah lokasi bangunan pemujaan tersebut sebagai Banua Lawas atau Banua Usang. Suatu kemungkinan menunjukkan bahwa aktivitas masyarakat, kemunculan, dan berkembangnya daerah-daerah lain di sekitarnya berawal dari Banua Lawas ini.

Kemungkinan peristiwa besar terjadi yang memaksa mereka harus meninggalkan kampung halaman dan bermukim atau membangun pemukiman baru, dan akhirnya mereka menyebut kampung yang ditinggalkan tersebut sebagai Banua Lawas.

Tradisi lisan yang berkembang di Banua Lawas menyebutkan bahwa sebagian orang-orang Maanyan menyingkir karena mereka tidak bersedia menerima Islam sebagai agama mereka.

Tetapi kemungkinan lainnya adalah berkaitan dengan para imigran pelarian dari Jawa yang datang akibat kerusuhan politik di daerah asalnya dan mendirikan kerajaan baru di pulau Hujung Tanah bernama Negara Dipa.

Masjid Pusaka

Dalam Hikayat Lembu (Lambung) Mangkurat, Tutur Candi maupun Hikayat Banjar atau Hikayat Raja-raja Banjar dan Kotawaringin disebutkan bahwa Negara Dipa didirikan oleh Mpu Jatmika, anak saudagar Mangkubumi dari Keling. Ia meninggalkan Keling dengan kapal Si Prabayaksa dan diikuti oleh para pengikutnya untuk mencari atau mendirikan negara baru.

Sesuai dengan amanat ayahnya, bahwa mereka harus mencari negeri yang bertanah panas dan berbau harum yang kemudian ternyata adalah Pulau Hujung Tanah. Setelah tiba di pulau dimaksud, mereka kemudian mendirikan kerajaan Negara Dipa dan mendirikan Candi. Mpu Jatmika sendiri kemudian bergelar Maharaja di Candi.

Istilah Keling menurut Van der Tuuk sebagaimana dikutip dari buku *Banjarmasin* susunan M. Idwar Saleh adalah berhubungan dengan Jawa bukan Kalingga di India. Di Jawa Timur terdapat sebuah distrik dengan nama Kaling serta dalam cerita-cerita Jawa sebagai alternatif dari Kuripan dan Jenggala. Sedangkan B. Schrieke dalam *Indonesian Sociological Studies* mengidentifikasikan Keling dengan Kediri Utara.

Datangnya para imigran dari Jawa ke Pulau Hujung Tanah dilatarbelakangi oleh Perang Ganter (1222 M) yakni perang antara Ken Arok dengan Kertajaya (Raja Kediri). Dalam pertempuran tersebut Kertajaya tewas dan Kediri runtuh. Ken Arok kemudian

menjadi raja di kerajaan yang ia dirikan kemudian bernama Singosari.

Pengikut Kertajaya yang tetap setia atau tidak tahan atas perlakuan Ken Arok, melarikan diri ke pulau Hujung Tanah dan mendirikan Negara Dipa di pertemuan Sungai Negara dengan sungai Balangan. Dalam perkembangan selanjutnya Negara Dipa menjadi vazal dari kerajaan Majapahit, yakni kerajaan yang tumbuh sesudah runtuhnya Singosari.

Dalam Hikayat Banjar diterangkan bahwa Mpu Jatmika juga telah memerintahkan supaya Hulubalang Arya Megatsari dengan seribu tentaranya menaklukkan daerah Batang Tabalong, Batang Balangan dan Batang Pitap. Dengan kekuatan yang sama, berangkat pula Tumenggung Tatahjiwa ke daerah Batang Alai, Batang Hamandit, dan Labuan Amas.

Akibat penaklukan terhadap daerah Batang Tabalong, maka daerah Kelua, Banua Lawas kemudian menjadi daerah kekuasaan Negara Dipa yang berarti pula jajahan Majapahit. Dalam Negara-kertagama karangan Mpu Prapanca disebutkan bahwa daerah Barito, Sawako dan Tabalong adalah jajahan Majapahit.

Peristiwa penaklukan daerah Batang Tabalong oleh Negara Dipa sebagai vazal Majapahit terus membekas dan menjadi ingatan kolektif orang-orang Maanyan, sebagaimana tergambar dari dinyanyikan wadian suku itu.

Peristiwa penaklukan tersebut disertai dengan proses penyebaran agama dan budaya Hindu, serta pengikisan kepercayaan atau budaya lama. Kemungkinan saja di lokasi bekas pesanggrahan dan pemujaan orang Maanyan kemudian didirikan tempat pemujaan bagi para penganut Hindu Siwa. Setelah Islam berkembang di lokasi ini kemudian didirikan Masjid Pusaka.

Banua Lawas diyakini oleh orang Maanyan sebagai pusat Kerajaan Nan Sarunai yang kemudian mereka tinggalkan karena diserang Majapahit. Mereka kemudian menyebutnya kampung yang ditinggalkan dengan nama Banua Lawas. Menurut mereka di belakang Masjid Pusaka Banua Lawas terdapat makam raja Raden Anyan atau terkenal dalam sejarah lisan orang Maanyan dengan nama Am'mah Jarang. Di bawah lantai masjid, dahulunya terdapat sumur tua tempat Raden Anyan gugur ditombak Laksamana Nala. Dan di belakang masjid terdapat tujuh pohon kamboja besar-besar sebagai pertanda moksanya tujuh orang

putera Raden Anyan, yaitu Jarang, Idong, Pan'ning, Engko, Engkai, Liban, dan Bangkas (Rafiek, 2009:1220-1221).

Menurut tradisi lisan, sebagian orang-orang Maanyan menyingkir karena mereka tidak bersedia menerima Islam sebagai agama mereka. Akan tetapi, orang-orang Maanyan yang menerima Islam dan yang tetap bertahan dengan kepercayaan lamanya itu, tetap menjalin hubungan persaudaraan, sebagaimana diperlihatkan mereka pada saat bergotong royong membangun Masjid Banua Halat di bekas lokasi bangunan suci orang Maanyan.

Menurut tradisi lisan, Masjid Pusaka Banua Lawas didirikan oleh Khatib Dayan bersama-sama dengan Datu Kartamina, Datu Sari Negara, Datu Sri Panji, Datu Ranggan dan datu lainnya yang telah memeluk agama Islam pada tahun 1625 M bersamaan dengan pendirian Masjid Pusaka Puain pada tahun itu juga dan pada saat itu Kerajaan Banjar diperintah oleh Sultan Inayatullah. Dilihat dari namanya, kemungkinan Datu Sari Nagara dan Datu Sri Panji sebelumnya memeluk agama Hindu. Menurut informasi, Masjid Pusaka Banua Lawas dipugar pada tahun 1669, 1769, 1791, 1848, 1932, dan terakhir tahun 1999 dan 2003 oleh Direktorat Linbinjarah.

Sudah sepantasnya situs masjid Pusaka Banua Lawas dipelihara dan diteliti secara mendalam baik yang berkenaan dengan arsitektur, sejarah maupun arkeologinya. Di belakang masjid misalnya terdapat tumpukan batu bata yang berada di sela-sela makam kuno yang hingga kini belum diketahui apakah merupakan bekas jirat sebuah makam ataukah bekas reruntuhan bangunan pemujaan di masa lampau.

IMPLIKASI PERSETUJUAN LINGGAJATI BAGI KALIMANTAN

Persetujuan Linggajati adalah satu tamparan yang terhebat terhadap perjuangan kemerdekaan di Kalimantan. Dengan resmi Pemerintah Republik melepaskan pulau yang besar yang rakyatnya tidak sudi dipisahkan dari Republik Indonesia dan berkorban demikian berat untuk tujuan itu. (A.H. Nasution, Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Jilid 4, Angkasa, Bandung, 1978, hal. 111).

Untuk diketahui bahwa saya pernah membuat tulisan berisi tanggapan terhadap artikel Prof. Drs. Alex A Koroh, Guru Besar Sejarah pada FKIP Unlam yang juga dosen saya semasa kuliah dahulu yang dimuat di harian Banjarmasin Post (Maret 1998), dengan judul *Perjanjian Linggarjati sebagai Pilihan Strategi Perjuangan Kemerdekaan*. Bagaimana isi tanggapan saya terhadap tulisan beliau? Berikut dipaparkan intisarinya dengan beberapa tambahan.

Mengalah Untuk Menang

Dalam artikelnya, pada intinya Prof. Drs. Alex Koroh menyatakan bahwa perjanjian Linggarjati merupakan titik tolak bagi suatu proses perubahan menuju berakhirnya kedaulatan Belanda secara *de jure* atas Indonesia. Maknanya mungkin adalah bahwa bertolak dari Linggarjati —dalam dokumen perjanjian tertulis Linggajati—, diharapkan Kedaulatan Republik Indonesia atas pulau-pulau lainnya dapat diwujudkan melalui meja perundingan.

Jika maknanya sebagai titik tolak, saya sependapat dengan beliau, karena ibarat pepatah strategi yang dipakai pemerintah Republik Indonesia (RI) dalam perjanjian Linggarjati adalah mengalah untuk menang. Dikatakan mengalah, karena secara *de jure* wilayah RI yang diakui Belanda hanyalah Jawa, Madura, dan Sumatera. Keputusan ini bukan tanpa alasan, karena RI tidak

mempunyai posisi yang kuat dalam tawar-menawar atas pulau-pulau lainnya, meski disadari berlawanan dengan cita-cita proklamasi.

Sedangkan nilai kemenangan bagi RI dalam Linggarjati adalah diakuiinya secara *de jure* keberadaan dan kedaulatan de facto RI, meski hanya di sejumlah wilayah. Pengakuan itu berarti peningkatan status dan kedaulatan di atas kertas (konseptual) ke dalam status kedaulatan yang nyata (faktual). Dilihat dari sudut pandang tersebut, memang ada benarnya kalau dikatakan bahwa Linggarjati merupakan produk kompromi yang cukup brilian yang pernah ditempuh aliran perjuangan melalui perundingan (diplomasi). Tetapi, jika dipandang dari sudut aliran perjuangan bersenjata, makna atau nilainya mungkin lain lagi.

Memang suatu kenyataan sejarah, jika dalam masa perjuangan kemerdekaan terdapat benturan-benturan antara pejuang jalur diplomasi dengan militer. Namun tidak lantas dapat dikatakan, bahwa perjanjian Linggarjati merupakan kemenangan aliran yang menghendaki perjuangan melalui diplomasi. Karena sesungguhnya, dalam perjuangan, kedua aliran tersebut saling melengkapi.

Kalaupun dikatakan ada dua pilihan strategi dalam perjuangan yang dikatakan beliau sebagai “aliran,” maka jangan dilupakan adanya “aliran ketiga” yakni pilihan strategi yang memadukan perjuangan melalui jalur diplomasi dengan jalur perjuangan bersenjata. Dengan perpaduan itulah, para pejuang berhasil mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan.

Implikasi bagi Kalimantan

Meski dikatakan Linggarjati sebagai pilihan strategi dalam perjuangan diplomasi, namun dalam perkembangannya, titik tolak yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Karena adanya Agresi Militer Belanda dan Perjanjian Renville, wilayah kedaulatan RI malahan semakin menciut.

Perkembangan tersebut, ternyata mempunyai implikasi yang kuat terhadap situasi dan kondisi perjuangan gerilya di Kalimantan Selatan. Para pejuang mungkin beranggapan bahwa RI telah mengorbankan Kalimantan, karena dengan Linggarjati,

berarti pula secara *de jure* RI telah “melupakan” Kalimantan. Ini merupakan suatu realitas sejarah.

Sebagai konsekuensi dari Linggarjati, maka status Gubernur Borneo (Kalimantan) dihapus. Begitu pula Markas Besar ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan di Tuban dilikuidasi dan diubah statusnya menjadi Mobiele Brigade ALRI bermarkas di Madiun. Dengan demikian, terputuslah hubungan antara organisasi-organisasi perjuangan di Kalimantan Selatan dengan induknya di Jawa. Para pejuang, seperti yang tergabung dalam Batalyon Rahasia ALRI Divisi IV “A” dan MN 1001/MTKI harus berjuang sendiri, termasuk dalam pengadaan senjata.

Adanya informasi dari Jawa tentang dibubarkannya Markas Besar ALRI Divisi Pertahanan Kalimantan mendorong Hassan Basry selaku Pimpinan Umum bertindak segera dan menyatakan bahwa Batalyon ALRI Divisi IV “A” berdiri sendiri dan tidak terikat lagi dengan ALRI Divisi IV yang telah dilikuidasi.

Kesatuan ALRI Divisi IV “A” berupaya menyatukan semua gerak langkah perjuangan dengan cara mengkonsolidasikan semangat rakyat, merangkul organisasi kelaskaran di luar ALRI dan memperbaharui formasi yang ada. Mereka merubah nama Batalyon Rahasia ALRI Divisi IV “A” menjadi Markas Besar RX-8 SOPIK/ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan, seolah-olah mengambil alih kedudukan Markas Besar ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan yang telah dilikuidasi di Jawa.

Berbagai masalah yang dihadapi akibat likuidasi itu menimbulkan pendapat dan buah pikiran untuk memindahkan MPK ALRI Divisi IV ke Kalimantan. Apalagi dengan mengingat kondisi Batalyon ALRI Divisi IV “B” (Kaltim), “C” (Kalbar) dan “D” (Riau) yang juga telah bubar, maka Hassan Basry memutuskan bahwa ALRI Divisi IV “A” sudah tidak ada lagi dan SOPIK ALRI Divisi IV ditingkatkan statusnya menjadi sebuah divisi dengan nama MPK ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan dengan “Pimpinan Umum” Hassan Basry.

Sampai akhir 1948 upaya-upaya yang ditempuh ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan menunjukkan hasilnya. Daya tempur ALRI semakin meningkat, sehingga secara *de facto* para gerilyawan telah menguasai daerah Kalimantan Selatan minus kota-kota yang diduduki NICA.

Sebagai implikasi dan Perjanjian Linggarjati dan vakumnya pemerintahan sipil di daerah-daerah yang berhasil direbut dari tangan NICA, maka pada tanggal 17 Mei 1949, Hassan Basry, atas nama rakyat Indonesia di Kalimantan Selatan memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Gubernur Tentara ALRI, yang melingkungi seluruh daerah Kalimantan Selatan menjadi bagian dari RI. Proklamasi 17 Mei mempunyai makna yang sangat dalam, dan merupakan bukti sejarah akan kesetiaan dan kecintaan para pejuang dan rakyat Kalimantan Selatan terhadap RI, meskipun sebelumnya melalui Linggarjati, pemerintah RI pernah "melupakan" Kalimantan.

12

MIGRASI ORANG BANJAR KE PAMADAMAN

“Pamadaman” merupakan kosa kata bahasa Banjar yang artinya sama dengan “Perantauan”. Pamadaman berasal dari kata “madam” yang artinya pergi merantau atau melakukan migrasi terutama keluar Kalsel. Sejak akhir abad ke-19 atau awal-awal abad ke-20 banyak orang Banjar yang melakukan migrasi ke berbagai tempat di kepulauan Nusantara. Sehingga tak mengherankan orang Banjar kini banyak bermukim di Sapat dan Tembilahan (Indragiri Hilir Provinsi Riau), Bintan (Provinsi Kepri), Kuala Tungkal (Provinsi Jambi), Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai, Asahan (Provinsi Sumut), Kaltim, Kalteng, di pulau Jawa, pulau Lombok dan Bima (Nusa Tenggara Barat), Manado, Gorontalo, Kendari, Makasar, Maluku, dan lain sebagainya. Atau di daerah-daerah yang menjadi bagian negara Malaysia, seperti Parit Buntar di Perak, Tanjung Karang di Selangor dan Batu Pahat di Johor dan juga di negara Brunei Darussalam, Singapura, dan Pattani Thailand.

Fenomena migrasi yang dilakukan orang Banjar di akhir abad ke 19 dan awal abad ke 20 merupakan pola umum yang juga dilakukan oleh berbagai etnis di Nusantara. Migrasi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat itu disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor kondisi politik, ekonomi, keamanan, atau faktor tidak kondusifnya daerah asal mereka.

Faktor ekonomi seperti untuk mencari penghidupan yang lebih baik merupakan salah satu alasan mereka bermigrasi, misalnya yang dilakukan orang Banjar ketika bermigrasi ke Semenanjung Malaya sebagai buruh penyadap karet. Penyadapan getah karet dan perluasan lahan perkebunan karet tentu saja memerlukan tenaga kerja atau buruh harian. Dan tenaga itu didatangkan atau diperoleh dari orang-orang yang datang ke Semenanjung Malaya.

Orang-orang Banjar tidak segan bekerja di tempat yang jauh dari kampungnya. Walaupun mereka akan segera kembali

jika telah mendapat banyak uang atau keadaan di perantauan tidak menguntungkan lagi. Seperti ketika perkebunan tembakau Deli baru dibuka, banyak orang Banjar pergi kesana untuk membuka lahan dan membuat bangunan (L. Potter dalam Tundjung, 2008: 6).

Menurut Sartono Kartodirdjo (1975: 116-118), fenomena migrasi bukanlah semata-mata faktor ekonomi yang menjadi pertimbangan mereka, namun dikarenakan oleh faktor lain seperti faktor politik yang kadang-kadang membuat orang menentukan harus pindah ke daerah lain. Bambang Purwanto dalam A. Muthalib (2008:24) menyatakan bahwa ketika tekanan politik Belanda terhadap Banjarmasin dan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan semakin intensif, orang Bugis dan Banjar semakin banyak yang membuka daerah rawa-rawa di sepanjang pantai timur Sumatera.

Terkait dengan latar belakang migrasi orang Banjar, maka selain bertujuan untuk mencari penghidupan yang lebih baik (faktor ekonomi), juga untuk menghindari dari penindasan Pemerintah Hindia Belanda (faktor politik dan keamanan).

Kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Kresidenan Borneo Selatan (Kalimantan Selatan) di tahun 1920-an turut mendorong terjadinya migrasi orang Banjar. Kondisi itu terkait dengan dampak ekonomi dunia yang tengah dilanda malaise. Selain itu, adanya perlakuan diskriminasi Pemerintah Hindia Belanda terhadap pribumi mengakibatkan kehidupan masyarakat Banjar di bawah penguasaan Belanda juga sangat memprihatinkan.

Orang Belanda (termasuk orang Eropa lainnya) sebagai kelas tertinggi, memegang kekuasaan ekonomi dan politik. Pembangunan seperti di bidang pendidikan, tempat rekreasi, perumahan, bioskop, dan fasilitas penting lainnya adalah untuk kepentingan Pemerintah Hindia Belanda dan orang-orang Eropa. Hanya orang kulit putih atau yang dipersamakan yang boleh memasuki fasilitas penting tersebut, sedangkan Bumiputera adakalanya dilarang masuk karena ada tanda-tanda tertentu bertulisan larangan, seperti: "Verboden toegang voor Inlanders en Honden (dilarang masuk untuk orang bumiputera dan anjing" (Saleh, 1981-1982: 37).

Perlakuan diskriminasi sebenarnya tidak hanya

dikenakan antara golongan pribumi dengan orang Eropa atau Timur Asing, melainkan juga antara golongan pribumi muslim dengan pribumi penganut agama Kristen. Pada tahun 1920-an, guru-guru agama, guru-guru sekolah Islam, khatib, bilal dan kaum masjid dikenakan kewajiban oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk menjalankan *Ordonnantie Heeren Dienst* yang menyangkut erakan atau kerja rodi, sedangkan guru-guru agama Kristen, Penyebar Injil, dan Kepala Jemaat, dan Guru-guru Sekolah Zending justru dibebaskan dari kewajiban itu.

Diskriminasi atau pengklasifikasian status sosial yang terjadi di dalam masyarakat mengundang pertentangan sosial dan ini menyebabkan seringnya terjadi penindasan terhadap kaum yang lemah. Diskriminasi dan penindasan seperti itulah yang pada akhirnya menimbulkan kesengsaraan pada masyarakat bumiputera.

Terhadap pribumi pemerintah Hindia Belanda mengenakan berbagai pungutan seperti Pajak Pencabutan, Pajak Tanah, Pajak Kepala, Pajak Erakan (uang kepala), Bea Masuk, Pajak Penjualan dan berbagai pungutan resmi maupun tidak resmi. Selain itu, setiap orang, kecuali golongan pangreh praja, yang berumur antara 18-45 tahun dapat dikenakan kerja rodi (kerja erakan) yang sangat memberatkan rakyat yang kesemuanya untuk kepentingan Pemerintah Hindia Belanda.

Mengenai pajak erakan (uang kepala), misalnya: (1) Tiap 1 orang petani yang punya 1 bidang sawah dan 1 bidang ladang dalam setahun harus bayar pajak sawah-ladangnya, walaupun hasilnya sangat kurang. Sawah dikenakan wajib pungut sebesar “tujuh puluh lima sen” (f 0,75), dan pajak ladang wajib bayar “lima puluh sen” (f. 0,50); (2) Tiap 1 orang berusia lanjut 50 s.d. 55 tahun harus bayar wajib pajak kepala per tahun “lima puluh sen” (f. 0,50). Tiap 1 orang dewasa (kawin/belum) umur 18 tahun ke atas harus bayar wajib pajak seperti tersebut di atas. Meski umur muda akan tetapi jika akan melaksanakan perkawinan, dia wajib kena pungut pajak kepala (Wajidi, 2008: 18).

Kondisi sosial ekonomi yang berkaitan dengan rodi dan berbagai pajak dan pungutan, dampak depresi ekonomi dunia saat itu, dan ditambah dengan pendidikan yang kurang maju

menjadi dominan sifatnya antara tahun 1900 –1928 di Kalimantan Selatan. Kondisi demikian mengakibatkan keresahan yang bermuara kepada munculnya pemberontakan Guru Sanusi 1914-1918 dan pemberontakan Gusti Darmawi tahun 1927. Keadaan itu pula yang mengakibatkan banyak penduduk khususnya dari Hulu Sungai yang melakukan eksodus ke pesisir Timur Sumatera seperti Kuala Tungkal, Sapat, Tembilahan. Sampai tahun 1950 jumlah penduduk suku Banjar di daerah Sapat dan Tembilahan mencapai 250.000 orang (Saleh et al,1978/1979: 51).

Sumatera Utara merupakan salah satu daerah pamadaman yang cukup besar. Berdasarkan data yang diperoleh dari Ahmad Fauzi (2010:2) diperkirakan orang Banjar di Sumatera Utara saat ini berjumlah lebih kurang 180.000 orang dengan perincian kab. Langkat 70.000 orang, Deli Serdang 30.000 orang, Serdang Bedagai 50.000 orang, Asahan 20.000 orang, kabupaten/kota lainnya kurang lebih 10.000 orang.

Informasi lain sebagaimana disebutkan A. Muthalib (2008:26) bahwa orang Banjar yang telah bermukim di Indragiri Hilir pada tahun 1900 sekitar seribu jiwa. Lima belas tahun kemudian (1915) jumlah mereka meningkat drastis, yakni 18.798 jiwa. Kini, etnis Banjar di Indarigiri Hilir merupakan penduduk mayoritas yakni sebesar 72,8% (Mochtar Naim dalam A. Muthalib, 2008:27). Pada akhir perang Dunia I atau dekade kedua abad ke-20, jumlah mereka diperkirakan 20 ribu jiwa. Selain ke pesisir Sumatera, puluhan ribu penduduk Hulu Sungai juga pergi untuk menetap di Melaka (Sjamsuddin, 2001: 9). Mungkin yang dimaksud Sjamsuddin di Malaya, bukan di Melaka. Kalau di Melaka tidak ada orang Banjar seramai itu, kerana Melaka bukan tumpuan migrasi orang Banjar.

Menurut Tunku Shamsul Bahrin (1964) sebagaimana dikutip dari Mohamed Salleh Lamry (2010:4) bahwa berdasarkan sensus penduduk Semenanjung Malaya tahun 1911, orang Banjar di Malaya pada masa itu berjumlah 21.227 orang. Umumnya mereka bermukim di Perak, Selangor dan Johor. Pada tahun 1921 orang Banjar di Malaya meningkat hampir 80% menjadi 37.484 orang. Antara tahun 1921 hingga 1931 penduduk Banjar di Malaya bertambah 7.503 orang

menjadi 45.351 orang. Perak, Johor dan Selangor masih merupakan negeri di mana jumlah orang Banjar paling ramai. Dalam tiga negeri inilah tinggal 96% orang Banjar di Malaya.

Menurut sensus tahun 1930 di Semenanjung Malaya terdapat 45.382 orang Banjar dan pada tahun 1947 angka ini meningkat ke angka 62.356 orang (Dzul Karnain Asnawi, 2010: 6). Sedangkan menurut sensus di Malaya tahun 1931, orang Banjar kelahiran Hulu Sungai mencapai 45.433 jiwa. Sedangkan di Sumatera pada tahun yang sama 77.838 jiwa; tersebar di Riau, Jambi, Medan, dan pesisir utara lainnya. (Arbain, 2009:235).

Proses migrasi orang Banjar memang sudah terjadi pada abad ke-18 ketika Belanda melakukan campur tangan dalam perebutan tahta antara Pangeran Nata dan Pangeran Amir yang berujung kepada kekalahan Pangeran Amir dan akhirnya dibuang ke Ceylon (Sri Lanka). Untuk menghindari dari penangkapan dan hukuman dari pihak kolonial Belanda, maka pengikut Pangeran Amir melakukan eksodus ke berbagai tempat yang dirasa aman. Migrasi orang Banjar keluar Kalsel semakin banyak ketika terjadinya Perang Banjar yang berlangsung selama lebih dari 40 tahun (1859-1906). Pada masa perang ini, migrasi yang dilakukan orang Banjar lebih tepat jika disebut: “tajun” yakni keluar atau lari meninggalkan rumah, biasanya melalui pintu belakang, dan mungkin selamanya tidak akan kembali ke kampung halaman. Migrasi orang Banjar mencapai puncaknya pada dekade-dekade pertama abad ke-20, di saat Pemerintah Hindia Belanda telah semakin intens menancapkan kekuasaan dan menjalankan pemerintahan kolonial yang diskriminatif dan menindas kaum pribumi.

Catatan kependudukan tahun 1930 menunjukkan jumlah keseluruhan penduduk Benua Lima atau Hulu Sungai melebihi angka 500.000 jiwa. Dari rasio jenis kelamin yang berjumlah 91-92 laki-laki per 100 perempuan, menunjukkan bahwa laki-laki Banjar banyak meninggalkan kampung halaman (Potter, 2001: 401).

Migrasi orang Banjar ke berbagai tempat di kepulauan Nusantara juga didukung oleh kemampuan orang Banjar dalam memiliki dan menguasai teknologi pembuatan perahu (jukung)

dalam berbagai bentuk dan jenis keperluan baik untuk sungai, pantai dan lautan. Kemampuan itu dengan sendirinya menjadikan orang Banjar memiliki tradisi berlayar baik sebagai pelaut, nelayan, dan pedagang antar pulau (interensuler). Tak mengherankan jika pada masa Kerajaan Negara Dipa, Negara Daha, dan Kesultanan Banjar, jung-jung yang dibawa pedagang Banjar banyak berlabuh di berbagai bandar di pantai utara pulau Jawa.

Ketika Islam berkembang pesat di Kesultanan Banjar yang mengharuskan penganutnya untuk melakukan perjalanan haji ke Mekkah bagi yang mampu, maka kemampuan orang Banjar berlayar mengarungi samudera semakin terasah. Adalah hal biasa jika orang Banjar melakukan perjalanan ibadah haji ke Mekkah dengan menaiki kapal layar sendiri pulang pergi selama setahun lamanya. Kemampuan memiliki, menguasai teknologi perkapalan dan adanya tradisi berlayar dan berdagang antar pulau dengan perahu tradisional itulah yang menjadikan orang Banjar memiliki mobilitas tinggi, berlayar dari satu pulau ke pulau lain dan menyusuri sungai hingga jauh ke pedalaman untuk mencari tempat bermukim. Suatu hal yang tidak mungkin dilakukan jika hanya menumpang kapal uap milik maskapai Belanda yang hanya merapat di bandar besar saja.

Putusnya komunikasi antara orang Banjar banua dengan perantauan barangkali disebabkan karena semakin berkurangnya armada perahu-perahu tradisional Banjar yang melayari lautan karena semua kegiatan perdagangan diatur oleh Pemerintah Hindia Belanda, seiring dengan berhentinya perlawanan orang Banjar di awal abad ke-20 dan monopoli perdagangan Cina. Berbagai upaya untuk melawan pengaturan Belanda itu dan monopoli pedagang Cina, seperti yang dilakukan organisasi Sarekat Islam cabang Banjarmasin dengan mendirikan Sarekat Pelayaran sebagai upaya untuk memperlancar transportasi sungai yang merupakan jalur perdagangan penting di Kalimantan Selatan, namun agaknya usaha-usaha itu tidak mampu melawan monopoli perdagangan yang telah lama dikuasai orang-orang Cina yang telah lama mendapat perlakuan istimewa yang diterimanya dari pemerintah, di samping eksploitasi pemerintah kolonial sendiri di bidang ekonomi (Wajidi, 2007: 123).

Dengan semakin sedikitnya perahu-perahu Banjar yang melayari lautan, maka semakin jarang orang Banjar di perantauan atau sebaliknya untuk saling berkunjung. Akibatnya untuk waktu sekarang masing-masing pihak mengalami kesulitan untuk menelusuri kembali sanak keluarga keluarganya. Sebagian dari mereka ada yang masih bisa menjalin komunikasi dengan kerabatnya di Kalsel, karena kerabatnya di banua masih dikenali. Namun tidak sedikit pula yang putus sama sekali karena yang mereka ketahui hanyalah padatuan mereka berasal dari Kalsel (seperti dari Barabai, Kandangan, Alabio, Nagara, Amuntai, Kelua), namun dimana atau di kampung apa padatuan mereka dahulunya berada mereka tidak mengetahuinya.

SAKSI PATRIOTISME DI MUSEUM WASAKA

Museum Perjuangan Rakyat Kalimantan Selatan "Waja Sampai Kaputing" atau Museum Wasaka adalah salah satu museum yang ada di daerah ini yang sesuai dengan namanya secara khusus difungsikan untuk mengumpulkan atau menghimpun, merawat, menghubungkan, dan memamerkan benda-benda peninggalan sejarah, khususnya yang berkenaan dengan perjuangan rakyat daerah ini dalam merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan negara Republik Indonesia.

Museum tersebut terletak di jalan Kampung Kenanga Kelurahan Sungai Jingah Kota Banjarmasin, dan menempati sebuah bangunan bernilai sejarah yang telah dipugar berbentuk rumah Banjar Bubungan Tinggi menghadap sungai Martapura. Lokasinya mudah dijangkau melalui jalan darat dengan kendaraan roda empat atau roda dua. Perjalanan melalui sungai antara lain dapat ditempuh dengan taksi air. Jika bertolak dari dermaga di muka Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, diperlukan waktu setengah jam menuju lokasi.

Latar Belakang

Awal keberadaan museum ini sebenarnya dimulai sejak 1989 dan didirikan atas prakarsa Gubernur Kalimantan Selatan. Pada mulanya koleksinya direncanakan meliputi lima periode, yakni (1) Periode Perang Banjar, (2) Periode Perintis Kemerdekaan dan Zaman Jepang, (3) Periode Revolusi Fisik, (4) Periode Pengisian Kemerdekaan, dan (5) Periode Orde Baru.

Karena alasan tertentu, pengumpulan koleksinya tidak bisa dilaksanakan secara serentak, tetapi bertahap. Yang mula-mula dihimpun dan dipamerkan adalah benda-benda peninggalan sejarah yang berkaitan dengan periode revolusi fisik. Untuk kepentingan itulah dibentuk sebuah tim yang bertugas meneliti dan mengumpulkan atau menghimpun benda-benda dimaksud.

Upaya tersebut mendapat sambutan baik dari kalangan pejuang, budayawan, dan seniman, sehingga sampai dengan pembukaannya tanggal 9 November 1991 berhasil dikumpulkan sebanyak lebih kurang 77 buah koleksi yang semuanya dipamerkan dalam vitrin maupun panel. Walau demikian, benda-benda peninggalan revolusi fisik yang berhasil dikumpulkan sebagian besar baru berasal dari mantan anggota ALRI Divisi IV, terutama dari Markas Besar RX 8 (Kandangan), Markas Daerah atau Sektor Z 61 (Pagat Barabai), R 27 (Birayang Barabai), O ½ 17 (Tambarangan Rantau) dan BN 10 (Cerbon Marabahan). Dengan demikian ada beberapa markas daerah dan sektor kelompok gerilya ini yang belum sepenuhnya atau belum sama sekali dan akan terus diusahakan pengumpulan peninggalan sejarahnya, antara lain yang terdapat di Kabupaten Banjar, Kotamadya Banjarmasin, dan Kabupaten Kotabaru, serta daerah lainnya yang pada masa revolusi fisik juga memiliki sektor dan markas daerah.

Begitu pula ada beberapa kelompok gerilya lainnya yang pro Republik dan secara organisatoris pernah atau berada di luar ALRI Divisi IV yang belum dan juga akan diusahakan pengumpulan peninggalan sejarahnya, yakni antara lain berasal dari Tentara MN 1001/MTKI terutama yang bermarkas di Gambut Kabupaten Banjar, dan yang berasal dari Gerakan Revolusi Rakyat Indonesia yang beroperasi di daerah Barito, dan yang berasal dari Gerakan Tengkorak Putih yang bermarkas di Sungai Kudung, Kandangan maupun Kuin Muara Banjarmasin.

Kemungkinan yang perlu juga dikumpulkan peninggalan sejarah adalah yang berasal dari kelompok gerilya yang kontra Republik atau pro NICA, seperti yang berasal dari Tentara Kucing Hitam, Tentara Lawung, dan Barisan Parang Bungkul dari Partai Anti Indonesia Merdeka, serta peninggalan sejarah lainnya yang pernah digunakan oleh NICA beserta kaki tangannya dalam menancapkan kuku kekuasaannya di daerah ini.

Adanya kerjasama dengan para pelaku sejarah atau pejuang, budayawan dan seniman, atau siapa saja yang mengetahui dan memiliki benda-benda peninggalan sejarah, diharapkan di masa yang akan datang ke lokasi Museum Wasaka akan terus bertambah banyak dan koleksinya semakin lengkap sehingga melingkupi kelima periode yang telah direncanakan.



Museum Wasaka di Kampung Kenanga Kelurahan Sungai Jingah,
Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin

Koleksi Museum

Ada berbagai macam bentuk koleksi peninggalan revolusi fisik yang disimpan atau dipamerkan di dalam Museum Wasaka. Secara garis besar, koleksi yang ada dapat dikelompokkan, sebagai berikut:

Pertama, koleksi berupa foto atau lukisan, salinan dan bagan. Koleksi ini antara lain meliputi foto atau lukisan para gubernur yang pernah memimpin daerah ini ketika masih berupa Provinsi Kalimantan sampai dengan gubernur terakhir yang memimpin Provinsi Kalimantan Selatan sekarang. Di museum ini juga tersimpan lukisan Bapak Gerilya Kalimantan yakni Brigjen H.Hassan Basry, foto para pejuang ketika berada di pedalaman, foto bangunan bersejarah, lokasi pertempuran, dan makam pahlawan, serta foto yang menggambarkan proses menuju pertemuan di Munggu Raya (2 September 1949). Begitu pula terdapat salinan naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 yang hingga kini naskah aslinya belum ditemukan. Juga terdapat dua buah

bagan organisasi Batalyon Rahasia ALRI Divisi IV, serta daftar kode markas besar dan markas daerah perjuangannya.

Kedua, koleksi berupa peralatan atau perlengkapan yang pernah dipergunakan di beberapa sektor atau markas daerah. Koleksi ini antara lain meliputi alat-alat dapur umum seperti wancuh, panci, wajan, dan pakacauan. Mesin tik yang bermerk Royal, Smith Corona, Underwood dan tustel bermerek Billy Record, serta perlengkapan lainnya berupa sepeda, lampu petromak, sempoa, dan jam dinding.

Ketiga, koleksi berupa perlengkapan atau peralatan tempur yang pernah dipergunakan di berbagai pertempuran, yakni meliputi antara lain bambu runcing, bermacam tombak, keris, golok, pedang, pisau, senjata dum-dum, meriam, peluru, taji ayam, granat, pistol dan sejenisnya.

Juga terdapat koleksi berupa topi baja, baju atau pakaian, tempur, baju wafak, laung berajah, berbagai macam jimat, dan bendera merah putih.

Keempat, koleksi berupa buku, dokumen dan surat kabar yang berkenaan dengan revolusi fisik di daerah ini. Koleksi berupa buku sebagian besar ditulis oleh pelaku sejarahnya sendiri, sehingga lebih bersifat catatan pribadi atau memoar, sedangkan yang berupa dokumen sebagian besar berasal dari ALRI Divisi IV dan Divisi Lambung Mangkurat. Dan yang berupa surat kabar, sebagian besar adalah berupa foto kopi surat kabar Terompet Rakyat dan salinan surat kabar Kalimantan Berjuang.

Saksi Patriotisme

Kita mengenal sebuah ungkapan "belajarlah dari sejarah". Maksudnya kita harus belajar dari peristiwa atau pengalaman orang dan bangsa ini di masa lampau, agar lebih bijak dalam melangkah ke masa depan. Proses pembelajaran tersebut dilakukan dengan jalan memahami dan menghayati segala aspek yang berkenaan dengan kelampauan tersebut, yaitu menggali, melestarikan, dan mengembangkan nilai-nilai yang terkandung di dalam benda peninggalan sejarahnya.

Koleksi yang terdapat di Museum Wasaka, merupakan sebuah saksi yang dapat memberikan pelajaran kepada kita, bahwa tidak ada cita-cita yang dapat diperoleh tanpa perjuangan dan pengorbanan yang nyata.

Sejarah perjuangan rakyat Kalimantan Selatan dalam menegakkan kemerdekaan Indonesia sebagaimana tercermin pada koleksi Museum Wasaka, membuktikan bahwa tidak sedikit pengorbanan yang telah dipersembahkan oleh putera-putera terbaik bangsa. Mereka yang hanya dengan perlengkapan dan peralatan sangat sederhana dan bahkan apa adanya, mampu merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di daerah ini.

Semuanya itu dapat terjadi karena mereka memiliki modal perjuangan yang sangat tinggi, yakni semangat kemerdekaan, nasionalisme dan patriotisme yang membara. Semangat tersebut telah mendorong mereka untuk berjuang, dan rela mengorbankan segenap jiwa dan raga, harta benda, darah dan tetesan air mata, melawan kolonialisme dan imperialisme atau kekuatan-kekuatan lainnya yang menghalangi usaha mereka mencapai tujuan yang mulia, yakni merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan negara Republik Indonesia.

14

STUDI PRA PEMUGARAN SEPERTI APA?

Upaya pelestarian peninggalan sejarah dan purbakala termasuk di dalamnya kegiatan pemugaran dan pemeliharaan peninggalan sejarah dan purbakala yang berkategori benda cagar budaya tidak terlepas dari kebijaksanaan pembangunan nasional di bidang kebudayaan. Hal ini dapat dipahami, karena peninggalan sejarah dan purbakala merupakan hasil budaya bangsa yang mengandung nilai-nilai peradaban, kebesaran dan perjuangan di masa lalu.

Apabila ditinjau dari masa kini, maka benda cagar budaya merupakan warisan budaya bangsa yang tiada ternilai harganya, terutama bagi bangsa yang sedang membangun.

Bangsa Indonesia mewarisi banyak peninggalan sejarah dan purbakala yang ribuan jumlahnya, dan tersebar di pelosok Tanah Air.

Secara alamiah, peninggalan sejarah dan purbakala tersebut mengalami siklus menuju kerusakan, kehancuran atau kepunahannya dengan kadar berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungannya.

Eksistensi benda cagar budaya sangat rawan terhadap segala macam ancaman, baik oleh faktor hayati maupun non hayati dan akibat perbuatan destruktif tangan-tangan manusia. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk melestarikannya adalah melalui kegiatan pemugaran.

Secara kuantitatif maupun kualitatif telah banyak usaha yang dilakukan untuk melindungi dan melestarikan benda cagar budaya bergerak maupun yang tidak bergerak yang ada di Kalimantan Selatan. Berbagai bangunan yang rusak maupun yang terpendam dapat diwujudkan kembali walaupun tidak semuanya utuh kembali seperti semula seperti Komplek Makam Sultan Suriansyah di Kuin Utara Banjarmasin, Candi Agung Amuntai, Rumah Adat Banjar (Bubungan Tinggi dan Gajah Baliku) di Teluk Selong Martapura, Rumah Bubungan Tinggi di Habirau Nagara,

Masjid Su'ada di Wasah Hilir Kandangan, dan Masjid Jami (Basar) di Pandulangan Alabio, Masjid Tua di Banua Halat Kabupaten Tapin, Rumah Perjuangan di Durian Rabung Kandangan, dan lain sebagainya melalui serangkaian tindakan penyelamatan seperti pemugaran (restorasi), penggalian arkeologi (ekskavasi), pengamanan (konservasi), dan penyimpanan remain-remain atau benda cagar budaya bergerak lainnya di dalam museum.

Pemugaran

Sejauh ini belum ada kesatuan pengertian mengenai istilah pemugaran peninggalan sejarah dan purbakala. Namun yang jelas pemugaran menurut pengertian teknis arkeologi tidak identik dengan pemugaran menurut pengertian umum yakni memperbaiki dan memperbaharui.

Dalam pengertian teknis arkeologis pemugaran merupakan salah satu upaya pelestarian benda cagar budaya atas dasar konsep sejauh mungkin dan sedapat mungkin mengembalikan objek bangunan kepada keadaan semula baik bentuknya, materi (bahan bangunan), warna, hiasan, tata letak dan teknis mengerjakannya atas dasar data historis, arkeologi dan arsitektur yang diperoleh melalui studi kelayakan arkeologi.

Ditinjau dari tujuannya pemugaran dilaksanakan dengan maksud, *pertama*, pemugaran bertujuan untuk memelihara dan menumbuhkan nilai-nilai historis dan estetis suatu peninggalan sejarah dan purbakala berdasarkan bahan-bahan dan sumber-sumber yang otentik. *Kedua*, pemugaran adalah untuk mengembalikan kepada bentuk aslinya. *Ketiga*, pemugaran peninggalan sejarah dan purbakala merupakan upaya pelestarian warisan budaya bangsa dan agar warisan tersebut dapat dihayati dan disaksikan oleh generasi yang akan datang.

Dengan demikian, pekerjaan pemugaran membutuhkan ketekunan, kesabaran dan ketelitian serta tanggung jawab ilmiah. Kesalahan dan penyimpangan sekecil apa pun yang terjadi dalam suatu pemugaran berarti akan mengacaukan, memutuskan dan menghilangkan data sejarah atau mata rantai suatu kebudayaan.

Tanggung jawab ilmiah dimaksud harus dilandasi oleh pengetahuan yang memadai, kejujuran yang berkaitan dengan kemurnian bahan-bahan bangunan dan kebenaran bentuk asli setiap unsur bangunan.

Tidak dibenarkan mengubah bentuk, warna dan hiasan setiap elemen bangunan yang ada dengan cara dan alasan apa pun.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas membawa kepada suatu kesimpulan yang pada prinsipnya bahwa dalam pemugaran satu atau kelompok bangunan selain dituntut untuk dapat mengembalikan bentuk aslinya, memperkuat dan mempertahankan kelestariannya, juga dituntut adanya penelitian, sebelum, sedang dan sesudah pemugaran.

Dengan kata lain, sebelum (pra) pemugaran dilaksanakan, mutlak dilakukan studi yang mendalam agar hasilnya tidak menyimpang dari ketentuan teknis arkeologi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kegiatan yang dimaksud meliputi studi pra pemugaran yang antara lain meliputi studi kelayakan arkeologi, studi teknis arkeologi serta dokumentasi.

Pra Pemugaran

Sudah menjadi kebijakan Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Direktorat Jenderal Kebudayaan bahwa setiap bangunan cagar budaya atau situs yang akan dipugar harus terlebih dahulu dilaksanakan Studi Pra Pemugaran yakni Studi Kelayakan Arkeologi dengan tujuan untuk mengumpulkan data historis, arkeologis dan arsitektur serta data lainnya yang relevan seperti data keterawatan, lingkungan dan budaya sehingga dapat diketahui dan dapat diambil kebijakan tentang layak atau tidaknya bangunan tersebut dipugar.

Dalam segi perencanaan naskah hasil studi kelayakan berisi tentang kelayakan arkeologi dan kelestarian benda cagar budaya atau situs, serta uraian tentang pedoman pelaksanaan penanganan yang meliputi: jenis kegiatan, teknis pemugaran jadwal, rencana anggaran dan biaya sebagai rekomendasi mengenai studi lanjutan dan permasalahan yang ada.

Naskah studi kelayakan harus dilengkapi dengan foto, gambar, data, pustaka, daftar informan, surat keputusan, surat pernyataan dan dokumen lain yang ada.

Apabila dalam studi kelayakan ini menyimpulkan bahwa objek yang diteliti berkategori sebagai benda cagar budaya sesuai dengan UURI Nomor 5 Tahun 1992 dan layak untuk dipugar, maka kegiatan selanjutnya dapat dilanjutkan pada penelitian berikutnya.

Sebagai kelanjutan dari studi kelayakan adalah studi teknis arkeologi. Kegiatan ini perlu dilakukan, terutama untuk sasaran pemugaran yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu satu atau dua tahun.

Studi teknis ini merupakan suatu kegiatan analisis permasalahan pelestarian benda cagar budaya/situs untuk menyusun rencana teknis penanganan multidisipliner yang komprehensif.

Studi ini bersifat diagnostik yang mencakup analisis faktor penyebab dan proses terjadinya suatu benda cagar budaya/situs yang meliputi aspek struktur, konstruksi dan arsitektur serta keawetan bahan. Studi ini juga bersifat sinkronik dan holistik dalam penyusunan rencana penanganannya yang meliputi aspek teknis administratif dan jaringan kerja. Studi teknis diklasifikasikan sebagai studi prapemugaran, namun dalam pelaksanaannya juga dapat dilaksanakan berdasarkan atas permasalahan teknik yang muncul saat pemugaran berlangsung.

Penelitian Arkeologi

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari data arkeologi menyangkut sisa-sisa bangunan peninggalan sejarah dan purbakala termasuk benda-benda atau temuan yang belum terungkapkan selama penelitian terdahulu.

Metode yang dipergunakan adalah penggalian (ekskavasi) dengan teknik penelusuran terhadap struktur suatu bangunan/dasar bangunan yang berada atau tertimbun di dalam tanah.

Perlunya dilakukan penggalian, karena atas pertimbangan bahwa petunjuk yang lebih berharga dan lebih dipercaya adalah peninggalan-peninggalan atau sisa bangunan yang terdapat di dalam tanah dan belum pernah terjamah oleh tangan manusia.

Apalagi jika di antara peninggalan-peninggalan tersebut dapat ditemukan benda kuno berupa prasasti yang memberi petunjuk mengenai tujuan, umur dan bilamana bangunan itu dibuat.

Kegiatan penggalian dalam rangka penelitian arkeologi dapat dilakukan secara berkelanjutan setelah kegiatan studi kelayakan dan studi teknis atau dilakukan sekaligus dilihat dari kondisi dan urgensinya.

Dari hasil penggalian akan diketahui mengenai keberadaan suatu bangunan, bentuk dan besarnya serta kedudukan asal dalam kaitannya dengan bangunan yang ada di atas sekarang. Temuan ini sangat berarti bagi ilmu pengetahuan, sejarah dan bahkan sering menjadi kunci dalam merekonstruksi suatu bangunan.

KENDALA DAN PELUANG PELESTARIAN RUMAH ADAT BANJAR

Kalimantan Selatan, seperti juga provinsi lainnya, sebenarnya mempunyai bentangan sejarah yang penuh dengan berbagai peristiwa berskala besar maupun kecil, dari periode klasik, Islam, kolonial, sampai periode kontemporer, namun, hanya sedikit peninggalan sejarahnya terutama yang berbentuk bangunan yang dapat bertahan hingga sekarang ini, yang dapat digunakan sebagai sumber pembuktian tentang keberadaan maupun ketidakberadaan seputar peristiwa tersebut.

Dalam sudut pandang pelestarian, peninggalan sejarah itu mempunyai dua kategori, yakni peninggalan sejarah yang dikategorikan sebagai benda cagar budaya, dan peninggalan sejarah yang bukan termasuk benda cagar budaya.

Pada dasarnya benda yang berkategori benda cagar budaya merupakan peninggalan sejarah yang dapat digunakan sebagai sarana bagi pemahaman sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta untuk pemanfaatan lainnya dalam rangka kepentingan nasional.

Kaitannya dengan sejarah, benda cagar budaya merupakan salah satu sumber atau jejak sejarah yang dapat digunakan untuk merekonstruksi peristiwa masa lampau, memupuk rasa kebanggaan dan memperkokoh jati diri bangsa.

Mengingat pentingnya benda cagar budaya, maka segala perusakan, pemusnahan, dan sejenisnya, dengan sendirinya akan mengaburkan nilai dan menghapuskan data ilmiahnya guna kepentingan dimaksud. Oleh karena itu, benda cagar budaya dan situs, serta lingkungannya harus dilindungi dan dilestarikan dari ancaman kerusakan dan kepunahan.

Memang pada dasarnya peninggalan sejarah hanya mampu memberikan sedikit keterangan tentang peristiwa yang sebenarnya, sehingga semakin rusak atau musnahnya benda-benda peninggalan sejarah maka makin sedikit pula keterangan

yang dapat diperoleh, dan apabila tidak didokumentasikan, maka sejarahnya akan kabur atau dilupakan oleh generasi mendatang.

Di antara bangunan peninggalan sejarah di Kalimantan Selatan adalah berupa rumah adat/tradisi Banjar dalam berbagai tipe yang dibedakan terutama melalui bentuk atau konstruksi atapnya, seperti Rumah Bubungan Tinggi, Gajah Baliku, Gajah Manyusu, Palimasan, Palimbangan, Balai Laki, Balai, Bini, Tadah Alas, Cacak Burung/Anjung Surung, Rumah Gudang (Joglo) dan Lanting. Para budayawan, memang berbeda pendapat tentang tipe-tipe rumah Banjar, ada yang mengelompokkan dalam 11 tipe sebagaimana tersebut di atas (Syamsiar Seman), ada yang hanya 10 tipe yakni minus lanting (M. Idwar Saleh), atau ada yang hanya 7 tipe yakni minus Tadah Alas, Cacak Burung/Anjung Surung, Joglo, dan Lanting (Amir Hasan Bondan).

Sekitar tiga puluh tahun yang lalu, hampir tiap kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan masih terdapat rumah adat/tradisi Banjar dalam berbagai tipe. Namun seiring dengan perjalanan waktu dan pesatnya pembangunan dewasa ini, semakin banyak rumah Banjar yang rusak atau bahkan punah sama sekali karena “dikalahkan” bangunan-bangunan baru yang terus bermunculan, seperti perumahan, perkantoran, jalan dan sejenisnya atau lapuk dan hancur “dimakan” usia.

Di antara rumah Banjar yang berhasil diselamatkan melalui pemugaran, antara lain Rumah Bubungan Tinggi dan Gajah Baliku di Teluk Selong Kabupaten Banjar, Rumah Bubungan Tinggi di Habirau Negara. Selebihnya banyak yang dibiarkan apa adanya bahkan tidak terawat oleh pemiliknya.

Di Banjarmasin, tepatnya di Jalan Veteran, dalam beberapa tahun terakhir ini banyak rumah banjar tipe Balai Laki yang kebetulan saja dimiliki oleh etnis Tionghoa. Karena pemiliknya berduit, maka oleh pemilik berduit rumah Banjar itu direnovasi ke bentuk baru atau dihancurkan sama sekali untuk dibangun berbagai rumah toko. Adanya renovasi ke bentuk bangunan baru, maka simbol-simbol arsitektur budaya Banjar seperti konstruksi bangunan, ragam hias, dan nilai-nilai filosofi yang dikandungnya semakin lama semakin hilang.

Kendala Pelestarian

Dalam realita empirik, ada banyak kendala yang menghambat pelestarian peninggalan sejarah yang berkategori benda cagar budaya di Kalimantan Selatan. Hal tersebut terbukti dengan semakin rusaknya atau punahnya beberapa benda cagar budaya yang pernah ada di sekitar kita oleh perbuatan-perbuatan yang secara langsung maupun tidak langsung telah merusak atau menyebabkan punahnya benda cagar budaya tersebut.

Secara umum, penyebab rusak atau punahnya benda cagar budaya, dapat digolongkan ke dalam tiga faktor. Pertama, faktor manusia (vandalisme). Manusia merupakan ancaman yang paling besar terhadap benda cagar budaya, termasuk rumah Banjar. Disadari atau tidak seringkali terjadi kasus seperti penggusuran, perusakan, renovasi bentuk atau penghancuran benda cagar budaya, situs, dan lingkungannya. Salah satu penyebab musnahnya bangunan rumah Banjar misalnya adalah adanya renovasi bangunan ke bentuk baru. Atau, rusaknya Benteng Tabanio di Kabupaten Tanah Laut, karena bahan bangunannya yang terdiri dari batu dan bata digunakan oleh penduduk setempat sebagai alas atau pondasi rumah. Kini, benteng tersebut tinggal pondasi dan semakin terdesak oleh pemukiman penduduk.

Kedua, faktor alami, yakni menyangkut geotopografi, iklim atau bencana alam, seperti kebakaran, tanah longsor, dan sejenisnya. Berkenaan dengan geotopografi, kondisi tanah di Kalimantan Selatan sebagiannya relatif tidak stabil, yakni tanah gambut dan rawa monoton dengan tingkat keasaman yang cukup tinggi, sehingga benda cagar budaya yang ada di atasnya mudah mengalami kerusakan. Di tambah dengan adanya tekanan bobot, maka semakin lama pondasinya semakin melesak, miring, retak, pecah dan terpendam di dalam tanah. Hal tersebut dapat dilihat pada bangunan Komplek Makam Sultan Suriansyah desa Kuin Banjarmasin, Candi Agung di Amuntai, dan Candi Laras di Margasari.

Suhu dan kelembaban juga sangat mempengaruhi. Daerah yang mempunyai rawa biasanya kelembabannya cukup tinggi dan adanya pergantian suhu seperti dingin (hujan) dan panas akan menyebabkan timbulnya korosi atau pelapukan pada material benda cagar budaya kita yang sebagian besar terbuat dari kayu, seperti halnya rumah Banjar.

Ketiga, faktor hayati, yakni perusakan oleh hewan dan tumbuhan dan terutama mikroorganisme yang pertumbuhannya dipacu oleh adanya kelembaban yang tinggi. Kerusakan dapat terjadi karena material benda, cagar budaya dimakan rayap, ditumbuhi cendawan dan pepohon yang tumbuh di atasnya.

Keempat, meski terdapat undang-undang yang mengatur benda peninggalan sejarah dan purbakala yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (kini telah diubah menjadi UU No. 11 tahun 2010), namun pada kenyataannya produk hukum itu belum sepenuhnya efektif untuk melindungi benda peninggalan sejarah dari kerusakan atau kehancuran. Beberapa alasan menjadi penyebab seperti kurang efektifnya pengawasan dan tindakan yang diberikan aparat, kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang perlunya pelestarian benda cagar budaya.

Peluang

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa seiring dengan semakin punahnya rumah adat/tradisi Banjar, baik karena lapuk dimakan usia atau karena renovasi ke bentuk bangunan baru, maka simbol-simbol arsitektur budaya Banjar seperti konstruksi bangunan, ragam hias, dan nilai-nilai filosofi yang di kandunginya semakin lama semakin hilang. Punahnya rumah Banjar akan berakibat hilangnya salah satu identitas etnis Banjar di Kalimantan Selatan.

Ketidaktahuan masyarakat terhadap rumah Banjar dalam berbagai tipe merupakan salah satu bias dari ketidakpedulian terhadap keberadaan rumah Banjar. Banyak yang mengira, bahwa rumah Banjar adalah rumah Bubungan Tinggi, padahal terdapat rumah Banjar tipe lainnya. Belum lagi menyangkut kemampuan mengidentifikasi perbedaan rumah Banjar tipe yang satu dengan tipe lainnya.

Ada beberapa cara agar rumah Banjar tetap lestari, seperti melakukan restorasi (pemugaran) terhadap rumah-rumah adat Banjar yang mengalami kerusakan, atau mengadopsi simbol-simbol arsitektur budaya rumah Banjar, misalnya dalam pembangunan sarana publik di Kalimantan Selatan.

Sayangnya, pembangunan sarana publik sekarang ini kurang mengadopsi arsitektur budaya Banjar, baik pada struktur

bangunan maupun ragam hiasnya. Bahkan yang terjadi adalah semakin meningkatnya distorsi identitas, yakni semakin ditinggalkannya identitas kedaerahan atau semakin menguatnya unsur arsitektur budaya luar pada bangunan sarana publik.

Arsitektur merupakan suatu karya budaya yang dapat dijadikan petunjuk bagi perkembangan budaya suatu bangsa atau etnis. Manakala unsur budaya luar semakin dominan dalam sebuah wilayah teritorial dan kultural sebuah etnik, maka yang terjadi adalah dominasi budaya yang memarginalkan budaya lokal. Jika hal ini terus dibiarkan maka yang terjadi adalah “malapetaka budaya” yakni hilangnya salah satu identitas budaya Banjar yang berakibat kepada munculnya suara-suara ketidakpuasan terhadap hegemoni etnis tertentu dengan segala kemungkinan yang diakibatkannya.

Sudah saatnya, hegemoni budaya luar dihilangkan, di antaranyanya adalah dengan revitalisasi simbol-simbol budaya Banjar dalam pembangunan sarana publik. Memang, tidak mesti bangunan sarana publik mengadopsi secara utuh bangunan rumah Banjar Bubungan Tinggi, Gajah Baliku, Gajah Manyusu, Balai Laki, Balai Bini, dan sebagainya, akan tetapi, minimal pada bagian-bagian tertentu “dibumbui” dengan ornamentasi, seperti bubungan, ukiran, pilis, jamang, dan sebagainya.

Secara umum kendala dalam revitalisasi simbol-simbol budaya rumah Banjar adalah: (1) Besarnya biaya pembangunan sarana publik jika secara utuh mengadopsi bentuk stuktur, ragam hias, dan bahan bangunan rumah Banjar, khususnya jika memakai bahan baku, ukiran, sirap kayu ulin yang kini langka dan harganya semakin mahal; (2) Penerapan rumah adat Banjar seperti Bubungan Tinggi pada bangunan sarana publik bercorak modern, di beberapa kasus kurang fungsional. Hal ini terjadi karena desain bangunan bercorak modern bukan hanya mengacu kepada kultur estetis, teknis, dan material, tetapi juga tuntutan kemajuan zaman, perkembangan sosial, dan teknologi; (3) Kurangnya pengetahuan konsultan, kontraktor atau pengambil kebijakan tentang ragam simbol-simbol arsitektur budaya Banjar yang dapat diaplikasikan dalam pembangunan sarana publik; (4) Kurangnya dukungan pemerintah, seperti tidak adanya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur penggunaan simbol-simbol budaya Banjar dalam pembangunan sarana publik.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, tindakan pendahuluan yang diperlukan untuk itu adalah melakukan kajian tentang revitalisasi simbol-simbol arsitektur budaya rumah Banjar dalam kebijakan sarana publik di Kalimantan Selatan. Melalui kajian tersebut diharapkan hasil berupa: (1) gambaran tentang latar belakang terbentuknya rumah adat Banjar beserta masyarakat pendukungnya di Kalimantan Selatan; (2) bahan rujukan dalam pembangunan sarana publik yang mengacu kepada pemanfaatan simbol-simbol arsitektur budaya Banjar; (3) bagi pemerintah daerah, adanya kemungkinan hasil penelitian nantinya memberikan rekomendasi kelayakan perlunya Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan Simbol-simbol Arsitektur Budaya Banjar dalam Pembangunan sarana Publik di Kalimantan Selatan.

Upaya lainnya yang dapat ditempuh dalam pelestarian rumah Banjar adalah dengan melakukan identifikasi dan dokumentasi rumah Banjar dalam berbagai tipe di Kalimantan Selatan. Kegiatan ini dapat dipandang sebagai sebuah keperluan mendesak, karena dilatarbelakangi oleh banyaknya rumah Banjar di Kalimantan Selatan yang rusak dan musnah karena faktor usia atau dirobohkan untuk kepentingan pembangunan rumah baru atau rumah toko (ruko) tanpa sempat didokumentasikan.

Selain alternatif di atas, dan untuk mengenalkan rumah Banjar dalam berbagai tipe dengan cara yang lebih mudah adalah dengan melakukan pembangunan miniatur rumah-rumah Banjar. Maksudnya adalah menghimpun rumah Banjar berbagai tipe dalam bentuk mini seperti Rumah Bubungan Tinggi, Gajah Baliku, Gajah Manyusu, Palimasan, Palimbangan, Balai Laki, Balai Bini, dan Tadah Alas, Rumah Gudang (Joglo), dan Lanting ditambah masjid berkonstruksi atap tumpang dalam sebuah lokasi. Katakanlah semacam bentuk Taman Mini Indonesia Indah, namun miniatur di sini adalah "Taman Miniatur Rumah Banjar". Misalnya berlokasi di desa Sungai Jingah, Banjarmasin. Atau di tempat lain, dengan terlebih dahulu dilakukan kajian untuk menentukan lokasinya.

Dalam Taman Miniatur Rumah Banjar itu, aspek kultur estetis, teknis, dan material rumah dan lingkungan rumah Banjar akan disesuaikan dengan kondisi alam Kalimantan Selatan, berupa rawa dan pegunungan. Begitupula, di lokasi itu akan ditanami berbagai tanaman buah langka Kalimantan Selatan,

seperti kasturi, rawa-rawa, kulipisan, asam tandui, binjai, hampalam, hambawang, maritam, gitaan, mundar, kapul, bangkinang (kunghit), kuranji, sangkuang, tarap, kalangkala, rambai, rukam, papakin, lahung, gayam, dan sebagainya. Di taman mini itu, juga akan disajikan berbagai pagelaran khas budaya Banjar seperti tarian, wayang gung, wayang kulit Banjar, mamanda, madihin, balamut, musik panting, dan kuda gepang.

Banyak manfaat yang dapat diperoleh jika Taman Miniatur Rumah Banjar dapat diwujudkan, misalnya sebagai objek wisata dan pendidikan yang bernuansa budaya lokal. Di taman tersebut, pengunjung dapat menghibur diri dengan pagelaran seni budaya Banjar yang ditampilkan, dapat pula mengenal rumah Banjar dalam berbagai tipe, dan mengenal pula jenis tumbuhan dan buah langka Kalimantan Selatan.

DARI BANJARMASIN KE NUSAKAMBANGAN

Meski sudah sangat lama berdiri, pamor Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan meningkat akhir-akhir ini. Tiada lain karena Nusakambangan menjadi penampungan para terpidana kelas berat kasus korupsi milyaran rupiah, terpidana mati karena kasus pembunuhan, narkoba, dan terorisme. Katakanlah orang-orang ternama seperti Beddu Amang, Bob Hasan, atau Tommy Soeharto yang kini bebas pernah menjadi penghuninya. Terpidana mati teror Bom Bali I seperti Imam Samudera, Amrozi, dan Ali Ghufron juga kini meringkuk di penjara Nusakambangan menunggu detik-detik eksekusi mati yang akan menghampiri.

Salah satu harian lokal di Kalimantan Selatan yakni Banjarmasin Post (28/11/2007) pernah memuat berita tentang kaburnya salah seorang warga Kalimantan Selatan terpidana mati kasus pembunuhan, sebut saja namanya Arul (nama samaran) dari Lapas Nusakambangan yang selama ini dikenal ketat pengamanannya.

Aksi Arul menjadikan dirinya menjadi orang yang paling dicari polisi dan menambah daftar panjang orang-orang Kalimantan Selatan yang pernah mendekam di penjara itu sejak zaman penjajahan Belanda sampai sekarang ini. Perbedaannya adalah jika Arul adalah narapidana kasus pembunuhan, sedangkan pada zaman Belanda dahulu umumnya adalah para pejuang kemerdekaan; musuh bagi pemerintah Hindia Belanda maupun musuh bagi NICA.

Lapas di Nusakambangan memang ada yang didirikan sejak zaman Belanda. Selain disebut penjara, kala itu lebih populer dengan sebutan bui. Misalnya Lapas Permisian (dibangun 1908), Lapas Batu (1925), Lapas Besi (1929), disamping lapas lainnya yang dibangun tahun 1950.

Penjara Banjarmasin

Apa yang diberitakan Banjarmasin Post tentang Lapas Nusakambangan benar adanya, karena banyak saksi para pejuang kemerdekaan dari Kalimantan Selatan yang merasakan penjara itu. Mereka yang dianggap musuh negara dan diadili oleh pengadilan kolonial, kalau tidak ditahan di penjara Kandangan atau Banjarmasin sampai masa hukuman selesai, banyak pula setelah keluar dari sel dikirim kembali ke penjara Sukamiskin, Jawa Barat atau Nusakambangan, Jawa Tengah. Atau ke penjara besar lainnya di Jawa seperti penjara Kalisosok di Surabaya atau penjara Cipinang di Jakarta.

Perlakuan sipir di penjara Kandangan atau penjara Banjarmasin tak kalah kejamnya dibanding Nusakambangan. Di penjara lumrah saja mereka disiksa, dipukul, ditendang, dan bahkan distrom dengan listrik sampai cacat tubuhnya, sebagaimana dialami Aluh Idut, seorang pejuang wanita di penjara Kandangan.

Penjara penjara Banjarmasin tak kalah seramnya. Di penjara yang bekas lokasinya sekarang ini berdiri Kantor Pos Besar Banjarmasin, di tahun 1946-1947 penuh sesak dengan tawanan, yakni ketika Belanda melakukan operasi penangkapan besar-besaran terhadap pejuang kemerdekaan. Mereka yang mengalami mengatakan hanya berdiri, dan sukar bebas bernapas dan bahkan kelaparan karena makanan seringkali diberikan satu kali sehari dengan porsi sepiring dibagi empat, sehingga kulit pisang yang dilempar penjaga pun menjadi santapan dan rebutan. Di sini terdapat pula kamar tahanan, yang disebut “Kandang Kawat” tempat yang istimewa untuk tokoh-tokoh kriminal (pencuri dan copet), tempat mana yang berukuran 2 x 2 meter dihuni oleh tidak kurang 15 orang, dimana buang hajat di situ juga. Jika hendak tidur atau berebah harus bergantian duduk.

Selain penjara Banjarmasin, terdapat pula penjara yang berlokasi di lapangan terbang Ulin (bukan Bandara Syamsuddin Noor sekarang). Pada masa pendudukan Jepang, penjara di lapangan Ulin yang berada sekitar 28 km dari Banjarmasin merupakan tempat penjagalan kepala-kepala manusia — terutama terhadap komplotan Gubernur Dr. Hago yang ingin merobohkan kekuasaan Jepang— yang mana telah didapati 185 buah tengkorak, 30 orang mati karena disiksa, 26 orang lagi

termasuk 5 orang perempuan dan 11 orang pegawai Binnenlands Bestuur yang dilakukan Jepang pada tanggal 20 Desember 1943.

Penjara Nusakambangan

Pada umumnya pejuang kemerdekaan asal Kalimantan Selatan yang dipenjarakan di Nusakambangan terjadi pada masa revolusi fisik 1945-1949. Sedangkan untuk masa sebelumnya yakni zaman pergerakan sampai tahun 1942 lebih banyak dikirim ke penjara Sukamiskin, Jawa Barat. Di antaranya yang pernah mendekam di penjara Sukamiskin adalah tokoh Parindra cabang Kandangan, H. Ahmad Barmawi Thaib yang dituduh persdelict. Begitupula H. Amir, H. Morhan, dan Abdulhamidhan, ketiganya tokoh Parindra cabang Amuntai, juga merasakan badan terkurung di sana setelah sebelumnya menjalani kerja paksa di Ampah, bahkan Edwar Sandan (Kepala sekolah Vervolgschool di Amuntai/Tabalong) meninggal saat mendekam di penjara Sukamiskin.

Ketika pemberontakan 9 November 1945 meletus di Banjarmasin yang diikuti peristiwa serupa di Marabahan 5 Desember 1945, di Barabai 19-20 Maret 1946 dan daerah-daerah lainnya di Kalimantan Selatan, Belanda membalasnya dengan melakukan penangkapan besar-besar terhadap para pejuang atau rakyat yang dicurigai.

Penjara pun penuh sesak. Tahanan yang kemudian diadili ada yang mendapat vonis bebas, namun lebih banyak yang mendapat vonis penjara selama 3 s.d. 18 tahun. Di antara mereka M. Nawawie Arief dan Al Hamdie Arief (dua dari tiga bersaudara pemimpin “Aksi Tiga Badangsanak” di Barabai). Berdasarkan keputusan Landraad Barabai bulan Juli 1947, M. Nawawie Arief divonis hukum buangan selama 18 tahun bersama adiknya Al Hamdie Arief 15 tahun di penjara Cipinang dan Nusakambangan.

Sebelumnya, Penjara Cipinang pernah juga menjadi tempat penahanan A.A. Hamidhan, tokoh pers Kalimantan Selatan yang dihukum selama 50 hari, karena kasus persdelict dalam surat kabar Bendahara Borneo yang terbit di Samarinda, Kalimantan Timur.

Lalu bagaimana dengan kondisi penjara Nusakambangan saat itu? Dalam tajuk surat kabar Kalimantan Berdjung Sabtu

dan Minggu, 10-11 Desember 1949 dengan judul “Dari Rimba Kalimantan ke Nusakambangan” diberitakan sebuah kesaksian dari mantan tawanan Nusakambangan. Ia adalah Ali Akbar, salah seorang 13 anggota pasukan payung yang pada tahun 1947 diterjunkan di desa Sambi di daerah Pangkalanbun, namun sekitar 40 hari kemudian terkepung pasukan Belanda di desa Mujang sehingga menewaskan 3 orang temannya.

Mereka semua ditangkap. Mula-mula dibawa ke Pangkalanbun, kemudian dibawa ke Banjarmasin, setelah itu dibawa ke penjara Bukit Duri Jakarta dan kemudian dikembalikan lagi ke Banjarmasin. Sesudah 1 tahun 2 bulan mendekam dalam sel, mereka mendapat putusan hukuman penjara 6 tahun di penjara Nusakambangan. Waktu itu, penghuni penjara Nusakambangan terdiri dari dua kategori yakni “orang hukuman” karena kasus kejahatan atau kriminal dan “orang tawanan” karena divonis melakukan perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda atau NICA (tahanan politik).

Ali Akbar menceritakan bahwa saat ia berada di Nusakambangan, penjara itu dihuni oleh sekitar 5000 orang-orang hukuman dan tawanan. Di Nusakambangan terdapat 12 buah bui (penjara), di antaranya ada yang dikenal dengan nama Bui Seng karena beratap seng (zink). Dalam sebuah bilik rata-rata diisi 35 orang. Pakaian yang dibawa harus dikumpulkan tidak boleh dibawa serta. Untuk keperluan sehari-hari diberi 2 lembar celana, 2 baju, 1 sarung, dan 1 kopiah. Alas kaki tidak diberikan, dan bahkan kelom pun tidak boleh dipakai. Tidur beralaskan tikar purun dan sebuah bantal kain berisi ilalang kering. Penerangan hanya dengan minyak tanah, sedangkan lampu listrik hanya ada di Jumplang (pusat penjara). Setiap pagi pukul 5 harus sudah bangun, cuci muka, jauh dari mandi karena air tidak cukup dan makan getok singkong. Dari jam 7 sampai jam 9 bekerja menurut vaknya. Pekerjaan terberat adalah memecah batu, membuat jalan dan membatat rumput, tanpa henti selama 3 jam dan tidak boleh ngok kiri kanan. Perlakuan terhadap tawanan sangat kasar. Kata-kata “monyet anjing” dan sebagainya dari sipir bukan kata-kata yang mahal.

Tidak heran akhlak sipir penjara itu demikian kasarnya. Mereka umumnya bekas orang-orang hukuman yang juga sudah lama merasakan penderitaan dalam penjara itu dan oleh karena

keberaniannya diangkat menjadi penjaga tawanan. Kebanyakan di antara mereka itu terdiri dari mereka yang dihukum karena membunuh orang.

Orang tawanan yang dituduh bersalah karena dianggap malas dan melawan perintah, selain mendapat ganjaran dimasukkan ke dalam sel gelap juga mendapat tambahan penderitaan, di antaranya mengangkat palu kayu seberat 40 kg selama beberapa jam, atau dipukul dengan pentungan. Tidak jarang orang tawanan itu pecah kepalanya, patah tulangnya, karena kerasnya pukulan itu.

Sejumlah orang tawanan dan hukuman yang tidak tahan lagi menderita dalam penjara Nusakambangan, ditambah oleh kerinduannya akan kebebasan, mencoba melarikan diri dari penjara dengan berenang menyeberang selat antara Nusakambangan dengan Cilacap. Ada yang bisa selamat menyeberang, tetapi tidak sedikit pula yang tenggelam ke dasar selat atau bertemu dengan patroli Belanda yang hukumannya tidak lain dari pelor!

Demikian sekelumit kondisi penjara Nusakambangan di zaman Hindia Belanda atau di masa revolusi fisik dahulu. Dari dahulu sampai sekarang sama-sama telah dihuni oleh narapidana dari berbagai latar belakang hukuman. Jika dahulu pernah dihuni oleh tahanan politik dan orang-orang hukuman, maka sekarang dihuni pula oleh narapidana kelas kakap karena kasus pembunuhan, narkoba, dan terorisme. Namun bedanya adalah jika para tahanan politik dijebloskan ke penjara karena memperjuangkan kemerdekaan, justru sebaliknya para koruptor, terpidana mati karena kasus pembunuhan, narkoba, dan terorisme sekarang ini masuk penjara Nusakambangan karena menodai alam kemerdekaan.

17

KISAH PILU BUDAK SEKS (JUGUN IANFU) DI BANJARMASIN

Pada tahun 1942-1945 merupakan masa penjajahan Jepang di Indonesia. Meski masanya terbilang pendek, penjajahan Jepang telah menyisakan kepedihan yang luar bisa bagi bangsa Indonesia, tidak terkecuali bagi korban budak seks (Jugun Ianfu). Berikut sekelumit kisah penderitaan Jugun Ianfu, saat mereka di sekap tentara pendudukan Jepang di Banjarmasin, Borneo Selatan.

Balatentara Jepang ini tiba di Banjarmasin melalui dua jalan, yakni bala tentara yang berjalan kaki dari utara, yakni pasukan Angkatan Darat (Rikugun) yang berasal dari Balikpapan terus berjalan kaki, naik perahu, bersepeda, dan ada yang naik kuda menembus route Muara Uya, Tanjung, Amuntai, Barabai, Kandangan dan seterusnya mereka sampai di Banjarmasin pada tanggal 13 Februari 1942. Sedangkan pasukan yang melalui jalan laut dan mendarat di Jorong adalah yang berasal dari kesatuan Angkatan Laut (Kaigun) yang tiba Pelaihari tanggal 13 Februari 1942 dan terus ke Banjarmasin.

Beberapa waktu kemudian mulailah Jepang mendatangkan beberapa perempuan-perempuan muda atau perawan, umumnya berusia belasan tahun dari Jawa. Sebagian mereka dipekerjakan di Rumah Sakit Umum Ulin. Mereka biasa dipanggil mina-san. Sebagian lagi ditempatkan di sebuah asrama yang kini menjadi lokasi Pasar Telawang (dulu di ujung jalan Residen de Haanweg). Sebagaimana hasil investigasi Trans7 dan diberitakan oleh Banjarmasin Post (Senin, 10 Desember 2007) disebutkan bahwa diantara mereka itu adalah R.A. Soetarbini asal Yogyakarta, Mardiyem, dan 21 perempuan muda lainnya. Mereka diasramakan di sebuah bangunan yang kini menjadi lokasi pasar Telawang. Di

asrama yang disebut ian jo itulah mereka disekap sebagai budak seks atau jugun ianfu.

Perempuan-perempuan itu ditempatkan dalam bilik-bilik terpisah. Masing-masing berukuran 3×2,5 meter. Di masing-masing bilik tersedia segala perabotan seperti ranjang, kelambu, selimut, meja dan dua kursi. Ada juga gantungan baju. Di sudut kamar terdapat sebuah ruangan kecil yang hanya dibatasi kain. Mereka dibekali cairan pembersih kelamin dalam enam botol untuk mencegah mereka terjangkit penyakit sipilis.



Mengutip buku "Momoye; Mereka Memanggilku" yang ditulis Eka Hindra, semestinya Mardiyem dan Soetarbini jadi penyanyi. Keinginan inilah yang mendorong mereka berangkat ke Borneo, ikut kelompok sandiwara keliling Pantja Soerja. Ternyata mereka ditipu. Mardiyem tak bisa melupakan perkosaan pertamanya karena

sangat menyakitkan. Apalagi ia belum mengalami menstruasi. Pertama kali ia diperkosa pria brewokan, pembantu dokter yang memeriksa kesehatannya di Telawang. Hari pertama Mardiyem dipaksa melayani 6 laki-laki padahal ia sedang mengalami pendarahan hebat.

Para jugun ianfu itu harus siap melayani hasrat seks para tamu. Selain untuk melayani militer Jepang, sebagian perempuan itu sengaja didatangkan untuk melayani pejabat tertinggi Jepang di Banjarmasin, misalnya untuk Borneo Meisinbu, Kepala Kempeitai, Kepala Bank Tokyo, untuk Direktur-direktur perusahaan besar seperti Mitsubishi Kabushiki Kaisha, Toyo Menka Kabushiki Kaisha, Borneo Simboen, dan sebagainya.

Para tamu yang datang ke asrama Telawang harus terlebih dahulu membeli karcis, seperti membeli karcis bioskop. Ada

perbedaan harga bagi kalangan serdadu dan perwira Jepang. Siang hari, untuk pangkat serdadu, harus membayar 2,5 yen, sementara pukul 17.00-24.00 malam harus membayar 3,5 yen. Pukul 24.00 sampai pagi untuk pangkat perwira, membayar 12,5 yen. Setiap karcis disertai satu kaputjes (kondom). Namun, bayaran itu tak pernah cair, hingga sekarang.

Kaputjes atau kondom yang dipergunakan merupakan buatan lokal yang diproduksi atas perintah militer Jepang. Untuk memenuhi keperluan orang-orang Jepang itu, maka Jepang memerintahkan memproduksi sejumlah besar kondom dari karet sebanyak 3000 sehari yang pembuatannya dilakukan oleh Lamberi Bustani atas pengawasan Jepang di pabrik Nomura milik Hitaki di Teluk Tiram, Banjarmasin (Nawawi et al, 1991).

Hari demi hari mereka melayani nafsu durjana militer Jepang. Mereka ingin berontak atau menolak melayani tapi tak ada daya. Berontak atau menolak melayani berarti celaka. Siap-siap teraniaya, atau dibunuh. Memang, dalam satu bulan, para jugun lanfu di Ian Jo Telawang diliburkan dua hari. Tiap tanggal 8 dan 20. Namun, upaya melarikan diri pun mustahil, karena alat transportasi dan komunikasi tidak semudah sekarang. Meminta pertolongan warga pribumi juga tidak mungkin, karena warga takut mendekati para Jugun lanfu. Sanksi penyiksaan dan kurungan enam bulan, telah menanti bagi yang nekat.

Selain Jugun lanfu, serdadu Jepang juga berkeliaran mencari perempuan-perempuan lacur atau memaksa perempuan-perempuan yang bersuami untuk melepaskan nafsu dengan ancaman bayonet. Kalau hal ini diketahui Kempeitai, serdadu-serdadu Jepang itu pasti dihukum berat karena dilarang mengganggu penduduk bangsa Indonesia.

Mengutip pemberitaan surat kabar Kalimantan Raya No.13 tanggal 20 Maret 1942, Waktu itu di Banjarmasin memang terdapat beberapa lokasi pelacuran, seperti di kampung Kertak Baru, Kerkhoflaan, Belakang Boom, dan Straat Belakang (Kampung Gedang-Kebon Sayur). Ketika tentara Jepang berada di Banjarmasin, maka untuk sementara waktu militer Jepang menyalurkan hasrat seks mereka di lokasi pelacuran tersebut. Akan tetapi, ketika tentara Jepang membangun asrama (Ian Jo) untuk budak seks (Jugun lanfu) di ujung Residen de Haanweg (bekas C.F. Thile), kini pasar Simpang Telawang, maka kampung-

kampung yang sudah ditentukan itu dihapuskan. Tentara Jepang kemudian meminta kampung atau lokasi pelacuran itu ditutup dan kepada penduduk setempat diminta pula memberikan anjuran atau nasihat kepada perempuan lacur agar menjauhi kampung tersebut atau mendatangi tempatnya yang baru yang sudah sudah ditentukan atau disediakan tentara Jepang sebagaimana yang tersebut di atas yakni ujung Residen de Haanweg.

PEMBANTAIAAN KOMPLOTRAN HAGA DI BORNEO SELATAN

Selain Jugun lanfu, Romusha, dan pembantaian warga masyarakat yang menjadi korban kekejaman Jepang selama pendudukannya di Borneo (Kalimantan) selama tahun 1942-1945, maka tentara Jepang juga melakukan pembantaian terhadap aparat pemerintah Hindia Belanda, dalam hal ini adalah komplotan B.J. Haga di Borneo Selatan.

Menjelang kedatangan tentara pendudukan Jepang, pulau Borneo (Kalimantan) berada dibawah kekuasaan pemerintahan



Hindia Belanda.
Statusnya adalah
sebuah provinsi (Gewest
Borneo) beribukota
Banjarmasin yang
dipimpin oleh seorang
gubernur bernama Dr.
B.J. Haga. Gewest
Borneo mempunyai dua
keresidenan yakni
Keresidenan Borneo
Barat (Kalimantan Barat)
dengan ibukotanya
Pontianak dan
Keresidenan Borneo
Selatan (Kalimantan
Selatan) dengan

ibukotanya Banjarmasin.

Sesudah Negeri Belanda diduduki Jerman (sekutu Jepang di Eropa) tanggal 10 Mei 1940, pemerintah Hindia Belanda mengumumkan negara dalam keadaan perang. Tentara pendudukan Jepang memasuki Borneo Selatan melalui dua jalan,

yakni dari utara dan yang tiba dengan kapal laut di pantai Jorong. Baru saja terdengar bahwa kota Amuntai telah jatuh ke tangan pasukan Jepang, maka KNIL dan pemerintah sipil Belanda yang dipimpin oleh Gubernur B.J. Haga beserta keluarga dan sejumlah orang Belanda lainnya melarikan diri menuju Purukcahu di hulu Sungai Barito, dan membiarkan seluruh wilayah Borneo Selatan jatuh ke tangan Jepang tanpa mendapat perlawanan apa-apa.

Sesaat sebelum berangkat menuju Purukcahu, Gubernur B.J. Haga meminta walikota Banjarmasin Van der Meulen dan Kepala Javasche Bank Konig untuk bertahan di Banjarmasin dan menugaskan mereka untuk menyerahkan kota Banjarmasin kepada Jepang, sebaliknya AVC (Algemene Vernielings Corps) atau Korp Untuk Penghancuran berencana melakukan pembumihangusan terhadap kota agar tidak dimanfaatkan oleh Jepang.

Pada malam Minggu tanggal 9 dan 10 Februari 1942 kota Banjarmasin menjadi lautan api. Seluruh kendaraan militer dirusak dan dijejer di Jalan Simpang Sungai Bilu. Jembatan Coen satu-satunya penghubung Jalan Ulin (kini Jalan A. Yani) ke pusat kota Banjarmasin, didinamit yang menyebabkan bunyi ledakan dahsyat yang menggetarkan dan terdengar di seluruh kota.

Serdadu Jepang sangat marah dengan tindakan pembumihangusan yang dilakukan Belanda itu, beberapa pejabat Belanda yang melakukan penyambutan yakni Burgemeester Van der Meulen, Smits (Head Editor Borneo Post) dan seorang Cina, dipancung di atas sisa-sisa reruntuhan Jembatan Coen ketika kedatangan tentara Rikugun Jepang (Angkatan Darat) dari Hulu Sungai pada tanggal 13 Februari 1942.

Tidak lama di Puruk Cahu, Gubernur B.J. Haga beserta pengikutnya kemudian menyerahkan diri kepada penguasa militer Jepang di Banjarmasin pada awal April 1942. Mereka kemudian dijadikan interniran di Banjarmasin. Namun ternyata kemudian, dari balik penjara Gubernur B.J. Haga ketahuan mengadakan gerakan di bawah tanah untuk meruntuhkan kekuasaan Jepang. B.J. Haga dibantu oleh 25 orang pembantu utamanya diantaranya 1 orang eks-Assistent Resident, dan 9 orang eks-Controleur dalam tawanan, isteri Gubernur dan isteri salah satu controleur mengatur di dalam.

Adanya komplotan ini sudah lama tercium oleh pimpinan balatentara Jepang di Banjarmasin. Mengutip pemberitaan Soeara Kalimantan, Raboe 23 Juni 1948, hal itu tidak lepas dari jasa Sasuga yakni orang yang selama di Jepang terkenal mempunyai reputasi sebagai seorang yang cerdik untuk membongkar komplotan anti Jepang. Reputasinya itu juga teruji di Borneo, karena ia menjadi pusat pimpinan yang membongkar komplotan yang semacam itu sehingga ia mendapat nama baik sebagai pembongkar terhadap gerakan anti Jepang yang dipimpin oleh Gubernur Haga dan teman-temannya. Pertama di Banjarmasin, kemudian menyusul di Pontianak di Borneo Barat. Meski punya tujuan yang berbeda, komplotan anti Jepang di Borneo Selatan mempunyai hubungan dengan komplotan di Borneo Barat. Ada dua orang dari Banjarmasin dikirim ke Borneo Barat yakni Makaliwij dan dr. Soesilo. Tugasnya, memberitahu permasalahan yang sedang terjadi di Banjarmasin, kepada para pemimpin di Borneo Barat.

Dalam bulan Mei 1943 pemerintah Jepang telah mengadakan suatu konperensi rahasia, dimana diberitakan tentang perhubungan yang disangka ada dan pergerakan untuk melumpuhkan Jepang, telah mengambil keputusan untuk mengadakan aksi besar-besaran, pengegedahan, penangkapan dan sebagainya.

Sasuga selaku pimpinan bertindak, sehingga kemudian pada subuh tanggal 10 Gogatsoe 2603 (10 Mei 1943) anggota komplotan yang berada di luar ditangkap dalam penangkapan pertama. Kemudian disusul penangkapan kedua pada pertengahan Hatjigatsoe (Agustus) 1943, Haga dan lain-lain telah ditangkap demikian juga dilakukan penangkapan lebih 200 orang dalam empat kali, maka dengan pengkapan besar-besaran itu komplotan Haga dapat ditumpas.



B.J. Haga kemudian diadili dan namun kemudian jatuh pingsan dan meninggal dunia di saat menjalani persidangan pada hari pertama, karena sebelumnya telah mendapat siksaan yang demikian kejam dari Jepang.

Upaya militer Jepang untuk menumpas komplotan B.J. Haga tidak berhenti setelah meninggalnya gubernur Gewest Borneo itu. Sebagaimana diberitakan surat kabar Borneo Simboen No. 324 Tahun ke II Selasa 21 Desember 2603 dengan judul “Seloeroeh Kepala Komplotan Dihoekoem tembak Mati Karena berdosa sebagai komplotan pendjahat melawan Nippon” memberitakan bahwa satu demi satu para pengikutnya dicituk, ditahan, disiksa, dan kemudian dibantai. Oleh karena itu, eksekusi mati kemudian dilakukan terhadap 25 orang pembantu utamanya pada 20 Desember 2603 (1943) yakni C.M. Vischer (umur 47), S. Raden Soesilo (umur 50), Antiro Santeago Pereira (umur 53), Cosa Kakarico, L.J. Brandon (umur 50), G.D.E. Braches (umur 40), Hausman Baboe (umur 53), Makaliwij (umur 37), Oe Ley Koei (umur 38), Phoa Hok Tjwan (umur 49), A. Roman (umur 26), A.C.W. Wardenier (umur 45), Den Hartog (umur 35), Y. De Vries (umur 33), orang Belanda, W.A. Verpalen (umur 36), M.C. Bais (umur 34), Beukers (umur 39), L.W.Y. Bouhuis, Willem Philipsen (umur 37), G.J. Van der Kooi (umur 33), A.H.V.H. Linden (umur 31), N.G. Haga (umur 45), Betty Vischer (umur 43), Braches (umur 32), Nelina Verpalen (umur 36), dan Z.C. Reichert (umur 40).

Di salah satu sumber disebutkan bahwa tempat pembantaian komplotan B.J. Haga ini diperkirakan adalah lapangan terbang Ulin, 28 km dari kota Banjarmasin, dimana telah didapati 150 buah tengkorak, 30 orang mati karena disiksa, 26 orang lagi termasuk 5 orang perempuan dan pegawai yang dilakukan Jepang pada 20 September 1943. Disebutkan pula bahwa jumlah penyembelihan di kalangan Belanda tidak kurang dari 250 orang, sedang yang tidak diketahui dari kalangan Indonesia. Tionghoa, India, Arab yang jumlahnya juga amat besar.

SEJARAH LOKAL DAN NASIONALISME

Tanggal 17 Mei 1949 merupakan hari yang bersejarah bagi masyarakat Kalimantan Selatan, karena pada saat gerakan federalis yang dikomandani Dr. H.J. van Mook. mendapat sambutan di beberapa daerah, justru pejuang kemerdekaan pro unitarisme di Kalimantan Selatan memproklamasikan Kalimantan Selatan menjadi bagian dari Republik Indonesia Simak betapa heroik muatan proklamasi itu.

Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa, raga, dan harta untuk kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia, maka setiap tahun Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperingati Hari Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan dengan menggelar upacara bendera. Meski telat, peringatan Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV pada tahun 2007 bersamaan dengan upacara Hari Kebangkitan Nasional, Senin 21 Mei 2007.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk lebih memperdalam makna hari bersejarah Kalimantan Selatan ini, selain upacara digelar pula Pameran Benda-benda bersejarah seperti dokumen, foto-foto sampai peralatan perang koleksi Museum Waja Sampai Kaputing bertempat di Gedung Dekranasda Kalimantan Selatan.

Selain digelar pameran, peringatan Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan dan Hari Kebangkitan Nasional juga dibarengi dengan peluncuran tiga buah buku tentang nasionalisme hasil karya anak banua. Dua dari buku yang diluncurkan tersebut adalah Nasionalisme Indonesia di Kalimantan Selatan 1901-1942 dan Proklamasi Kesetiaan Kepada Republik. Keduanya karya Drs. Wajidi, Peneliti Muda bidang Ilmu Sejarah pada Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan.

Peluncuran buku itu ditandai dengan penyerahan buku oleh Gubernur H. Rudy Ariffin didampingi Ketua DPRD Kalimantan Selatan dan penulis buku yang secara simbolis disampaikan

kepada perwakilan Banjarmasin Post, Kopertis Wilayah XI, RRI, LKBN Antara, TVRI, dan KNPI Kalimantan Selatan bertempat di lapangan upacara kantor Gubernur Kalimantan Selatan.

Sejak diluncurkan tanggal 21 Mei 2007 silam, kedua buah buku tersebut telah didistribusikan ke berbagai lembaga pemerintah dan swasta di Kalimantan Selatan maupun luar Kalimantan Selatan, Perpustakaan Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, Perpustakaan PTN/PTS, sekolah, guru sejarah, tokoh masyarakat di Kalimantan Selatan dan Jakarta, veteran dan keluarga para pahlawan, Kerukunan Warga Kalimantan Selatan di Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Tembilahan Riau, dan bahkan sampai ke luar negeri yakni Malaysia, Jepang, dan Amerika Serikat (The Library of Congress, 101 Independence Ave, S.E. Washington, DC 20540 dan Ohio University Libraries), di samping penerima lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Sejarah memang tidak memberikan materi untuk kehidupan, akan tetapi muatannya adalah guru bagi kehidupan, dan pemahaman terhadap sejarah akan mendorong peningkatan rasa tanggung jawab generasi penerus terhadap masa depan bangsa dan negara. Memahami sejarah perjuangan kemerdekaan di Kalimantan Selatan akan bermanfaat bagi pelestarian nilai-nilai dan semangat juang para pahlawan, disamping manfaatnya sebagai menambah khazanah referensi kesejarahan, bahan informasi dan pengenalan identitas daerah, sumber inspirasi dalam membangun bangsa dan negara, serta bahan pengayaan muatan lokal di berbagai jenjang pendidikan.

Ironi Sejarah

Hadirnya buku “Nasionalisme Indonesia di Kalimantan Selatan 1901-1942 dan Proklamasi Kesetiaan Kepada Republik, dilatarbelakangi oleh adanya ironi yakni minimnya pengetahuan masyarakat Kalimantan Selatan tentang Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di Kalimantan Selatan khususnya pada Periode Sejarah Pergerakan Kebangsaan 1901-1942 dan Periode Sejarah Perang Kemerdekaan 1945-1949.

Hal yang sama juga terjadi di dunia pendidikan formal. Siswa dan guru lebih mengetahui sejarah nasional dibanding sejarah lokal. Pernah terjadi siswa yang ditanya tentang sejarah

Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan 17 Mei 1949 di Mandapai Kandangan, ia menjawab dengan menghubungkannya dengan Stadion Olahraga 17 Mei di Banjarmasin. Siswa juga lebih mengetahui siapa Jenderal (Anumerta) A. Yani atau Pangeran Diponegoro dibanding Brigjend H. Hassan Basry atau Pangeran Antasari (Pahlawan Nasional dari Kalimantan Selatan).

Salah satu penyebab minimnya pengetahuan siswa adalah lantaran kurangnya bahan bacaan sejarah daerah Kalimantan Selatan yang terdapat di perpustakaan-perpustakaan sekolah.

Sejarah Lokal dan Sejarah Nasional

Dalam sebuah kesempatan Prof. Dr Taufik Abdullah, sejarawan dari LIPI pernah menyatakan bahwa penulisan sejarah di Indonesia sangat dipengaruhi kekuasaan. Banyak peristiwa sejarah, sebagian besar adalah peristiwa lokal yang sebetulnya sangat bermakna tidak terungkap secara jelas atau tidak mendapatkan porsi yang selayaknya dalam sejarah nasional karena dipandang tidak sejalan, atau kalau tidak ingin dikatakan bertentangan dengan kepentingan atau sudut pandang penguasa.

Sementara itu ada peristiwa lokal di daerah tertentu yang terasa ditonjolkan sehingga terlihat dominan dalam buku sejarah perjalanan bangsa, terutama peristiwa sejarah yang terjadi di Pulau Jawa, sehingga seolah-olah Pulau Jawa-lah yang mempunyai peranan penting dalam panggung sejarah Indonesia.

Diakui memang telah sejak lama Pulau Jawa menjadi pusat hegemoni kekuasaan seperti Majapahit, Hindia Belanda, dan kini Republik Indonesia. Dari sanalah berbagai kebijakan pemerintahan, aktivitas dan budaya masyarakat yang bersentuhan dengan kekuasaan mempengaruhi dan/atau menjadi kiblat dan menyebar ke seantero Nusantara. Tak mengherankan ketika Indonesia merdeka, maka peristiwa yang terjadi di Jawa banyak mempengaruhi daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Di bidang pendidikan, misalnya, Pemerintah Orde Baru pernah mengeluarkan kebijakan bahwa hanya sejarah mempunyai korelasi/mendukung dengan negara kebangsaan yang dikategorikan layak masuk sebagai bagian sejarah nasional, sehingga sejarah lokal/daerah yang tidak mempunyai relevansi dengan sejarah nasional diabaikan.

Selain itu, kebebasan untuk memberikan tafsiran yang berbeda dengan pihak penguasa atas suatu peristiwa sejarah tidak mendapat tempat yang memadai. Dalam beberapa kasus munculnya buku sejarah yang menyorot suatu peristiwa dalam sudut pandang yang berbeda, tidak direspon dengan pendekatan intelektual, tetapi lewat pendekatan keamanan dengan jalan melarang diterbitkan atau disebarluaskan buku tersebut kepada masyarakat.

Pengaruh kekuasaan tampak dalam pengajaran sejarah, dari tingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Di negara yang taraf pendidikan masyarakatnya sudah maju dan predikat persatuannya sudah demikian kuat, sejarah diajarkan berdasarkan pendekatan intelektual, sedangkan di negara berkembang seperti Indonesia cenderung berorientasi kepada pendekatan indoktrinasi.

Menyangkut pengajaran sejarah, sudah sejak lama pemerintah mengeluarkan kebijakan pendidikan nasional yang bersifat monolit yang mana buku-buku pelajaran sejarah maupun kurikulumnya sebagian besar ditentukan oleh Pusat. Kebijakan tersebut berdampak kepada minimnya materi sejarah lokal dalam pengajaran sejarah di sekolah-sekolah.

Dilihat dari sudut kepentingan penanam jati diri bangsa dan upaya untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa maka kebijakan yang bersifat monolit tersebut dapat dipahami, karena pemahaman dan kesadaran akan sejarah bangsa yang serba bhinneka merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki.

Namun kebijakan itu sendiri tidak terlepas dari kelemahan, di antaranya: (1) pelajaran sejarah bisa kurang menarik, karena siswa diajarkan peristiwa yang tidak mempunyai relevansi langsung dengan daerah di mana ia berada; (3) siswa kurang/ tidak mengetahui sejarah yang terjadi di daerahnya sendiri; (3) dapat menimbulkan kesan sekolah sebagai sebuah menara gading atau tidak peduli dengan lingkungan sekitar.

Oleh karena itu, jangan disalahkan ketika Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan memperingati peristiwa Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan 17 Mei 1949, masyarakat daerah ini justru tidak tahu menahu dengan peristiwa tersebut.

Kontribusi Sejarah Lokal

Apriori terhadap sejarah lokal sudah saatnya dihilangkan, termasuk kekuatiran yang berlebihan akan munculnya sikap etnosentrisme, karena sudah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa sejarah lokal bahkan yang sangat lokal sekalipun, sesungguhnya mempunyai kontribusi terhadap penanaman nasionalisme dan patriotisme. Di antaranya adalah buku Proklamasi Kesetiaan Kepada Republik dan Nasionalisme Indonesia di Kalimantan Selatan 1901-1942.

Meski buku tersebut bukan yang pertama memuat tentang sejarah lokal Kalimantan Selatan, namun ia penting untuk dibaca oleh siapa saja yang berminat memahami perjalanan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia di Kalimantan Selatan.

Di dalam keadaan kurangnya penulisan buku mengenai sejarah daerah, maka buku ini akan memberikan informasi historis kepada masyarakat bahwa sejarah lokal Kalimantan Selatan juga mempunyai kontribusi penting terhadap pembentukan nasionalisme dan patriotisme Indonesia.

Buku pertama, Nasionalisme Indonesia di Kalimantan Selatan 1901-1942. Dengan pengantar pakar oleh Drs. M.Z. Arifin Anis, M.Hum, Dosen Sejarah FKIP Unlam, buku setebal 233 halaman ini merupakan hasil dari sebuah kajian tentang peristiwa yang berkaitan dengan pergerakan kebangsaan Indonesia di Kalimantan Selatan, sebagai bagian dari “fenomena historis” yang terjadi di sebagian besar kepulauan Nusantara pada dasawarsa pertama abad ke-20, di saat mana terjadi kebangkitan nasionalisme sebagai reaksi terhadap kolonialisme dan imperialisme.

Kalimantan Selatan (termasuk Kalimantan Tengah sekarang) merupakan bagian dari konstelasi pergerakan kebangsaan Indonesia itu. Di daerah ini berkembang berbagai organisasi yang berlingkup lokal, regional, maupun nasional. Atau dari yang semula bersifat kedaerahan dan bergerak di bidang sosial, ekonomi, dan keagamaan, terus berkembang ke arah kebangsaan melalui pergerakan politik praktis dengan tujuan meraih kemerdekaan.

Buku ini memuat berbagai aktivitas pergerakan baik berupa berupa perkumpulan, partai, maupun sekolah pergerakan dengan watak Islam sebagai pendorong utama di awal-awal

pertumbuhannya dan seterusnya berkembang ke arah kebangsaan. Dilihat dari asal kelahirannya, maka terdapat organisasi pergerakan yang pembentukannya bermula di Kalimantan Selatan dan ada yang merupakan cabang dari induknya di Pulau Jawa.



Gubernur Kalsel H. Rudy Ariffin menyerahkan beberapa buku sejarah/budaya lokal: "Proklamasi Kesetiaan Kepada Republik", "Nasionalisme Indonesia di Kalimantan Selatan 1901-1942", "Urang Banjar dan Kebudayaannya" dan "Sejarah Banjar" kepada Ketua Kerukunan Keluarga Banjar Yogya (Kakabayo) H. Bukhari di Yogyakarta (12/11/2007).

Jika dilihat dari lingkup perjuangannya, terdapat organisasi-organisasi yang bergerak dalam lingkup lokal, regional (Kalimantan), maupun lingkup nasional. Sedangkan jika dilihat dari tujuan dan asasnya, terdapat organisasi yang bergerak bidang sosial, ekonomi, dan keagamaan, serta organisasi pergerakan yang bergerak di bidang politik atau kebangsaan.

Penetapan tahun 1901 diambil sebagai awal pergerakan, karena pada tahun itulah berdiri organisasi pergerakan di Banjarmasin, yaitu Seri Budiman, sebuah organisasi lokal

beranggotakan para pangreh praja dan pedagang yang bertujuan mempererat hubungan silaturahmi sesama anggotanya, mempropagandakan pentingnya pengajaran dari Barat, persatuan kaum pedagang dan pertanian.

Perkumpulan Seri Budiman-lah yang mula-mula sebagai pelopor mempergunakan podium sebagai sarana para pembicara di sidang-sidang rapat, sehingga kebebasan berbicara di atas mimbar menjadi suatu kebiasaan baru dalam dunia perhimpunan di Kalimantan Selatan yang berbeda dengan perhimpunan sebelumnya yang bersifat sinoman (organisasi kemasyarakatan yang bersifat tradisional dan lokal). Meski pada mulanya bersifat lokal dan menonjolkan watak sosial, para anggota Seri Budiman yang mendapat pengaruh dari kebudayaan atau pendidikan secara Barat telah memelopori tumbuhnya organisasi dan kebiasaan yang bersifat modern yang diikuti oleh organisasi-organisasi yang berkembang di kemudian hari.

Meski aktivitas organisasi Seri Budiman gaungnya tidak sebesar dengan apa yang telah dilakukan oleh organisasi Budi Utomo yang kelahirannya tanggal 20 Mei 1908 dijadikan Hari Kebangkitan Nasional, namun ia merupakan sebuah fakta sejarah bahwa embrio organisasi pergerakan di Kalimantan Selatan pernah ada sebelum kelahiran Budi Utomo.

Tidak diragukan lagi, agama Islam merupakan kontributor perkembangan nasionalisme di Kalimantan Selatan. Dapat dikatakan Islam dan nasionalisme di Kalimantan Selatan merupakan satu kesatuan erat yang saling mengisi. Islam sebagai agama yang dianut sebagian besar masyarakat Kalimantan Selatan sangat berperan sebagai pendorong tumbuhnya pergerakan nasional di daerah ini, oleh karena itu berbagai aliran atau organisasi-organisasi yang bernaafaskan Islam dapat dengan mudah tumbuh dan berkembang karena banyaknya pengikut atau anggotanya.

Besarnya pengaruh agama Islam pada awal pergerakan membuktikan bahwa elite agama merupakan salah satu pelopor pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan. Dapat dikatakan pada dekade pertama abad ke-20 pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan dimulai dengan nasionalisme Islam. Pada mulanya corak keislaman terlihat pada kegiatan sinoman-sinoman yang bernaafaskan Islam, namun pada perkembangan selanjutnya

tercermin pada organisasi yang mengarah kepada kebangsaan seperti Sarekat Islam, Barisan Indonesia (Bindo), Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Musyawaratutthalibin.

Di samping organisasi-organisasi yang merupakan cabang dari Jawa, peranan organisasi-organisasi lokal seperti Sarekat Kalimantan, Barisan Indonesia, Partai Ekonomi Kalimantan, dan Musyawaratutthalibin juga turut mewarnai pergerakan kebangsaan di daerah ini. Bahkan Barisan Indonesia (Bindo) dan Musyawaratutthalibin menempati keistimewaan tersendiri dalam panggung sejarah pergerakan di Kalimantan Selatan. Bindo merupakan organisasi lokal yang pertama berasaskan kebangsaan, non-kooperatif, dan berani mengangkat simbol Merah Putih sebagai bendera kebangsaan. Sedangkan Musyawaratutthalibin, merupakan organisasi Islam lokal terbesar di Kalimantan Selatan, karena selain mempunyai beberapa cabang di Kalimantan, juga melebar ke luar pulau Kalimantan, terutama di daerah komunitas Banjar perantauan seperti Sapat, Tembilahan dan daerah lain di pesisir timur Sumatera.

Dari paparan disimpulkan bahwa yang namanya pergerakan kebangsaan, perintis kemerdekaan, atau awal nasionalisme dan patriotisme Indonesia bukanlah monopoli organisasi yang tumbuh dan berkembang di Jawa. Rakyat Kalimantan Selatan juga merupakan bagian yang turut mewarnai sejarah perkembangan nasionalisme dan patriotisme Indonesia.

Buku kedua, Proklamasi Kesetiaan Kepada Republik. Isinya 211 halaman dengan ulasan berupa pengantar oleh Drs. Bambang Subiyakto, M.Hum, Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) cabang Kalimantan Selatan. Isi buku ini kental sekali memuat nasionalisme dan patriotisme, karena dengan gamblang memaparkan betapa rakyat Kalimantan Selatan berjuang dengan gigihnya menegakkan kemerdekaan Indonesia di Kalimantan Selatan.

Buku ini dapat menepis keraguan atas pertanyaan tentang ada tidaknya kontribusi sejarah lokal terhadap penanaman nasionalisme dan patriotisme, karena sejarah daerah Kalimantan Selatan pada masa Perang Kemerdekaan 1945-1949 penuh dengan peristiwa heroik dalam mengusir penjajah Belanda yang kandungan nilainya tidak kalah dengan peristiwa yang terjadi di daerah lainnya di Indonesia.

Pada periode 1945-1949, rakyat Kalimantan Selatan bukan saja berhasil mengusir penjajah Belanda melalui perang gerilya, namun secara politis juga mempunyai kontribusi dalam proses integrasi bangsa dan negara.

Saat pemerintah Republik Indonesia dengan resmi meninggalkan Kalimantan melalui persetujuan Linggajati, para pejuang kemerdekaan di Kalimantan Selatan yang meski sangat kecewa dengan persetujuan itu, tetap berusaha sekuat tenaga menunjukkan eksistensi Republik di wilayah yang secara *de facto* dan *de jure* berada di wilayah kekuasaan Belanda, tidak berkeinginan mendirikan negara sendiri meski kesempatan itu ada saat mereka telah menguasai sebagian besar wilayah teritorial, malah sebaliknya menentang pembentukan “Negara Kalimantan”, dan dengan Proklamasi 17 Mei 1949, Hassan Basry atas nama rakyat Indonesia di Kalimantan Selatan, menyatakan Kalimantan Selatan menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Proklamasi 17 Mei 1949 merupakan sebuah fakta sejarah betapa rakyat Kalimantan Selatan tetap setia kepada NKRI, meski pemerintah Republik Indonesia secara “resmi” telah meninggalkan Kalimantan sebagaimana disepakati kedua belah pihak (Indonesia dan Belanda) dalam Persetujuan Linggajati.

Persetujuan Linggajati merupakan satu “tamparan” terhebat terhadap perjuangan kemerdekaan di Kalimantan, akan tetapi para pejuang di Kalimantan Selatan yang meski sangat kecewa dengan persetujuan itu, tetap berusaha sekuat tenaga menunjukkan eksistensi Republik di wilayah yang secara *de facto* dan *de jure* berada di wilayah kekuasaan Belanda, tidak berkeinginan mendirikan negara sendiri meski kesempatan itu ada pada saat mereka telah menguasai sebagian besar wilayah teritorial. Yang terjadi adalah sebaliknya yakni para pejuang kemerdekaan atau rakyat yang pro unitarisme bertekad tetap menjadikan Kalimantan Selatan sebagai bagian dari NKRI dan menolak setiap upaya mendirikan Negara Kalimantan sebagaimana digagas oleh Letnan Gubernur Jenderal Dr. H.J. van Mook.

Cerminan dari tekad para pejuang dan rakyat Kalimantan Selatan itu, antara lain terlihat dengan adanya berbagai mosi penolakan dan perlawanan bersenjata terhadap pembentukan

Negara Kalimantan meski Belanda telah membentuk beberapa Daerah Otonom sebagai jalan untuk merealisasikannya.

Perlawanan di bidang politik dilakukan oleh para tokoh SKI dan SERMI. Sedangkan perlawanan bersenjata dilakukan oleh para gerilyawan dari beberapa organisasi kelaskaran, terutama sekali ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan sebagai organisasi terbesar di bawah pimpinan Letnan Kolonel Hassan Basry yang pada tanggal 17 Mei 1949 memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan yang melingkungi seluruh daerah Kalimantan Selatan menjadi bagian dari Republik Indonesia.

Proklamasi 17 Mei 1949 telah menjadikan dualisme pemerintahan di Kalimantan Selatan. Akan tetapi, Pemerintah Gubernur Tentara ALRI yang lebih berkuasa karena memiliki wilayah teritorial yang luas, minus kota-kota yang masih diduduki pemerintahan NICA.

Cornelis van Dijk dalam disertasinya *Darul Islam Sebuah Pemberontakan* (1983:206) menyimpulkan bahwa: “Para gerilyawan di Kalimantan mengakibatkan lebih banyak kesulitan bagi Belanda ketimbang di Sulawesi. Mereka benar-benar berhasil dalam melumpuhkan pemerintahan di Kalimantan Selatan”.

Karena tidak tahu harus bagaimana menghadapi para gerilyawan di Kalimantan Selatan, maka Belanda berinisiatif meminta tolong kepada pemerintah Republik Indonesia dan Komisi PBB untuk Indonesia (KPBB) atau UNCI (United Nation Commission for Indonesia) untuk mendamaikan keadaan, sekaligus sebagai penengah dan saksi dalam perundingan-perundingan antara Belanda dan ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan.

Perundingan kedua belah pihak yang menempatkan utusan militer Republik Indonesia sebagai penasihat dan UNCI/KPBB sebagai penengah atau saksi perundingan, merupakan peristiwa yang dikategorikan unik dan luar biasa dalam panggung sejarah Perang Kemerdekaan Indonesia, karena –menurut sepengetahuan penulis– peristiwa serupa tidak terjadi di daerah lainnya di Indonesia yang menurut Persetujuan Linggajati dikuasai Belanda.

Benar apa yang dikatakan Hassan Basry dalam memoarnya *Kisah Gerilya Kalimantan Jilid II* (2003:75) bahwa peristiwa itu

merupakan hal yang luar biasa yang pernah terjadi di Indonesia. Istimewanya karena Republik Indonesia dapat berkuasa atas suatu daerah (Kalimantan Selatan, pen.) di luar Persetujuan Linggajati atas permintaan pihak lawan (Belanda).

PEMDA KALIMANTAN SELATAN PERLU MEMILIKI ALBUM SEJARAH PERJUANGAN

Saya pernah merasa sedemikian terharu ketika menyaksikan foto-foto rekaman masa perjuangan gerilya di Kalimantan Selatan yang dipamerkan oleh Kantor LVRI Cabang Hulu Sungai Tengah pada acara Pameran Pembangunan tahun 1995 di Barabai. Di antaranya ada yang sangat menyentuh perasaan yakni foto yang merekam seorang pejuang yang tewas terkapar bersimbah darah akibat terjangan peluru tentara Belanda.

Foto tersebut terlihat sangat dramatis, sehingga yang melihatnya akan tergetar hatinya dan menumbuhkan kesadaran tentang betapa berat perjuangan dan besarnya pengorbanan yang diberikan para pejuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Namun di sisi lain muncul rasa keprihatinan ketika melihat kondisi foto yang kurang terpelihara. Hal itu nampak dari adanya foto yang telah sobek atau dimakan jamur atau oleh perusak lainnya. Alangkah sayangnya kalau foto-foto tersebut rusak atau musnah sama sekali. Padahal kita semua sangat memerlukannya baik sebagai sumber sejarah maupun sumber pelajaran yang sangat penting terutama bagi generasi mendatang.

Adakah kita akan tergerak untuk menyelamatkannya? Saya pikir sudah saatnya pihak yang paling berkompeten yakni Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan bertindak memfasilitasi penyelamatan benda bersejarah tersebut dari kerusakan atau kepunahan, dan menghimpunnya ke dalam sebuah naskah buku album perjuangan. Jikalau naskah itu bisa diterbitkan maka kita akan memiliki 'buku album sejarah' yang tak kalah pentingnya dengan buku sejarah yang telah kita miliki yakni "Sejarah Perjuangan Rakyat Menegakkan Kemerdekaan Republik Indonesia di Kalimantan Selatan (Periode 1945- 1949)", dan buku "Sejarah

Banjar” (2003) yang tidak memuat satu pun foto sejarah di dalamnya.

Keperluan Mendesak

Upaya penyelamatan dan pendokumentasian foto-foto bersejarah ke dalam sebuah album sejarah perjuangan, sebenarnya suatu keperluan yang mendesak untuk segera dilaksanakan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor:

Pertama, belum adanya buku yang khusus memuat foto-foto lama/foto lukisan/foto objek peninggalan sejarah dengan narasinya tentang perjuangan rakyat Kalimantan Selatan di masa lampau.

Kedua, minimnya pengetahuan masyarakat termasuk guru dan siswa di berbagai jenjang pendidikan formal tentang Sejarah Daerah/Lokal Kalimantan Selatan.

Ketiga, adanya ironi yakni masyarakat, guru, dan siswa lebih mengetahui tentang peristiwa/tokoh sejarah nasional dibanding peristiwa/tokoh sejarah lokal.

Keempat, minimnya bahan bacaan sejarah daerah/lokal Kalimantan Selatan yang terdapat di perpustakaan-perpustakaan sekolah.

Kelima, adanya kenyataan banyaknya foto-foto sejarah perjuangan terutama dari masa Pergerakan Kebangsaan sampai Perang Kemerdekaan yang telah musnah, dan yang tersisa sekarang pun foto dan negatif filemnya banyak yang rusak karena kurangnya pemeliharaan.

Keenam, foto dan negatif filem nya yang tersisa tersebut hingga sekarang belum pernah diinventarisasi dan kini berada di berbagai lembaga pemerintah dan swasta serta di tangan para pejuang atau keluarganya, dan di tangan perseorangan lainnya.

Ketujuh, para pelaku sejarah perjuangan sudah banyak yang meninggal dunia, sedangkan yang masih hidup tinggal sedikit dan berusia lanjut, misalnya tokoh perintis kemerdekaan di Kalimantan Selatan tinggal dua orang yang masih hidup. Selagi ada pejuang yang masih hidup, maka ada baiknya upaya penyelamatan segera dilakukan sehingga selain dapat mempermudah melakukan pencarian atau pengumpulan, para

pejuang tersebut juga dapat memberikan informasi tentang latar belakang peristiwa pada foto yang ditemukan.

Kedelapan, kini kita berada di masa peralihan generasi, yakni generasi pejuang '45 ke generasi penerus yang tak pernah mengalami zaman penjajahan atau zaman sesudah selesainya perang kemerdekaan. Agar generasi penerus dapat dan tetap memiliki rasa nasionalisme dan patriotisme serta nilai-nilai perjuangan '45 lainnya, maka diperlukan upaya-upaya pewarisannya antara lain melalui "Buku Album Sejarah Perjuangan" yang berfungsi sebagai 'penghubung' antara generasi sekarang dengan tahun-tahun formatif bangsa Indonesia di sepertiga abad ke-20.

Album Sejarah Perjuangan

Yang dimaksud dengan album sejarah perjuangan adalah buku album yang memuat foto-foto perjuangan rakyat Kalimantan Selatan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di Kalimantan Selatan. Bentuknya dapat menyerupai buku album "Tiga Puluh Tahun Indonesia Merdeka" terbitan Kantor Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Sedangkan foto-foto yang dapat dimuat ke dalam album tersebut dapat berupa foto lama (asli), lukisan, diorama, dan sketsa bahkan surat atau dokumen perjuangan lainnya, serta foto-foto terbaru yang khusus dibuat untuk merekam bekas lokasi pertempuran, tempat atau bangunan dan peralatan bersejarah, baik yang berasal dari periode Perang Banjar, Pergerakan Kemerdekaan, Zaman Jepang, sampai dengan periode Revolusi Fisik 1945-1949.

Foto perjuangan itu sendiri tidak hanya berkenaan dengan perjuangan bersenjata tetapi juga perjuangan yang dilakukan melalui jalur politik dan media massa. Juga tidak hanya menyangkut organisasi atau kelompok gerilya yang pro Republik atau juga yang kontra Republik.

Yang menjadi masalah mungkin menyangkut pertanyaan: kemana dan dimana foto-foto tersebut dapat diperoleh? Ada beberapa sumber yang mungkin menyimpan foto-foto sejarah perjuangan seperti Museum Nasional, Museum Maritim, Museum Satria Mandala, Gedung Joeang '45, Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, LKBN Antara, Perpustakaan Nasional, dan Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta, dan Museum Pers di Solo.

Sumber lainnya adalah Museum Negeri "Lambung Mangkurat" dan Museum Wasaka yang jelas-jelas telah merawat dan memamerkan beberapa koleksi foto. Selain itu kantor LVRI di tingkat pusat, Provinsi, dan kabupaten juga bisa sebagai sumber, di samping para peminat, pengamat, sejarawan, dan pelaku sejarah itu sendiri.

Di Negeri Belanda terdapat beberapa lembaga yang mempunyai koleksi berupa dokumen yang sangat banyak tentang Indonesia. Lembaga yang dimaksud antara lain adalah KITLV (*Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-en Volkenkunde, Royal Netherlands, Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies*) di Leiden. Untuk mendapatkan koleksi foto di KITLV tidak harus pergi ke negeri Belanda, karena website KITLV (www.kitlv.nl) memiliki banyak foto online, yang dapat diakses dari Indonesia (tanpa adanya kewajiban untuk pergi ke Belanda). Men-download foto dari website KITLV gratis, namun jika mempublikasikan foto-foto tersebut perlu izin dari dan membayar kepada KITLV.

Di website KITLV terdapat 186 foto yang berkenaan dengan Bandjermasin, misalnya foto-foto masa Kerajaan Banjar dan Kresidenan Afdeling Selatan dan Timur Borneo (*Zuider en Oosterafdeling van Borneo*) pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, termasuk foto yang berkaitan dengan Perang Banjar, misalnya foto Demang Lehman dalam pasungan. Harga pembelian satu buah foto adalah Euro 35, dengan perincian harga per foto untuk ukuran 13 x 18 cm adalah Euro 10, jika diperlukan dapat dibeli penyerahan hak cipta (copyrights) sebesar Euro 25 per foto. Pembayarannya dapat dilakukan dengan dua pilihan, dengan kartu kredit atau bisa pula melalui rekening perwakilan KITLV-Jakarta.

Untuk periode Perang Banjar, kemungkinan foto asli sulit dicari tetapi bukan berarti tidak ada. Selain foto koleksi KITLV, ada beberapa sketsa peninggalan Hindia Belanda yang bisa direproduksi seperti sketsa Benteng "Tabanio dan Kutamara" yang terdapat dalam *De Bandjermasinsche Krijg* susunan W.A. van Rees. Di dalamnya juga memuat lukisan Demang Leman dalam pasungan yang akan menghadapi tiang gantungan di alun-alun kota Martapura.

Ada juga foto lainnya seperti foto Gusti Muhammad Arsyad (cucu Gusti Muhammad Seman; raja terakhir kerajaan Banjar) dan

foto isterinya seorang pejuang wanita bernama Gusti Zaleha. Foto-foto tentang Benteng Tatas dan kondisi kota Banjarmasin tempo doeloe juga masih ada, dan/atau bisa direproduksi di dalam buku Bandarmasih susunan M. Idwar Saleh.

Untuk melengkapinya bisa ditambah dengan diorama perang Banjar, serta foto-foto baru yang khusus dibuat untuk merekam bekas benteng tambang batu bara Oranje Nassau, Julia Hermina, Benteng Tundakan, Madang, dan lokasi tenggelamnya kapal perang Onrust di Lontotuo.

Untuk periode Pergerakan Kemerdekaan dan Zaman Jepang, pengumpulan foto-foto lama tidak terlalu sulit untuk dilaksanakan mengingat teknologi pemotretan waktu itu sudah semakin berkembang. Foto-foto tersebut bisa diperoleh di sumber-sumber yang telah disebutkan di muka. Kalau mau intens juga bisa dicari di Museum Leiden Negeri Belanda. Karena menurut informasi, arsip atau tulisan tentang 'kebanjaran' segudang banyaknya, sehingga tak kemungkinan besar arsip berupa foto juga ada.

Foto-foto lama yang telah tersedia dan tentunya tidak akan sulit untuk dikumpulkan adalah foto sejarah perjuangan masa revolusi fisik 1945-1949. Foto-foto dimaksud banyak tersimpan di berbagai lembaga pemerintah dan swasta, di tangan para peminat, pengamat, sejarawan dan pelaku sejarah itu sendiri atau keluarganya.

Salah satu koleksi foto yang kini sudah tersedia adalah foto yang terdapat di Museum Wasaka yang di antaranya merekam tokoh-tokoh pejuang pencetus Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan, serta foto yang menggambarkan proses menuju 'cease fire' di Munggu Raya 2 September 1949.

Selain itu perlu diupayakan bahwa foto-foto yang dikumpulkan jangan hanya yang berkenaan dengan Tentara ALRI Divisi IV, tetapi juga foto yang berkenaan dengan kelompok gerilya lainnya terutama pasukan MN 1001/MTKI yang dibentuk oleh Gubernur Borneo, Ir. Pangeran Mohammad Noor, yang secara organisatoris berdiri sendiri dan kini 'terlupakan' dalam publikasi sejarah, padahal mereka juga mempunyai peranan yang besar dalam menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia di Kalimantan Selatan.

PERAN MEDIA MASSA PADA MASA PERJUANGAN KEMERDEKAAN INDONESIA DI KALIMANTAN SELATAN

Sejarah lokal Kalimantan Selatan pada rentang waktu antara tahun 1900 s.d. 1950 mempunyai makna yang sangat penting dalam sejarah Indonesia, karena merupakan sebuah proses kesinambungan sejarah perjuangan kemerdekaan dari tiga periode sejarah yakni periode Pergerakan Kebangsaan, periode Pendudukan Jepang, dan periode Revolusi Fisik 1945-1949 sampai dengan Pengakuan Kedaulatan di tahun 1950.

Periode terakhir disebut juga periode Perang Kemerdekaan karena mempunyai makna bahwa ketika Proklamasi Kemerdekaan dikumandangkan maka lahirlah sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Manakala kemerdekaan itu ingin diambil alih lagi oleh Belanda, maka tidak ada jalan lain bagi bangsa Indonesia, kecuali perang mempertahankan kemerdekaan melalui perjuangan bersenjata maupun perjuangan di jalur politik.

Namun pada dasarnya, periode perang kemerdekaan ini melibatkan hampir seluruh unsur potensi bangsa, tidak hanya perjuangan dengan cara mengangkat senjata, melalui partai politik atau jalur diplomasi di meja perundingan, namun juga melalui jalur media massa, khususnya surat kabar dan majalah. Pada masa revolusi fisik peran media massa itu tidaklah kecil, karena melalui media massa itulah berita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 menyebar ke seluruh penjuru tanah air bahwa Indonesia telah merdeka.

Keberadaan dan peran media massa pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, sesungguhnya dapat ditelusuri sejak dasawarsa pertama awal abad ke-20, yakni saat terjadi kebangkitan nasionalisme dan patriotisme sebagai reaksi terhadap kolonialisme dan imperialisme.

Kalimantan Selatan (termasuk Kalimantan Tengah sekarang) merupakan bagian dari konstelasi pergerakan kebangsaan Indonesia itu. Pada periode yang dikenal sebagai periode pergerakan kebangsaan, media massa berperan menginformasikan pergerakan kebangsaan di Jawa dan Sumatera, memberitakan dan mengkritik ketidakadilan yang dilakukan Pemerintah Hindia Belanda, dan menyuarakan perlunya kesadaran untuk mengangkat harkat dan martabat rakyat yang terjajah.

Penyemaian semangat nasionalisme dan patriotisme untuk meraih kemerdekaan yang dilakukan melalui jalur media massa di samping jalur pendidikan dan organisasi pergerakan terus mengkristal pada periode-periode berikutnya dan kemudian menjadi modal utama dalam merebut dan mempertahankan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Tulisan ini dimaksudkan untuk memaparkan tentang peran media massa pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia di Kalimantan Selatan, yakni pada periode Pergerakan Kebangsaan (Perintis Kemerdekaan), periode Pendudukan Jepang, dan periode Perang Kemerdekaan (Revolusi Fisik 1945-1949), sampai dengan Pengakuan Kedaulatan di tahun 1950.

PENGARUH PERS POLITIK KEBANGSAAN

Di Indonesia peran media massa terutama pers berbahasa Melayu/Indonesia sangat penting dalam pergerakan kebangsaan, karena dapat bersentuhan langsung dengan penduduk bumiputera. Oleh karena itu, pers berbahasa Melayu seringkali dijadikan alat komunikasi politik oleh para elite Indonesia baru. Banyaknya kasus *persdelict* (tulisan yang dianggap menentang atau menghasut terhadap pemerintah, hingga dapat dituntut hukuman di pengadilan) di masa Hindia Belanda, larangan terbit bagi surat kabar dan majalah antara lain karena disadari bahayanya pengaruh tulisan dalam bahasa Melayu dalam pers itu segera dapat dipahami oleh penduduk bumiputera.

Begitupula halnya yang terjadi di Kalimantan Selatan, pertumbuhan organisasi pergerakan kebangsaan juga dipengaruhi oleh perkembangan media massa. Keberadaan surat kabar dan majalah telah mendorong perkembangan kebudayaan dan

kemajuan peradaban, karena melalui media massa itulah masyarakat mendapatkan informasi dan ide-ide tentang kemerdekaan, liberalisme, parlementarisme dan sebagainya yang merupakan bagian dari pergerakan nasional di daerah ini.

Pemerintah Hindia Belanda sangat membatasi kebebasan mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan serta penyebaran surat kabar dan majalah yang dicetak dan diedarkan oleh bumiputera, namun perkembangan selanjutnya pembatasan itu tidaklah memperlemah aktivitas para tokoh pers dan organisasi pergerakan di Kalimantan Selatan.

Para pemuda dapat memperoleh berbagai informasi melalui Taman Bacaan (*Het Leesgezelschap*) seperti yang dimiliki oleh organisasi Srie di Banjarmasin, maupun organisasi Persatuan Pemuda Marabahan (PPM) tahun 1929. Diadakannya taman bacaan berkaitan erat dengan keinginan tokoh masyarakat setempat agar kegiatan dapat mengurangi jumlah penduduk yang buta huruf.

Pada masa itu, para aktivis organisasi pergerakan telah berlangganan atau membaca berbagai surat kabar dari Jawa yang beredar di Kalimantan Selatan seperti Harian Oemoem, Tempo, PNI Soeloeh Indonesia, Bintang Timoer, Soeara Persatoean Goeroe Indonesia, Hindia Baroe, Bintang Baroe, Bintang Islam, Kemadjoean Hindia, Terang Boelan, Soeara Parindra, majalah bulanan Taman Siswa, dan lain-lain.

Selain itu tokoh pers maupun tokoh pergerakan di Kalimantan Selatan menerbitkan pula surat kabar, harian, mingguan, bulanan baik yang berhaluan nasional, Islam, nasional sekaligus Islam, ataupun netral. Diantaranya ada yang berdiri sendiri, organ dari partai politik, atau berdiri sendiri namun redaksinya diisi oleh anggota organisasi pergerakan, seperti majalah Malam Djoema'at, surat kabar Soeara Rakyat Kalimantan (SORAK), Soeara Kalimantan, Tjanang, Oetoesan Kalimantan, Pembangoenan Semangat, Berita N.Oe, Soeara Pakat Dajak, Soeara M.Th, Soeara B.I.C, Bingkisan, Kesadaran Kalimantan, Pelita Masjarakat, dan Panggilan Waktoe, dan lain-lain.

Pada umumnya isi surat kabar dan majalah yang terbit di Kalimantan Selatan tidak berbeda jauh dengan pemberitaan yang terdapat dalam surat kabar atau majalah di Jawa, yakni menginformasikan perkembangan politik kebangsaan,

menyuarakan pentingnya persatuan, memberitakan dan mengkritik ketidakadilan yang dilakukan Pemerintah Hindia Belanda, dan sebagainya yang merupakan bagian dari pergerakan nasional di daerah ini.

Amir Hasan Bondan dalam tulisannya di surat kabar Indonesia Merdeka edisi Nomor 99 Tahun ke VII, Sabtu 28 April 1951, berjudul “Pers di Kalimantan” menceritakan sekilas perkembangan pergerakan tahun 1920-an dengan mengangkat kembali tulisannya yang pernah terbit dalam majalah Malam Djoema’at terbitan tanggal 24 November 1927 dengan judul “Perasaan Bandjar Totok”. Amir Hassan Bondan membandingkan pemberitaan Malam Djoema’at dengan koran yang ia baca di Jawa, dan ternyata menurutnya terdapat persamaan antara isi surat kabar di Jawa dengan Borneo. Menurutnya koran-koran di Borneo tidak kalah dengan koran-koran di Jawa karena sama-sama hangat bunyi beritanya. Dalam tulisannya Amir Hasan juga menggelorakan semangat untuk maju seperti di Jawa dengan menganjurkan perlunya anak-anak Banjar bersekolah dan bergotong royong mengadakan sekolah bagi kaum perempuan (Wajidi, 2007a: 83-84).

Pasal Karet dan Persdelict

Pemerintah Hindia Belanda memiliki KUHP (*Wetboek van Straafrecht*). KUHP itu memiliki beberapa “pasal karet” karena mempunyai konotasi arti dari perkataan-perkataan yang dipergunakan tidak mengandung makna pasti tetapi bersifat elastis sehingga dapat diterapkan sesuai dengan makna yang dikehendaki oleh penguasa guna mengatasi pelbagai kasus yang merugikan atau mengancam sistem kolonial. Pasal-pasal dimaksud diantaranya: Pasal 153 bis; Pasal 153 ter; Pasal 161 bis; dan Pasal 171 bis. Pasal Pasal 153 bis berbunyi: “Barang siapa dengan perkataan, tulisan atau gambar melahirkan pikirannya yang biarpun secara menyindir atau samar-samar, memuat anjuran untuk mengganggu keamanan umum atau menentang kekuasaan Pemerintah Nederland atau Pemerintah Hindia Belanda dapat dihukum penjara maksimum 6 tahun atau denda maksimum Rp 300,00”. Perkataan-perkataan yang bersifat karet, yaitu ‘menyindir’, ‘samar-samar’ dan ‘mengganggu keamanan umum’. Pasal 153 bis sifat karetnya sama dengan isi

pasal 153 ter yang berbunyi: “Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar yang memuat pikiran seperti dimaksud dalam pasal 153 bis dapat dihukum penjara maksimum 5 tahun atau denda maksimum Rp 300,00”. Pasal 153 ter, seringkali khusus ditujukan pada para penanggungjawab media massa (termasuk redaktur) yang tidak menyebutkan nama penulis atau samaran (Wajidi, 2007a: 195).

Selain KUHP, pemerintah Hindia Belanda juga larangan bagi pegawai pemerintah untuk mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan yang dapat merongrong kekuasaan pemerintah sebagaimana tertuang dalam *Muilkorf-Circulaire* (Sirkuler-Pemberangusan) yakni Surat Edaran Gubernur Jenderal Hindia Belanda bertanggal 27 September 1919 (Wajidi, 2007a: 88).

Bagi pemerintah Hindia Belanda, beberapa pasal karet itu merupakan sarana efektif untuk membatasi ruang gerak para aktivis pergerakan dalam berbicara dan menulis di media massa. Beberapa di antara mereka terpaksa meringkuk di dalam penjara karena ucapannya (delik bicara), atau tulisannya yang dianggap menentang atau menghasut terhadap pemerintah sehingga terkena persdelict, atau bagi penerbitnya terkena persbreidel.

Kalau surat kabar dan majalah yang terbit dan kebetulan pimpinan redaksinya adalah seorang anggota organisasi politik, misalnya PBI, Parindra, NU, Musyawaratutthalibin, maka sudah tentu isi surat kabar itu menyebarkan semangat kebangsaan dan menjadi sorotan pemerintah Hindia Belanda.

Pada saat itu, para wartawan dan pemimpin redaksi memang umumnya adalah juga anggota organisasi partai politik, misalnya A.A. Kesuma Wira Negara pimpinan Soeara Rakyat Kalimantan (SORAK) adalah juga ketua umum Partai Ekonomi Kalimantan, A.A. Hamidhan pemimpin redaksi Soeara Kalimantan adalah juga sekretaris GAPI, Merah Johansyah komisariss Parindra Kalimantan Selatan dan Timur adalah seorang wartawan ketika wafat digantikan Hadhariyah M yang juga wartawan, Achmad Zakaria ketua umum B.I.C (*Bond Indonesische Chauffeur*) adalah juga wartawan Soeara B.I.C, H. Ahmad Barmawi Taib, ketua cabang Parindra Kandangan sekaligus pemimpin redaksi Pembangunan Semangat, dan banyak lagi wartawan lainnya.

Oleh karena itu, untuk menghindarkan diri dari persdelict maka seorang penulis dari anggota partai atau simpatisan partai yang aktif apalagi ia seorang pegawai negeri (*ambtenaar*) maka ia menulis artikel dengan memakai nama samaran, sehingga ketika terjadi persdelict maka yang bertanggung jawab adalah pemimpin redaksi (*Hoofredacteur*).

Diantara aktivis pergerakan sekaligus wartawan yang terkena persdelict adalah H. Ahmad Barmawi Taib, karena sering menulis artikel yang bersifat politik melalui Pembangunan Semangat. Majalah Pembangunan Semangat nomor 8,9,10,11,12 tahun 1939 disita polisi PID (*Politieke Inlichtingen Dienst*) Hindia Belanda dan ia dijatuhi hukuman penjara 3 tahun oleh Landraad Kandangan. Upaya Mr. Rusbandi selaku Komisaris Daerah Parindra Kalimantan Selatan yang sekaligus sebagai pembela tidak berhasil meyakinkan hakim kolonial, sehingga H. Ahmad Barmawi dikirim ke penjara Sukamiskin di Jawa Barat.

Kasus persdelict juga pernah dialami oleh Hadharyah M, seorang tokoh pejuang kemerdekaan di bidang politik sekaligus pemimpin redaksi mingguan Bendahara Borneo Samarindra, dan pemimpin redaksi Harian Utusan Kalimantan Banjarmasin. Karena tulisan-tulisan politiknya yang tajam, maka ia dinilai oleh Pemerintah Hindia Belanda di Banjarmasin sebagai seorang "*Hollander Hater*" (Pembenci Belanda). Ia pernah menjadi korban delik bicara dalam suatu rapat umum Parindra di Barabai dengan tuntutan melanggar pasal 151 bis dari *Wetboek van Strafrecht* Pemerintah Hindia Belanda dan dianjar hukuman penjara selama 3 bulan dan membayar denda f. 100.

Tanggal 17 Juni 1941 ia kembali ditangkap dan didakwa melanggar pasal-pasal 156, 157, dan 193 bis/ter *Wetboek van Strafrecht* (KUHP), karena telah menulis sebuah roman politik yang berjudul "Suasana Kalimantan" dan diterbitkan di Medan dengan judul "*Tersungkur Di Bawah Kaki Ibu*". Pada tanggal 1 Februari 1942 Hadharyah M menjalani kehidupan 4 tahun penjara, setelah upaya naik bandingnya ditolak oleh *Raad van Justitie* di Surabaya (Wajidi, 2007a:195).

Satu-satunya pers nasional yang usianya cukup lama adalah Harian Soeara Kalimantan (1930-1942) pimpinan/dimiliki oleh A.A. Hamidhan (kelak menjadi satu-satunya utusan Kalimantan dalam keanggotaan PPKI) yang menyaingi Dagblad Borneo Post

pimpinan Mr. J. Smith sebagai tameng pemerintah Hindia Belanda untuk wilayah Kalimantan. Soeara Kalimantan mempunyai rubrik hari sabtu bernama "Soeara Ibu Kalimantan" yang diasuh oleh Siti Aiyah (Ny. A.A. Hamidhan). Harian Soeara Kalimantan terkenal sebagai surat kabar yang mempunyai kritik tajam.

Karena selalu menentang pemerintah Hindia Belanda, maka menjelang datangnya tentara Jepang ke Banjarmasin pada tahun 1942, percetakan Harian Soeara Kalimantan milik A.A. Hamidhan menjadi salah satu sasaran pembumihangusan AVC (*Algemene Vernielings Corps*) Belanda bersamaan dengan praktek pembumihangusan objek vital lainnya di Banjarmasin. Tindakan Belanda itu dimaksudkan agar pihak Jepang tidak dapat masuk atau mempergunakannya lagi.

Berdasarkan riwayat hidup yang disusun oleh A.A. Hamidhan, maka selama hidupnya A.A. Hamidhan pernah mengalami tiga kali masuk penjara karena persdelict, yakni penjara Cipinang (dahulu Meester Cornelis) di Jatinegara selama 2 bulan karena persdelict waktu bekerja di surat kabar Bendahara Borneo di Samarinda (1930), penjara Banjarmasin selama 6 minggu karena persdelict Soeara Kalimantan (1932), kemudian di tahun 1936 masuk lagi selama 6 bulan di penjara Banjarmasin (Artha, 1981:133).

KEHIDUPAN PERS DI MASA PENDUDUKAN JEPANG

Berkuasanya tentara pendudukan Jepang bukan saja menjadi akhir dari kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda di Kalimantan Selatan, tetapi juga dimaknai sebagai "awan gelap" bagi pergerakan kebangsaan, termasuk kehidupan pers yang dibatasi, dibentuk, dan dijadikan corong pemerintah pendudukan Jepang.

Dengan maksud supaya rakyat segera dapat mengetahui tentang maksud kedatangan tentara Jepang, yaitu untuk melepaskan belenggu penjajahan Belanda terhadap Indonesia, maka Jepang menugaskan A.A. Hamidhan untuk menerbitkan surat kabar. Surat kabar itu bernama Kalimantan Raya, terbit pertama kali Maret 1942. Karena harian ini adalah kepunyaan dan segala sesuatunya dibawah kekuasaan pemerintah pendudukan Jepang, maka isinya dan tujuannya sudah tentu sangat bertentangan dengan surat kabar sebelumnya yakni Harian

Soeara Kalimantan yang tidak mau bekerjasama dengan pemerintah Hindia Belanda.

Pengalaman pahit pernah dirasakan oleh A.A. Hamidhan, yakni dipanggil Komandan Tentara Jepang di Banjarmasin secara mendadak, terkait dengan pemberitaan yang dimuat dalam Harian Kalimantan Raya yaitu mengenai sebuah berita dari Kotabaru mengenai gerakan atau perpindahan militer Jepang dalam harian tersebut. Berita tersebut diberi tanda dengan pensil merah yang tebal, disodorkan kepada A.A. Hamidhan, dengan kata-kata keras dalam bahasa Jepang yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang maksudnya “kenapa dimuat berita gerakan atau perpindahan militer Jepang dalam koran! Ini tidak betul! Bisa dihukum potong leher!” (Artha, 1981:126).

Sudah tentu ini mengejutkan A.A. Hamidhan sebagai penanggung jawab penuh atas segala isi Kalimantan Raya. Berita yang menjadi persoalan ini adalah berita perpisahan penduduk dengan sekelompok tentara Jepang yang terpaksa meninggalkan Kotabaru dan akan ditempatkan ke lain daerah yang tidak disebutkan. Bagi A.A. Hamidhan berita ini wajar, tetapi bagi Jepang ini merupakan strategi perang. Pengalaman yang demikian pahit dan menggetirkan untuk pertama kalinya mendapat mendapat pengampunan, tetapi bila di kemudian hari ada berita yang menjurus strategi militer dimuat, tidak ada ampun lagi, demikian kata komandan Jepang (Artha, 1981: 126; Nawawi, 1991:32).

Jika A.A. Hamidhan bernasib baik karena diampuni Jepang, nasib buruk justru menimpa Andin Boer’ie (pemimpin redaksi Borneo Simboen di Balikpapan), karena menyiarkan kedudukan Jepang dan sistem pemerintahan dan juga didakwa turut dalam komplotan anti pemerintah Jepang, dia ditangkap dan dibunuh oleh kempeitai Jepang di suatu tempat di Balikpapan (Artha, 1981: 29). Nasib naas juga menimpa wartawan Housman Babu (pernah menjabat presiden Pakat Dayak dengan surat kabar Soeara Pakat Dayak) yang ditangkap dan disiksa tentara Jepang sampai meninggal dunia dan tidak diketahui dimana kuburnya.

Pada akhir April atau awal Mei 1942 dari Tokyo Harian Asahi Simboen mengirim rombongan karyawan. Dalam suatu pertemuan antara pemerintahan sipil Jepang, pihak Asahi Simboen dan Kalimantan Raya, diambil suatu keputusan untuk

melebur Harian Kalimantan Raya menjadi Borneo Simboen. Penerbitan Borneo Simboen berbahasa Indonesia dipisahkan dari Borneo Simboen berbahasa Jepang.

Sebagai surat kabar corong pemerintah, maka sensor dari pihak pemerintah pendudukan Jepang yang dilakukan oleh bagian Seimuka dari kantor Minseifu di Banjarmasin diperketat sedemikian rupa, sehingga kalau semua karangan atau pemberitaan belum mendapat izin, koran tidak boleh dicetak dan diedarkan (Nawawi, 1991:34; Ideham, 2003:330).

Pada saat serangan Sekutu terhadap Jepang semakin menghebat dan pertahanan Jepang sudah mulai runtuh, maka pihak penerbitan surat kabar diperintahkan untuk mempersiapkan penerbitan darurat jika terpaksa. Karena itu sebagian percetakan dengan beberapa staf redaksi dipindahkan ke Kandangan dan kemudian diterbitkanlah Borneo Simboen edisi Hulu Sungai dipimpin oleh A. Basuni. Sebagian besar berita Borneo Simboen dikirim dari Banjarmasin atau pusat. Setelah pasukan sekutu datang di Banjarmasin untuk melucuti tentara Jepang, maka penerbitan Borneo Simboen dihentikan.

PERAN PERS REPUBLIKEN SELAMA PERANG KEMERDEKAAN

Kalimantan Selatan pada hari-hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 mencerminkan situasi dan kondisi yang tidak menentu karena simpang siurnya berita yang sampai ke daerah ini, di samping tentara Jepang juga masih menunjukkan kekuasaannya.

Berita proklamasi itu akhirnya sampai juga di Kalimantan Selatan, disiarkan pertama kali oleh surat kabar Borneo Simboen edisi Kandangan pimpinan A. Basuni yang informasinya diperoleh dari kantor berita Jepang "Domei" Banjarmasin yang menerima berita dari kantor "Domei" Jakarta. Baru kemudian Borneo Simboen edisi Banjarmasin pimpinan A.A. Hamidhan terbitan Nomor 851 Minggu 26 Hatji-Gatsoe 2605 (26 Agustus 1945) menyiarkan atau memberitahukan tentang pengangkatan Kepala Negara Indonesia Merdeka dan Bentuk Indonesia Merdeka (Wajidi, 2008: 1).

Keinginan A.A. Hamidhan, selaku pemimpin redaksi surat kabar Borneo Simboen dan utusan Kalimantan dalam keanggotaan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia)

untuk segera menyiarkan berita proklamasi sesaat setelah ia tiba di Banjarmasin tidak terlaksana karena dihalangi oleh militer Jepang. Seminggu kemudian (26 Agustus 1945) ia baru dapat menyiarkannya, disusul Borneo Simboen terbitan tanggal 30 Agustus 1945 yang memuat tentang UUD Republik Indonesia. Menurut A.A. Hamidhan, meski tidak memuat naskah proklamasi, pemberitaan Borneo Simboen itu sudah dari cukup untuk dimengerti masyarakat bahwa Indonesia betul-betul telah memproklamasikan kemerdekaannya.

Setelah penerbitan Borneo Simboen edisi Banjarmasin dihentikan pada bulan September 1945, maka sarana percetakannya ternyata lebih dahulu dimanfaatkan oleh Pemerintah Belanda (NICA) untuk melahirkan Soeara Kalimantan yang pro penjajah. Berbeda halnya dengan sarana percetakan Borneo Simboen yang ada di Kandungan, oleh para tokoh pers setempat dapat dimanfaatkan untuk melahirkan koran tengah mingguan yang diberi nama "Sinar Hoeloe Soengai". Akan tetapi, perjalanan Sinar Hoeloe Soengai sebagai embrio pers perjuangan di daerah ini tidaklah berlangsung dengan mulus, karena percetakan mereka juga diambil alih oleh NICA. Oleh karena itu, pada awal penerbitannya Sinar Hoeloe Soengai berada di bawah kendali NICA, baru kemudian oleh pimpinannya, haluan diubah dari pers yang menyuarakan kepentingan Belanda, menjadi pers yang menyuarakan dan membela bahkan memberikan fasilitas bagi kepentingan pejuang kemerdekaan.

Hubungan pengasuh Sinar Hoeloe Soengai yang akrab dengan tokoh-tokoh pejuang gerilya dan secara diam-diam ikut membantu lahirnya media massa perjuangan lainnya seperti Majalah Republik telah menimbulkan kecurigaan bagi penguasa NICA sehingga setiap penerbitan Sinar Hoeloe Soengai selalu dilakukan sensor yang keras oleh NICA.

Dalam bulan Desember 1948, Merah Danil Bangsawan (pimpinan umum Sinar Hoeloe Soengai) ditangkap oleh penguasa NICA dengan tuduhan telah membantu gerakan perjuangan. Beberapa waktu setelah penahanan Merah Danil Bangsawan, kemudian terjadi peristiwa tragis yang menimpa percetakan surat kabar Sinar Hoeloe Soengai, tindakan pimpinan baru yang menolak permintaan pencetakan surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan perjuangan dengan alasan takut ketahuan

Belanda, menyebabkan kekecewaan para pejuang di daerah tersebut. Masalah inilah yang menjadi sebab terbakarnya percetakan koran Sinar Hoeloe Soengai beberapa waktu kemudian. Bersamaan dengan hancurnya sarana percetakan tersebut, maka berakhir pula riwayat surat kabar Sinar Hoeloe Soengai yang terbit di daerah ini (Ideham, 2003:419).

Majalah Republik. Sesuai dengan namanya mempunyai misi sebagai majalah perjuangan dan mendapat sokongan dari Sinar Hoeloe Soengai. Penerbitan pertama bertepatan dengan hari ulang tahun yang pertama Republik Indonesia 17 Agustus 1946, seolah-olah mengingatkan masyarakat akan Proklamasi Kemerdekaan yang telah berkumandang setahun yang lalu. Oleh karena itu, nomor perdananya itu memuat kembali secara lengkap teks Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 beserta dengan susunan kabinet RI yang pertama.

Tindakan pimpinan redaksi yang menempatkan tanggal penerbitan nomor perdana bertepatan dengan hari proklamasi kemerdekaan, ditambah dengan nama majalah yang dipakai yakni Republik, secara jelas memberikan identitas misi perjuangan yang diemban media massa ini. Bahkan majalah ini selanjutnya secara berani memuat artikel yang menyerang tokoh-tokoh yang memihak Belanda. Misalnya Isah (nama samaran dari Zafry Zamzam, PU dan Pemred Majalah Republik) dalam tulisannya terang-terangan menyerang H. Abdurrahman Siddik (ketua partai Serikat Rakyat Islam-SRI) bentukan NICA, padahal sebelumnya ia adalah seorang republiken yakni ketua pedoman besar Partai Serikat Muslimin Indonesia (SERMI), akan tetapi kemudian memihak Belanda.

Selain wartawan, Zafry Zamzam juga dikenal sebagai tokoh Partai Serikat Kerakyatan Indonesia (SKI), sebuah partai republiken yang menentang ide federalisme dan pembentukan Negara Kalimantan. Setelah berjalan selama lebih dari dua tahun, maka pada suatu hari dalam bulan Desember 1948 Zafry Zamzam ditahan tentara Belanda. Sesudah penangkapan Zafry Zamzam, ternyata tidak ada tenaga penggerak lainnya dalam tubuh Majalah Republik yang berani menanggung risiko, sehingga berakhirilah riwayat Majalah Republik.

Harian Kalimantan Berdjuang (pada beberapa cetakannya ditulis Kalimantan Berdjoang) disingkat Ka-Be adalah media massa yang didirikan orang-orang dalam Sinar Hoeloe Soengai

dan Majalah Republik. Didirikan di Kandangan pada 1 Oktober 1946 namun kemudian berpusat di Banjarmasin. Surat kabar ini menyaingi dan mengimbangi berita-berita yang disuarakan pers NICA, yakni Dagblad Borneo Post dan Harian Soeara Kalimantan. Sebelumnya nama Soeara Kalimantan pernah dipakai sebagai nama surat kabar yang terbit pada tahun 1930-1942 yang dipimpin oleh A.A. Hamidhan yang isi pemberitaannya seringkali melawan Pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu, ketika lahir Harian Soeara Kalimantan bentukan NICA yang dikelola bekas wartawan Soeara Kalimantan pimpinan A.A. Hamidhan dan bersikap menyuarakan kepentingan penjajah, maka surat kabar ini sempat diprotes oleh A.A. Hamidhan, sehingga kemudian surat kabar ini merubah sikap dari menyuarakan kepentingan NICA menjadi bersikap nasionalis, dan awal 1950 mengganti nama menjadi Indonesia Merdeka.

Sebagai surat kabar yang mendukung perjuangan kemerdekaan, negara Kesatuan dan menentang ide federalisme dan pembentukan negara Kalimantan maka Harian Kalimantan Berjuang selalu diawasi dengan ketat oleh mata-mata NICA. Surat kabar ini secara nyata telah mendukung perjuangan gerilya yang dipimpin Letkol Hassan Basry dari kesatuan ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan, misalnya dengan menyiarkan naskah Proklamasi 17 Mei 1949 yang berisi pernyataan kebulatan tekak rakyat Kalimantan Selatan untuk tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau memberitakan kemajuan perang gerilya seperti yang diliput wartawannya dan diberitakan dalam Kalimantan Berjuang, Kamis 22 September 1949 No. 806 Tahun ke V, hlm.2 berjudul "Surat2 dari Hulu-Sungai: Menindjau daerah gerilja dari dekat" (Wajidi, 2007b: 112).

Pada bulan Desember 1948 bersamaan dengan Agresi II Militer Belanda, pemerintah NICA melakukan penangkapan-penangkapan terhadap tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan termasuk tokoh Harian Kalimantan Berjuang seperti Haspan Hadna, Adonis Samat, dan Abdul Jabar. Mesin stensil besar bersama sheet-sheet stensil terbitan sebelumnya turut pula disita NICA, dan hanya bisa diambil dengan syarat bahan-bahan berita yang akan dimuat harus terlebih dahulu melalui sensor oleh *Regeerings Voorlichting Dienst* (RDV) NICA. Meski dengan berat hati, persyaratan itu diterima. Tetapi di balik itu, tetap mengambil

taktik “mengakali” sensor tersebut agar berita-beritanya tetap menguntungkan perjuangan kemerdekaan (Wajidi, 2008:48).

Media cetak lainnya yang tak kalah beraniya adalah Harian Terompet Rakyat. Tokoh harian ini yakni Yusni Antemas (nama pena, Anggraini Antemas) tidak hanya bersenjatakan pena tapi juga ikut dalam organisasi perlawanan bersenjata yakni Gerpindom (Gerakan Rakyat Pengejar/Pembela Indonesia Merdeka) Amuntai. Melalui kolom pojok dan editorialnyaharian ini seringkali melontarkan protes, sindiran atau kritikan terhadap kebobrokan politik kolonial Belanda.

Keberanian Harian Terompet Rakyat mengkritik kebobrokan politik penjajahan menyebabkan harian ini senantiasa mendapat sorotan dari penguasa setempat. Hamran Ambrie (Pemred) dan Yusni Antemas (Wakil Pemred) dipanggil dan diminta untuk menghentikan kegiatannya sebagai wartawan Republiken dengan menawarkan bantuan berupa dana dan sarana apabila bersedia menghentikan penerbitan Harian Terompet Rakyat atau bekerjasama dengan surat kabar Belanda, namun tawaran itu ditolak mereka. Dampak lanjut dari gagalnya bujukan yang dilakukan pihak penguasa NICA kepada tokoh-tokoh Terompet Rakyat di Amuntai tersebut adalah terjadinya peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh militer NICA terhadap Yusni Antemas pada tanggal 6 Mei 1947.

Janji pihak yang berwajib untuk mengusut peristiwa Yusni Antemas ini tidak pernah berlanjut, bahkan tekanan-tekanan penguasa NICA terhadap Terompet Rakyat semakin kuat. Yusni Antemas beberapa kali ditangkap karena *persdelict* dari tulisan-tulisannya itu, ditahan di penjara Tanjung selama satu tahun sampai dibebaskan di tahun 1949.

Sesudah tokoh-tokohnya ditahan pemerintah NICA, maka kondisi harian Terompet Rakyat semakin memburuk karena kekurangan modal sampai akhirnya keluar pemberlakuan larangan terbit terhadap harian tersebut.

Banyak media cetak lainnya yang berhaluan republiken di masa Perang Kemerdekaan, antara lain Mingguan Kedaulatan, Islam Berjuang, Berita Merdeka, Fadjar Timoer, Mingguan Waspada, Harian Indonesia Merdeka, Politik Njata, Menara Indonesia, Pedoman Perdjoengan, dan Majalah Pawana. Namun semuanya bernasib sama yakni berumur pendek karena kesulitan

modal, terkena *persbreidel*, atau tokoh-tokohnya ditangkap dan dipenjarakan penguasa NICA .

22

MENYOAL BAAYUN MAULID DI KOMPLEKS MAKAM SULTAN SURIANSYAH

.....Orang Banjar dahulu mempunyai pamali atau pantangan dengan menyatakan jangan maayun anak dekat kuburan nanti kapidaraan....seharusnya di masjid agar anak yang diayun hatinya terpaut dengan masjid....

Pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, tiap 12 Rabiul Awal di Kalimantan Selatan ada tradisi menarik, yakni Baayun Maulid. Baayun asal katanya “ayun” yang diartikan “melakukan proses ayunan”. Bayi yang mau ditidurkan dalam ayunan biasanya akan diayun oleh ibunya. Asal kata maulid berasal dari peristiwa maulid (kelahiran) Nabi Muhammad Saw. Dengan demikian, baayun maulid diartikan sebagai kegiatan mengayun bayi atau anak sambil membaca syair maulid atau bersamaan dengan peringatan maulid Nabi Muhammad Saw. Orang Banjar, kadang menyebut maulid dengan sebutan mulud, sehingga disebut baayun mulud atau ayun mulud.

Selain Kuin Utara Banjarmasin, tradisi baayun maulid tahun ini akan dilaksanakan di Masjid Jami Teluk Dalam, Banjarmasin, dan di Masjid Al Mukarramah desa Banua Halat Kiri, Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin. Perbedaannya adalah jika di Teluk Dalam dan di Banua Halat bertempat di masjid, maka di Kuin Utara mengambil tempat di areal kompleks pekuburan yakni Komplek Makam Sultan Suriansyah.

Pengaruh Tradisi Pra Islam

Prosesi maayun anak pada tradisi baayun maulid sesungguhnya menggambarkan adanya akulturasi budaya antara unsur kepercayaan lama dan Islam. Sebelum mendapat pengaruh Islam, maayun anak sudah dilaksanakan ketika masyarakat masih menganut kepercayaan nenek moyang (ancestor worship).

Tradisi asalnya dilandasi oleh kepercayaan Kaharingan. Dalam perkembangannya, upacara maayun anak mengalami akulturasi dengan agama Hindu dan Islam. Hal tersebut dapat dibedakan dari: (a) maksud dan tujuan upacara; (b) Pelaksanaan upacara; (c) Perlengkapan upacara; (d) Perlambang atau simbolika yang dipengaruhi oleh unsur-unsur kepercayaan Kaharingan, Hindu, dan Islam.

Berdasarkan tradisi asalnya, tata cara maayun anak dalam upacara baayun maulid sebenarnya berasal tradisi bapalas bidan sebagai sebuah tradisi yang berlandaskan kepada kepercayaan Kaharingan. Dan ketika agama Hindu berkembang di daerah ini maka berkembang pula budaya yang serupa dengan baayun anak yakni baayun wayang (didahului oleh pertunjukan wayang), baayun topeng (didahului oleh pertunjukan topeng) dan baayun madihin (mengayun bayi sambil melagukan syair madihin).

Ketika Islam masuk dan berkembang, upacara bapalas bidan tidak lantas hilang, meski dalam pelaksanaannya mendapat pengaruh unsur Islam. Menurut Alfani Daud (1997) seorang bayi yang baru lahir dinyatakan sebagai anak bidan sampai dilaksanakannya upacara bapalas bidan, yakni suatu upacara pemberkatan yang dilakukan oleh bidan terhadap si bayi dan ibunya.

Selain dilaksanakan oleh masyarakat Banjar yang tinggal di perdesaan, upacara bapalas bidan juga dilaksanakan oleh orang Dayak Meratus. Setelah bayi lahir, orang Dayak Meratus kemudian melaksanakan upacara bapalas bidan, yakni memberi hadiah (piduduk) berupa lamang ketan, sumur-sumuran (aing terak), beras, gula dan sedikit uang kepada bidan atau balian yang menolong. Biasanya sekaligus pemberian nama kepada sang bayi. Termasuk nantinya saat anak sudah mulai berjalan (turun) ke tanah dari rumah (umbun) juga dengan upacara mainjak tanah, tetap dipimpin oleh balian.

Pelaksanaan bapalas bidan, biasanya dilakukan ketika bayi berumur 40 hari. Bapalas bidan selain dimaksudkan sebagai balas jasa terhadap bidan, juga merupakan penebus atas darah yang telah tumpah ketika melahirkan. Dengan pelaksanaan palas bidan ini diharapkan tidak terjadi pertumpahan darah yang diakibatkan oleh kecelakaan atau perkelahian di lingkungan tetangga maupun atas keluarga sendiri. Karena menurut

kepercayaan darah yang tumpah telah ditebus oleh si anak pada upacara **bapalas** **bidan** tersebut. Pada upacara **bapalas** **bidan** ini si anak dibuatkan buaian (ayunan) yang diberi hiasan yang menarik, seperti udang-udangan, belalang dan urung ketupat berbagai bentuk, serta digantungkan bermacam kue seperti cucur, cincin, apam, pisang dan lain-lain.

Kepada **bidan** yang telah berjasa menolong persalinan itu



diberikan hadiah segantang beras, jarum, benang, seekor ayam (jika bayi lahir laki-laki, maka diserahkan ayam jantan dan jika perempuan diberikan ayam betina), sebiji kelapa, rempah-rempah dan bahan untuk menginang seperti sirih, kapur, pinang, gambir, tembakau dan berupa uang.

Karena memang berasal dari tradisi pra-Islam, maka di antara perlengkapan **baayun** maulid seperti ayunan

dan **piduduk** mempunyai persamaan dengan perlengkapan langgatan pada acara tradisional **aruh ganal** yang dilaksanakan orang **Dayak Meratus**. Ketika Islam datang ke daerah ini, acara **bapalas** **bidan** dan **maayun** anak tidak dilarang, hanya kebiasaan yang tidak sesuai sedikit demi sedikit ditinggalkan. Begitupula berbagai perlengkapan, maksud dan tujuan, dan perlambang (simbolika) juga disesuaikan atau diisi dengan nilai-nilai Islam. **Maayun** anak kemudian dilaksanakan bersama-sama di masjid bersamaan dengan peringatan maulid Nabi Muhammad Saw.

Mengapa Harus di Masjid?

Dibanding baayun maulid yang diselenggarakan di Kuin, tradisi baayun maulid di masjid Banua Halat sudah berlangsung lama, sejak ratusan tahun silam. Meski para ulama sepakat bahwa peringatan maulid nabi tidak pernah dilaksanakan di masa Nabi Muhammad Saw masih hidup, generasi sahabat, dan bahkan masa tiga generasi sesudahnya, namun umat muslim melaksanakannya sebagai pencerminan rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya atas kelahiran Nabi Muhammad Saw yang membawa rahmat bagi sekalian alam. Adanya puji-pujian dan shalawat yang menyertai peringatan maulid nabi merupakan sebuah simbol akan kecintaan kepada nabi dan sekaligus harapan umat Islam yang selalu mengenang, meneladani kehidupan, dan mengharap syafaat dari Rasulullah kelak di yaumil akhir kelak.

Terlepas dari motif masing-masing peserta baayun yang nota bene diikuti oleh orang-orang tua, maka maksud maayun anak bersamaan dengan peringatan maulid nabi adalah untuk membesarkan nabi sekaligus berharap berkah atas kemuliaan Nabi Muhammad Saw, disertai doa agar sang anak yang diayun menjadi umat yang taat, bertakwa kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, serta kehidupannya sejak kecil maupun dewasa hatinya selalu terpaut untuk selalu sholat berjamaah di masjid.

Mengacu kepada contoh penyelenggaraan baayun maulid di masjid Banua Halat, maka jelas sekali bahwa penyelenggaraan baayun maulid di kompleks Makam Sultan Suriansyah yang nota bene kompleks pekuburan kurang selaras dengan filosofi agar anak yang diayun hatinya terpaut dengan masjid. Apalagi orang Banjar dahulu mempunyai pamali atau pantangan dengan menyatakan jangan maayun anak dekat kuburan nanti kapidaraan (diganggu makhlus halus/roh orang mati).

Oleh karena itu, maka seyogyanya tradisi baayun maulid yang diselenggarakan sekitar 7 tahun terakhir di kompleks Makam Sultan Suriansyah, hendaknya untuk tahun-tahun mendatang dipindah lokasinya ke Masjid Sultan Suriansyah. Sedangkan lokasi yang ditinggalkan tetap dapat difungsikan yakni sebagai lokasi haul Sultan Suriansyah dan keluarga raja-raja Banjar lainnya.

23

JAS MERAH (Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah)

Barangkali banyak yang tidak mengetahui bahwa negara dan bangsa Indonesia lahir adanya faktor sejarah. Begitupula halnya dengan Timor Timur, juga lepas dari pangkuan NKRI karena faktor sejarah.

Indonesia lahir karena *historical accident*. Ribuan pulau yang terbentang dari barat ke timur sepanjang lebih dari 5000 km (setara jarak Moskow ke London) dan didiami oleh 360 suku bangsa yang menggunakan lebih dari 300 dialek bahasa, dapat bersatu karena merasa memiliki kesamaan “nasib” dan “sejarah”, yakni dijajah dan menderita oleh penjajah yang sama, terutama oleh penjajahan Belanda.

Wadah persatuan, wilayah tempat bangsa Indonesia berada adalah wilayah Hindia Belanda sebagai hasil politik kolonial yang dipaksakan kepada daerah atau kepulauan nusantara yang dikuasanya. Pemaksaan itu, di satu sisi telah menimbulkan penderitaan, tetapi akibat dari itu telah menimbulkan kesadaran senasib dan sepenanggungan sebagai sebuah bangsa.

Indonesia adalah sebuah persatuan politik, bukan persatuan yang didasarkan faktor keturunan atau kesamaan etnis atau primordialisme sebagaimana dilansir oleh Karl Haushofer dalam Teori Persatuan Darah-dan-Tanah (*Blut-und-Boden Theorie*). Itulah mengapa etnis Papua yang berasal dari rumpun Melanesoid dapat bersatu dengan etnis lainnya di Indonesia.

Sebaliknya yang terjadi di Timor Timur, meski secara etnisitas mempunyai persamaan dengan penduduk Timor Barat (Provinsi Nusa Tenggara Timur), dorongan untuk melepaskan diri dari NKRI lebih mengakar karena mempunyai nasib dan sejarah di bawah penjajahan Portugis.

Perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan juga banyak diwarnai oleh data sejarah. Kedua belah pihak, baik Indonesia maupun Malaysia mengklaim berdasarkan peta-peta lama dan perjanjian yang pernah dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda dan Inggris. Meski akhirnya Mahkamah Internasional memutuskan kedua pulau itu jatuh ke tangan Malaysia, karena kehadiran Malaysia yang terus menerus di pulau tersebut.

Sejarah pernah pula menjadi senjata bagi kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Mereka beranggapan secara *de facto* Aceh tidak pernah dikuasai Belanda, dan Belanda tidak berhak memasukkan Kerajaan Aceh merdeka sebagai daerah yang dikuasainya dalam Perjanjian dengan pihak Inggris, dan apalagi diwarisi Indonesia setelah Proklamasi 17 Agustus 1945.

Presiden Soekarno dalam pidato kenegaraan tanggal 17 Agustus 1966 pernah menyatakan agar bangsa ini “Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah”. Atau biasa disingkat dengan JAS MERAH. Pesan singkat penuh makna dari sang *founding father* republik ini sekarang seolah tanpa makna. Sejarah pembentukan republik ini hanya dimaknai oleh yang tua renta, pejuang perintis dan veteran perang kemerdekaan yang kini sedikit tersisa.

Di sebagian kalangan anak muda, sejarah tak ubahnya urutan tanggal dan peristiwa, menghormat bendera, atau untuk sekadar diperingati sebagai momen seremonial. Sedangkan makna hakiki dari peristiwanya itu sendiri jarang diungkap atau bahkan sama sekali tak disentuh.

Hal yang seperti itu barangkali terjadi di berbagai lapisan masyarakat Kalsel. Banyak diantaranya yang lebih mengetahui sejarah nasional dibanding sejarah lokal. Bahkan ada menghubungkan peristiwa Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan 17 Mei 1949 dengan Stadion Olahraga 17 Mei di Banjarmasin. Lebih ironi lagi, ketika masyarakat lebih mengetahui siapa Jenderal Ahmad Yani atau Pangeran Diponegoro dibanding Brigjend H. Hassan Basry atau Pangeran Antasari (Pahlawan Nasional dari Kalsel).

Berbagai faktor menjadi alasan minimnya pengetahuan masyarakat terhadap sejarah lokal, diantaranya lantaran kurangnya bahan bacaan sejarah daerah Kalimantan Selatan yang terdapat di perpustakaan-perpustakaan sekolah.

Padahal banyak sebenarnya tokoh dan peristiwa lokal yang sebetulnya sangat berperan dan bermakna namun tidak mendapatkan porsi yang selayaknya dalam sejarah nasional karena dipandang tidak sejalan, atau kalau tidak ingin dikatakan bertentangan dengan kepentingan atau sudut pandang penguasa (baca: Orde Baru).

Sementara itu ada tokoh dan peristiwa dari daerah lain yang terasa ditonjolkan sehingga terlihat dominan dalam buku sejarah dan bahkan menjadi nama-nama jalan di daerah ini. Sebut saja Jalan Ahmad Yani yang membentang dari Banjarmasin sampai Martapura. Ia memang dikenal penentang komunis dan menjadi korban G 30 S/PKI. Akan tetapi, kalau boleh dibanding, Brigjen H. Hassan Basry adalah tokoh lokal penentang komunis, bahkan dapat dikatakan seorang pionir karena selaku Penguasa Perang Daerah Kalsel ia telah melarang kegiatan PKI dan ormasnya di Kalsel pada tahun 1960 yang kemudian diikuti Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan.

Bagi yang tidak mau mengambil pelajaran dari sejarah, maka sejarah hanyalah masa lalu *an sich*, bukan untuk masa depan. Bagi mereka sejarah tidak perlu dipelajari, karena sejarah dianggap menjemukan. Akibatnya, tanah dan air Indonesia, sebagai warisan sejarah para pendahulu tidak dikelola dengan baik. Sumber daya alam dieksploitasi habis-habisan tanpa peduli bahwa sumber daya alam itu amanah untuk anak cucu kelak.

Itulah mengapa seorang Kapten Purnawirawan M. Amin Effendi, seorang tokoh pejuang pertempuran 9 November 1945 di Banjarmasin, sebelum tutup usia berpesan agar rakyat Kalsel pintar-pintar mengelola sumber daya alam. Pesan itu barangkali lahir karena keprihatinan beliau melihat terkurasnya sumber daya alam seperti hutan dan batu bara, namun tidak memberikan kemakmuran yang berarti bagi rakyat Kalsel.

Sejarah memang tidak memberikan materi, akan tetapi muatannya adalah guru bagi kehidupan, dan seyogyanya pemahaman terhadap sejarah akan mendorong peningkatan rasa tanggung jawab generasi penerus terhadap masa depan bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Antemas, Anggraini. 1988. *Mutiara Nusantara Seri Kalimantan Selatan*. Amuntai: Mega Sapura.
- Arbain, Taufik. 2009. *Strategi Migran Banjar*. Yogyakarta: LkiS.
- Artha, Artum. 1981. *Wartawan-wartawan Kalimantan Raya*. Surabaya: Bina Ilmu Offset.
- Artha, Artum. 1973. *Proklamasi Kemerdekaan Dalam Jiwa Proklamasi*. Banjarmasin: Yayasan Pendidikan Seri Budiman.
- Asmawi, Dzul Karnain et al. 2010. "Sejarah Penghijrahan dan Pola Sosiobudaya Masyarakat Banjar Johor". Makalah Kongres Budaya Banjar II, Banjarmasin 4-7 April 2010.
- Basry, Hassan. 2003. *Kisah Gerilya Kalimantan Periode Tahun 1945-1949*, Jilid I dan II. Banjarmasin: Yayasan Bhakti Banua.
- Bondan, Amir Hasan Kiai. 1953. *Suluh Sedjarah Kalimantan*. Banjarmasin: Fadjar. 1953.
- BPS Kalsel. 2001. "Profil dan Analisa Kependudukan Kalimantan Selatan: Hasil Sensus Penduduk 2000". Banjarmasin: Laporan Penelitian Kerjasama Balitbangda Provinsi Kalsel dengan BPS Kalsel.
- Daud, Alfani. 1997. *Islam dan Masyarakat Banjar: Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Daud, Alfani. 1996. "Islam Dalam Budaya Masyarakat Banjar", Banjarmasin: Makalah IAIN Antasari.
- Fauzi, Ahmad. 2010. "Eksistensi Bahasa Banjar Dalam Konteks Pelestarian Budaya di Pamadaman". Makalah Kongres Budaya Banjar II, Banjarmasin 4-7 April 2010.
- Gafuri, Ahmad. 1984. *Sejarah Perjuangan Gerilya Menegakkan Republik Indonesia di Kalimantan Selatan (1945-1949)*. Kandungan: Departemen Penerangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Ideham, M. Suriansyah dkk (ed.). 2003. *Sejarah Banjar*. Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

- Ideham, M.Suriansyah dkk (ed.). 2007. *Urang Banjar dan Kebudayaannya*. Banjarmasin: Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan.
- Kartodirdjo, Sartono. 1975. *Sejarah Nasional Indonesia V*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kartodirdjo, Sartono. 1993. "*Historiografi Tradisional dan Modern Fungsi dan Strukturnya*". Makalah Simposium Internasional Ilmu Humaniora II. Yogyakarta: Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada.
- Lamry, Mohammed Salleh. 2010. "*Sejarah Orang Banjar dan Pola Pemertahanan Kebudayaan Banjar di Perantauan, Khususnya di Malaysia*". Makalah Kongres Budaya Banjar II, Banjarmasin 4-7 April 2010.
- Mahin, Marko.2004. "*URANG BANJAR; Identitas dan Etnisitas di Kalimantan Selatan*", dalam Kandil, Edisi 6, tahun II, Agustus-Oktober 2004. Banjarmasin: Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (LK-3).
- Museum Negeri Lambung Mangkurat. 1999/2000. "*Hikayat Banjar*". Banjarbaru.
- Muthalib, A. 2008. *Tuan Guru Sapat, Kiprah dan Perannya Dalam Pendidikan Islam di Indragiri Hilir Riau pada Abad XX*. Yogyakarta: Eja Publisher.
- Nasution, M. Arif (Penyunting). 1997. *Mereka Yang Ke Seberang, Proses Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia*. Medan: USU Press.
- Nasution, A.H. 1978. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*. Jilid 4 Periode Linggajati. Bandung: Disjarah-AD dan Angkasa.
- Nawawi, Ramli dkk. 1991. *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) Daerah Kalimantan Selatan*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Depdikbud.
- Patji, Abdul Rachman. 2001. "*Primordialisme, Konflik Sosial dan Globalisasi*", dalam *Masyarakat Indonesia*, Jilid XXVII, No. 1, 2001. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Pemda Tk.I Kalsel. 1990. *Sejarah Perjuangan Rakyat Menegakkan Kemerdekaan Republik Indonesia di Kalimantan Selatan (Periode 1945-1949)*. Banjarmasin.

- Radam, Noerid Haloei. 1987. *“Religi Orang Bukit: Suatu Lukisan Struktur dan Fungsi Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi”*. Disertasi Doktor. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Radam, Noerid Haloei. 1996a. *“Orang Banjar di Kalimantan Selatan”*. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat.
- Radam, Noerid Haloei. 1996b. *“Orang Bukit di Pegunungan Meratus”*. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat.
- Rafiek, M. 2009. *Mitos Raja dalam Hikayat Raja Banjar*. Malang: Disertasi Program Pascasarjana Program Studi Pendidikan Bahasa Universitas Negeri Malang.
- Ras, Johannes Jakobus, *Hikajat Bandjar: A Study in Malay Historiography*, NV. De Nederlandsche Boek en Steendrukkerij v/h H.L. Smits, S-Gravenhage, 1968.
- Saleh, M. Idwar. 1988. *ALRI Divisi IV-A: Suatu Lukisan Tentang Pertumbuhan, Perkembangan, dan Kemundurannya*. Banjarmasin: Laporan Penelitian FKIP Unlam.
- Saleh, M. Idwar. 1981/1982. *Banjarmasih*. Banjarbaru: Museum Negeri Lambung Mangkurat Provinsi Kalimantan Selatan.
- Saleh, M. Idwar dkk. 1978/1979. *Sejarah Daerah Tematis Zaman Kebangkitan Nasional (1900-1942) di Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Depdikbud.
- Saleh, M. Idwar. 1986. *Sekilas Mengenal Daerah Banjar dan Kebudayaan Sungainya Sampai Dengan Akhir Abad 19*. Banjarbaru: Museum Negeri Lambung Mangkurat Provinsi Kalimantan Selatan.
- Saleh, M. Idwar, dkk. 1978/1979. *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Proyek Penelitian Pencatatan Kebudayaan Daerah (P3KD) Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Kalimantan Selatan.
- Sarwono, Eddi dkk. 1996/1997. *“Studi Kelayakan Arkeologi Masjid Tua Banua Halat”*. Banjarmasin: Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Kalimantan Selatan.
- Sjamsuddin, Helius. 2001. *Pegustian dan Temenggung: Akar Sosial, Politik, Etnis, dan Dinasti Perlawanan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah 1859-1906*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tundjung. *“Budidaya Karet di Kalimantan Selatan, Suatu Tinjauan Sejarah tentang Pengembangan Karet Rakyat”*. Makalah

- Sosialisasi Pedoman Penulisan Sejarah Lokal di Banjarmasin tahun 2008.
- Usman, A. Gazali. 1989. *Urang Banjar Dalam Sejarah*. Banjarmasin: Lambung Mangkurat University Press.
- Usman, A. Gazali. 1995. *Kerajaan Banjar: Sejarah Perkembangan Politik Ekonomi Perdagangan dan Agama Islam*. Banjarmasin: Lambung Mangkurat University Press.
- Usman, A. Gazali. 1984. "Pengaruh Persetujuan Linggajati Terhadap Perjuangan ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan", dalam *Analisis Kebudayaan* No. 1 th IV. Jakarta: Depdikbud.
- Van Dijk, C. 1983. *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*. Jakarta: Grafitipers.
- Wajidi. 2007a. *Nasionalisme Indonesia di Kalimantan Selatan 1901-1942*. Banjarmasin: Pustaka Banua.
- Wajidi. 2007b. *Proklamasi Kesetiaan Kepada Republik*. Banjarmasin: Pustaka Banua.
- Wajidi, 2008. *Artum Artha, Sastrawan, Wartawan dan Budayawan Kalimantan Selatan*. Yogyakarta: Debut Press.

TENTANG PENULIS



Wajidi, dilahirkan di Bulayak (sekarang wilayah Kecamatan Hantakan) pada tanggal 15 Januari 1969 namun dibesarkan di Pagat Kecamatan Batu Benawa, dan seterusnya tercatat Pagat Hulu Sungai Tengah sebagai tempat kelahiran. Menyelesaikan S1 di PSP Sejarah FKIP Unlam Banjarmasin, tahun 1992. Pernah bekerja di Bidang Permuseuman dan Kepurbakalaan Kanwil Depdikbud Provinsi Kalimantan Selatan (1993-2001), sehingga kemudian menjadi peneliti pada Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan.

Selain menulis di surat kabar dan jurnal ia juga menerbitkan buku: *Akulturasasi Budaya Banjar di Banua Halat (2011)*, *Model Arsitektur Keraton Banjar di Teluk Selong Ulu, Martapura (dalam tim, 2011)*, *Gerakan Tengkorak Putih, Sebuah Kelompok Gerilya di Kalimantan Selatan 1949-1950 (2010)*, *Glosarium Sejarah Lokal Kalimantan Selatan Periode 1900-1950 (2008)*, *Mozaik Sejarah dan Kebudayaan Kalimantan Selatan, Sebuah Catatan Ringan (2008)*, *Artum Artha: Sastrawan, Wartawan, dan Budayawan Kalimantan Selatan (2008)*, *Proklamasi Kesetiaan Kepada Republik (2007)*, *Nasionalisme Indonesia di Kalimantan Selatan 1901-1942 (2007)*, dan anggota tim penulis/editor buku *Urang Banjar dan Kebudayaannya (2005)*, dan buku *Sejarah Banjar (2003)*.

Ia pernah memenangkan lomba karya tulis, diantaranya: (1) Pemenang II LKTI Bidang Pendidikan Tingkat Universitas Lambung Mangkurat (dalam tim, 1991); (2) Pemenang II LKT Tingkat Nasional Seniman Republik dari Harian Republik Jakarta 1994; (3) Pemenang II LKT Tingkat Nasional Dwidasaarsa Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari ibu Tien Soeharto 1995; (4) Pemenang I LKT Peringatan Hari AIDS Internasional Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan 2000; (5) Pemenang II Lomba Penulisan Artikel Tingkat Nasional Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 2003; (6)

Pemenang I Lomba Penulisan Jurnalistik Tingkat Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dari Mendiknas 2005; (7) Pemenang III Lomba Penulisan Kebencanaan tahun 2009 kerjasama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Masyarakat Penulis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Mapiptek) BPPT.

Sejarah dan kebudayaan adalah dua istilah yang tidak dapat dipisahkan. Manusia menghasilkan kebudayaan dalam berbagai bentuk, dan kebudayaan yang dihasilkan manusia di masa lampau akan menghasilkan sejarah. Sejarah sebagai suatu ilmu, peristiwa, maupun kisah melingkupi berbagai aspek kehidupan manusia.

Kalimantan Selatan mempunyai bentangan sejarah dan tinggalan budaya; dari zaman prasejarah sampai periode kontemporer dengan berbagai tabir yang menyelimutinya.

Pada dasarnya peninggalan sejarah hanya mampu memberikan sedikit keterangan tentang peristiwa yang sebenarnya, maka manakala benda peninggalan sejarah tidak didokumentasikan dengan baik, semakin rusak atau akhirnya musnah, maka sejarahnya akan semakin kabur atau dilupakan oleh generasi mendatang.

Buku ini merupakan salah satu upaya dokumentasi dan mengkomunikasikan berbagai informasi dan persoalan kesejarahan dan kebudayaan di Kalimantan Selatan yang dikemas dalam bentuk catatan ringan yang bersifat fragmentaris.

ISBN : 978-979-96468-38-X

